

**PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBINAAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP
KINERJA BISNIS DALAM MEWUJUDKAN
EFEKTIVITAS KELANGSUNGAN USAHA
DI KABUPATEN GARUT**

***THE INFLUENCE OF IMPLEMENTATION OF MICRO
SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT
POLICY TOWARDS BUSINESS PERFORMANCE IN
REALIZING THE EFFECTIVENESS OF BUSINESS
SUSTAINABILITY IN GARUT DISTRICT***

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti Ujian Sidang
guna memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana
Konsentrasi Ilmu Administrasi Bidang Kajian Administrasi Negara

**Oleh:
IRWAN SUTIAWAN
NPM. 24091116015**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS GARUT
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

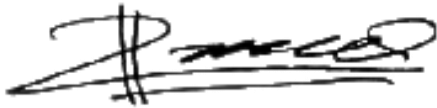
**PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBINAAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP KINERJA BISNIS
DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS KELANGSUNGAN USAHA
DI KABUPATEN GARUT**

Oleh:
IRWAN SUTIAWAN
NPM. 240911160015

Telah disetujui oleh Komisi Pembimbing
pada tanggal seperti tertera di bawah ini
Garut, Maret 2018

Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Ali Ramdhani, M.T.

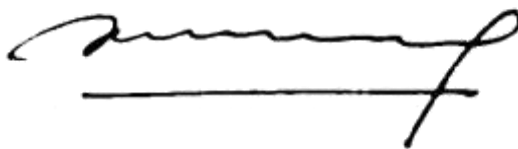
Pemimbing II



Dr. H. Dodi Hermana, M.Si.

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Garut,



Prof. Dr. H. Jusman Iskandar, MS.

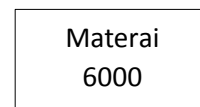
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Saya yang berjudul **“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Kecamatan Pameungpeuk”**, beserta isinya adalah karya Saya sendiri tanpa ada di dalamnya bagian yang merupakan jiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dikalangan masyarakat ilmiah.

Saya bersedia mempertanggungjawabkan pernyataan Saya ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya Saya ini atau dari pihak lain terhadap keaslian karya Saya ini.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Garut, Maret 2018
Peneliti,



Dasep Rahmat
NPM. 24091116005

ABSTRAK

Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Kinerja Bisnis dalam Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha di Kabupaten Garut

Irwan Sutiawan, NPM. 240911160015
Program Pascasarjana Universitas Garut
Tesis, 2018, 5 BAB, 202 halaman

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kinerja bisnis dalam mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha di Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode ekplanasi dengan teknik evaluasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 1.995 unit UMKM yang tergabung dalam 6 (enam) Asosiasi atau Himpunan UMKM yang termasuk dalam 7 (tujuh) produk unggulan Kabupaten Garut. Teknik *sampling* menggunakan *non probability sampling* dan *cluster random sampling* yang dihitung secara proporsional menggunakan rumus Slovin diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 96 sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kuisioner serta studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data untuk menjawab hipotesis penelitian menggunakan pendekatan statistik dengan model Analisis Jalur (*Path Analysis*).

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis dan efektivitas kelangsungan usaha sebesar 24,71%, sedangkan pengaruh epsilon-nya sebesar 75,29%. Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap kinerja bisnis sebesar 25,66%, sedangkan pengaruh epsilon-nya sebesar 74,34%. Kinerja bisnis berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kelangsungan usaha sebesar 13,96% sedangkan pengaruh epsilon-nya sebesar 86,04%. Selanjutnya pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM berpengaruh signifikan secara langsung terhadap efektivitas kelangsungan usaha sebesar 6,65%, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui kinerja bisnis sebesar 4,10%, maka total pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap efektivitas kelangsungan usaha sebesar 10,75% dengan pengaruh epsilon-nya sebesar 89,25%.

Disamping itu dalam penelitian ini diperoleh temuan permasalahan, diantaranya; pertama, pada variabel pelaksanaan kebijakan pembinaan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu informasi kebijakan pembinaan UMKM belum sepenuhnya bersifat terbuka bagi semua UMKM. Kedua, pada variabel kinerja bisnis yaitu kemampuan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas belum optimal dengan kondisi perusahaan saat ini. Ketiga, pada variabel efektivitas kelangsungan usaha yaitu kemampuan untuk menurunkan biaya produksi sebagai proses efisiensi belum optimal

Kata kunci: *Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kinerja Bisnis, Efektivitas Kelangsungan Usaha*

ABSTRACT

The Influence of Implementation of Micro, Small and Medium Business Development Policy Towards Business Performance in realizing The Effectiveness of Business Sustainability in Garut District

Irwan Sutiawan, NPM. 240911160015
Post Graduate, University of Garut
Thesis, 2018, 5 Chapters, 202 pages

The purpose of this reseach is to determine the influence of the implementation of Micro, Small and Medium Business (UMKM) development policies towards business performance to realize the effectiveness of business sustainability in Garut District. The research method used is the explanation method with evaluation techniques. The population in this research is 1,995 units of UMKM incorporated in 6 (six) Association of UMKM which is included in 7 (seven) superior products Garut District. The sampling technique using non probability sampling and cluster random sampling which is calculated proportionally using Slovin formula obtained by the number of samples of 96 samples. Data collection techniques used observations, interviews, and questionnaires and documentation studies. While the data analysis techniques to answer the research hypothesis using a statistical approach with Path Analysis model.

Based on the test results, it is known that the implementation of Micro, Small and Medium Business development policy has a positive and significant impact on business performance and the effectiveness of business sustainability of 24.71%, while the effect of epsilon is 75.29%. Implementation of UMKM guidance policy has a significant effect on business performance of 25.66%, while the effect of epsilon is 74.34%. Business performance significantly affects the effectiveness of business continuity of 13.96% while the effect of epsilon is 86.04%. Furthermore, the implementation of UMKM development policy has a significant effect directly on the effectiveness of business continuity of 6.65%, while the indirect effect through business performance is 4.10%, the total influence of the implementation of MSME development policy towards the effectiveness of business continuity of 10.75% epsilon 89.25%.

Besides, in this research, the findings of the problems, among others; first, on the variable implementation of coaching policy. Micro Small and Medium Enterprises ie information policy development of UMKM not yet fully open to all UMKM. Second, the business performance variable is the company's ability to increase productivity is not optimal with the current condition of the company. Third, the variable of business continuity effectiveness is the ability to decrease production cost as efficiency process not yet optimal

Keyword: *Implementation of Development Policy. Mico, Small and Medium Business, Business Performance, Effectiveness of Business Sustainability.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Illahi Rabbi yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Garut yang berjudul **“Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Kinerja Bisnis Dalam Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha di Kabupaten Garut”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Universitas Garut bidang kajian Administrasi Negara. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat peneliti harapkan.

Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati perkenankan peneliti menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Terhormat:

Pertama, Rektor Universitas Garut yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Garut dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan Usulan Penelitian ini.

Kedua, Direktur Pascasarjana Universitas Garut, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Garut.

Ketiga, Bapak Prof. Dr. H. M. Ali Ramdhani, MT, selaku Komisi Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan dan menyelesaikan Usulan Penelitian ini

Keempat, Bapak Dr. H. Dodi Hermana, M.Si., selaku Komisi Pembimbing II yang mengarahkan, memotivasi dan membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Usulan Penelitian ini.

Kelima, seluruh Dosen pada Program Pascasarjana Universitas Garut yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama mengikuti proses perkuliahan yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan kepada penulis.

Keenam, seluruh Civitas Akademika Universitas Garut yang telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis sampai dengan selesai.

Ketujuh, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut yang telah memberikan izin sebagai objek penelitian dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Garut.

Kedelapan, seluruh rekan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Garut Angkatan XXI atas kekompakan perkuliahan dan partisipasi membantu penyusunan Usulan Penelitian ini.

Kesembilan, rekan-rekan kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut atas bantuannya selama penyusunan Usulan Penelitian ini

Kesepuluh, kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu atas kontribusinya membantu penyelesaian penyusunan Tesis ini.

Akhirul kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dan semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Garut, Maret 2018
Penulis,

Irwan Sutiawan
NPM. 240911160015

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Tinjauan Teoritis Tentang Pembangunan Ekonomi dan UMKM ...	21
2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu	26
2.3 Relevansi Masalah Penelitian Dengan Ilmu Administrasi Negara	29

2.4	Tinjauan Teoritis Tentang Variabel-Variabel Penelitian	36
2.4.1	Tinjauan Teoritis Tentang Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM	36
2.4.2	Tinjauan Teoritis Tentang Variabel Kinerja Bisnis	45
2.4.3	Tinjauan Teoritis Tentang Variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha	54
2.5	Hubungan Konseptual Antara Variabel Penelitian	60
BAB III Metodologi Penelitian		63
3.1	Metode Yang Digunakan	63
3.2	Variabel-Variabel Penelitian dan Paradigma Penelitian	63
3.2.1	Variabel-Variabel Penelitian	63
3.2.2	Paradigma Penelitian	64
3.3	Definisi Operasional Variabel Penelitian	65
3.4	Operasionalisasi Variabel-Variabel Penelitian	67
3.5	Alat Ukur Penelitian serta Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur	69
3.5.1	Alat Ukur Penelitian	69
3.5.2	Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian	71
3.5.2.1	Pengujian Validitas Alat Ukur Penelitian	71
3.5.2.2	Pengujian Reliabilitas Alat Ukur Penelitian	78
3.6	Populasi Penelitian dan Teknik Penarikan Sampel	83
3.6.1	Populasi Penelitian	83
3.6.2	Teknik Penarikan Sampel	84
3.7	Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data serta Proses Pengumpulan Data	86

3.7.1	Jenis dan Sumber Data	86
3.7.2	Teknik Pengumpulan Data	88
3.7.3	Proses Pengumpulan Data	89
3.8	Teknik Pengolahan, Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian	91
3.8.1	Teknik Pengolahan Data	91
3.8.2	Proses Transformasi Data	92
3.8.3	Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian	92
3.9	Lokasi, Jadwal Waktu dan Tahap-Tahap Penelitian	95
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		97
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	97
4.1.1	Keadaan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Garut	99
4.1.2	Pemerintah Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ..	103
4.1.3	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	108
4.2	Karakteristik Responden	112
4.2.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	112
4.2.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	113
4.2.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	114
4.2.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Berdiri	115
4.2.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Produksi ..	116
4.3	Deskripsi Hasil Penelitian	116
4.3.1	Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	118
4.3.1.1	Dimensi Konsistensi	121

4.3.1.2	Dimensi Transparansi	123
4.3.1.3	Dimensi Akuntabilitas	125
4.3.1.4	Dimensi Keadilan	127
4.3.1.5	Dimensi Partisipatif	130
4.3.2	Variabel Kinerja Bisnis	132
4.3.2.1	Dimensi Tata Kelola Desain Produk	137
4.3.2.2	Dimensi Tata Kelola Keuangan	140
4.3.2.3	Dimensi Tata Kelola Pelanggan	143
4.3.2.4	Dimensi Tata Kelola Teknologi dan Proses Produksi	147
4.3.2.5	Dimensi Tata Kelola Pertumbuhan dan Pembelajaran	149
4.3.2.6	Dimensi Tata Kelola Pemasaran	152
4.3.3	Variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha	154
4.3.3.1	Dimensi Produktivitas dan Efisiensi	158
4.3.3.2	Dimensi Laba dan Pengembangan Usaha	160
4.3.3.3	Dimensi Stabilitas Usaha	163
4.3.3.4	Dimensi Semangat dan Kepuasan Kerja	165
4.4	Pengujian dan Pembahasan Hipotesis Penelitian	168
4.4.1	Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X) Terhadap Kinerja Bisnis (Y) Dalam Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha (Z)	169
4.4.2	Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X) Terhadap Kinerja Bisnis (Y)	174
4.4.3	Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Kinerja Bisnis (Y) Terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha (Z)	176
4.4.4	Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X) Terhadap Efektivitas Kelangsungan	

Usaha (Z)	179
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	184
5.1 Kesimpulan	184
5.2 Saran-Saran	187
DAFTAR PUSTAKA	190
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Perkembangan Jumlah dan Volume Usaha UMKM di Kabupaten Garut	2
Tabel 1.2	Pelaku UMKM Produk Unggulan Kabupaten Garut	3
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Kajian dengan Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian	68
Tabel 3.2	Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi	74
Tabel 3.3	Hasil Uji Validitas Variabel X (Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM)	74
Tabel 3.4	Hasil Uji Validitas Variabel Y (Kinerja Bisnis)	75
Tabel 3.5	Hasil Uji Validitas Variabel Z (Efektivitas Kelangsungan Usaha)	77
Tabel 3.6	Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM)	80
Tabel 3.7	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Kinerja Bisnis)	81
Tabel 3.8	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Z (Efektivitas Kelangsungan Usaha)	82
Tabel 3.9	Populasi Penelitian	84
Tabel 3.10	Sebaran Sampel Penelitian	86
Tabel 3.11	Jadwal Waktu Penelitian dan Langkah-Langkah Penelitian...	96
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	112
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur	113
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	114
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Berdiri	115
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Produksi	116
Tabel 4.6	Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase	117

Tabel 4.7	Kriteria Penilaian Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM	118
Tabel 4.8	Kriteria Penilaian Dimensi Konsistensi	121
Tabel 4.9	Kriteria Penilaian Dimensi Transparansi	123
Tabel 4.10	Kriteria Penilaian Dimensi Akuntabilitas	125
Tabel 4.11	Kriteria Penilaian Dimensi Keadilan	127
Tabel 4.12	Kriteria Penilaian Dimensi Partisipatif	130
Tabel 4.13	Kriteria Penilaian Variabel Kinerja Bisnis	132
Tabel 4.14	Kriteria Penilaian Dimensi Tata Kelola Desain Produk	137
Tabel 4.15	Kriteria Penilaian Dimensi Tata Kelola Keuangan	140
Tabel 4.16	Kriteria Penilaian Dimensi Tata Kelola Pelanggan	144
Tabel 4.17	Kriteria Penilaian Dimensi Tata Kelola Teknologi dan Proses Produksi	147
Tabel 4.18	Kriteria Penilaian Dimensi Tata Kelola Pertumbuhan dan Pembelajaran	150
Tabel 4.19	Kriteria Penilaian Dimensi Tata Kelola Pemasaran	152
Tabel 4.20	Kriteria Penilaian Variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha	155
Tabel 4.22	Kriteria Penilaian Dimensi Laba dan Pengembangan Usaha	161
Tabel 4.23	Kriteria Penilaian Dimensi Stabilitas Usaha	163
Tabel 4.24	Kriteria Penilaian Dimensi Semangat dan Kepuasan Kerja	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran	16
Gambar 1.2	Model Penelitian	18
Gambar 3.1	Paradigma Penelitian	64
Gambar 4.1	Diagram Jalur	168

LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Pedoman Wawancara
LAMPIRAN II	Alat Ukur Penelitian/Kuisisioner
LAMPIRAN III	Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Alat Ukur Penelitian
LAMPIRAN IV	Pengolahan dan Analisis Data
LAMPIRAN V	Surat Keputusan Komisi Pembimbing Tesis
LAMPIRAN VI	Surat Rekomendasi Penelitian
LAMPIRAN VII	Surat Permohonan Izin Penelitian
LAMPIRAN VIII	Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Garut
LAMPIRAN IX	Daftar Riwayat Hidup
LAMPIRAN X	Jurnal Publik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan dalam jangka panjang dimana salah satu faktor yang dapat menyebabkannya adalah sisi kelangsungan usaha mikro. Akibat buruk yang mungkin ditimbulkan perkembangan penduduk terhadap pembangunan, apabila produktivitas kerja sektor produksi sangat rendah. Secara kumulatif rendahnya produktivitas kerja diawali oleh pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan yang kurang memadai sehingga pembangunan ekonomi yang diharapkan akan sulit diwujudkan.

Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia adalah melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Mengingat besarnya potensi UMKM yang ditunjukkan oleh keberadaannya kurang lebih 44,7 juta unit usaha pada tahun 2015 dengan kegiatan usaha yang mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar di seluruh tanah air. Pemberdayaan UMKM akan mendukung peningkatan produktivitas ekonomi pemerintah daerah, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Pemberdayaan UMKM sebagai kegiatan ekonomi secara makro diarahkan agar UMKM makin mampu menjadi wadah ekonomi yang handal untuk dapat bersaing dan berkiprah mengisi pembangunan perekonomian di daerah, khususnya di Kabupaten Garut.

Seperti diketahui bahwa jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bergerak dalam berbagai bidang usaha dan tersebar di Kabupaten Garut berjumlah sekitar 12.433 unit usaha, dalam kiprah usahanya sangat membantu dalam penggunaan sumber daya lokal untuk bahan baku dan sumber daya manusia, serta telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membantu mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Garut. Namun secara keseluruhan, UMKM masih kurang optimal dalam efektivitas kelangsungan usaha beberapa tahun belakangan ini (www.garutkab.go.id).

Hal tersebut dapat dilihat dari observasi awal yang dilakukan di Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Kabupaten Garut melalui data tentang perkembangan jumlah dan volume usaha UMKM sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Perkembangan Jumlah dan Volume Usaha UMKM
di Kabupaten Garut

No	Uraian	2015	2016	Perkembangan (%)
1	Jumlah UMKM (unit)	12.078	12.433	2,86
2	Jumlah Modal Sendiri (Rp)	346.900.150.187	360.776.156.194	4,04
3	Volume Usaha (Rp)	822.715.108.077	855.661.152.400	4,01
4	Asset (Rp)	407.976.289.160	424.295.340.726	4,12
5	Modal Luar (Rp)	83.441.715	86.779.421	3,61
6	Tenaga Kerja (orang)	26.699	27.767	4,15

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Kab. Garut, 2017.

Dari tabel tersebut terlihat peningkatan perkembangan jumlah unit usaha UMKM relatif kecil, dimana jumlah unit usaha pada tahun 2015 hanya naik sebanyak 355 unit atau sekitar 2,86% dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah unit usaha tersebut belum optimal jika melihat potensi sektor ekonomi di Kabupaten Garut dan kondisi tersebut diduga hanya pada beberapa sektor usaha

saja sedangkan yang lain tidak mengalami kenaikan. Artinya di satu sisi terdapat sektor usaha yang meningkat tetapi di sisi lain diduga terjadi penurunan jumlah UMKM, sehingga jika melihat kelangsungan usaha tersebut dapat dikatakan belum efektif. Kemudian penyerapan tenaga kerja yang dapat diserap oleh usaha UMKM sangat kecil sebesar 4,15%, hal ini berkaitan dengan penyerapan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang belum merata.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas apabila ditinjau dari segi pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan teknik perbandingan antar tahun dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Faktor pertumbuhan UMKM relatif rendah;
2. Faktor penyerapan tenaga kerja (SDM) UMKM masih rendah;
3. Faktor produktivitas kerja relatif rendah.

Dari sisi indikator mikro, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan mengenai permodalan dengan berbagai skim kredit melalui bank-bank pemerintah namun kenyataannya belum dapat meningkatkan permodalan UMKM melalui pinjaman modal atau kredit usaha dikarenakan mengalami kesulitan yang disebabkan legalitas usaha. Sehingga kelangsungan usaha UMKM dengan modal sendiri tersebut akan mengalami pasang surut dan bahkan mengalami kebangkrutan.

Kondisi yang diuraikan di atas juga dipengaruhi oleh permasalahan internal pada setiap UMKM (Dinas Disperindag dan ESDM, 2017), antara lain:

- a. Solidaritas antar UMKM masih kurang, masih banyak UMKM sejenis bergerak secara individual tidak bergabung dalam suatu Asosiasi atau Himpunan.
- b. Skala usaha, belum mampu membuat jejaring ekonomi (*economic network*) dan rantai pemasaran (*marketing chain*) serta jenis usahanya terbatas dan diperparah dengan tingkat kecukupan modal yang belum memadai sehingga belum mampu bersaing di pasar global.
- c. Keterampilan manajerial, masih banyak pengelolaan usahanya dengan cara konvensional padahal persaingan saat ini yang ketat dan bersaing secara global membutuhkan pengelolaan yang profesional baik dari teknis maupun manajerial.
- d. Penguasaan teknologi, secara umum dalam hal penguasaan teknologi masih kurang, dimana penyebab utamanya adalah latar belakang pendidikan.

Kabupaten Garut memiliki 7 (tujuh) komoditas unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat Garut yaitu; 1) penyamakan kulit, 2) kerajinan kulit, 3) dodol garut, 4) kain sutera alam, 5) anyaman bambu, 6) minyak akar wangi, dan 7), batik garutan, yang saat ini dikembangkan melalui UMKM.

Namun kenyataannya efektivitas kelangsungan usaha ketujuh komoditas unggulan tersebut sulit diketahui keberadaannya karena tidak semua UMKM tersebut menjadi perusahaan formal yang terdaftar pada Disperdag dan ESDM Kabupaten Garut, seperti ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 1.2
Pelaku UMKM pada 7 (tujuh) Produk Unggulan Kabupaten Garut

No	UMKM	Unit
1	Penyamakan Kulit	1.495

2	Kerajinan Barang Jadi Kulit	3.805
3	Dodol Garut	1.257
4	Anyaman Bambu	1.960
5	Sutera Alam	215
6	Batik Garutan	248
7	Minyak Akar Wangi	90
Total		9.070

Sumber: Disperindag dan ESDM. Kab. Garut, 2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebanyak 9.070 unit UMKM yang mendaftarkan sebagai perusahaan formal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut. Merujuk pada tabel 1.1 dimana pada tahun 2015 terdapat sekitar 12.433 unit UMKM menunjukkan bahwa sekitar 72,95% yang efektivitas kelangsungan usahanya secara formal dapat diketahui oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut. Melihat kondisi seperti diuraikan diatas maka semakin jelas dugaan relatif rendahnya efektivitas kelangsungan usaha UMKM di Kabupaten Garut.

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh UMKM adalah relatif rendahnya kinerja bisnis UMKM yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

- (1) Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perijinan, pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, penataan lokasi usaha dan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya kemajuan daerah melaksanakan pemberdayaan koperasi dan UMKM;
- (2) Pemulihan kondisi perekonomian makro akibat kenaikan BBM dan energi lainnya sangat berpengaruh terhadap produksi UMKM;
- (3) Terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan, khususnya kredit investasi;

- (4) Terbatasnya ketersediaan dan kualitas jasa pengembangan usaha bagi UKM;
- (5) Keterbatasan sumberdaya finansial untuk usaha mikro.

Permasalahan kinerja bisnis UMKM tentunya berdampak pada produktivitas perusahaan secara umum, dimana keberadaan UMKM di Kabupaten Garut mempunyai *multiflier-effect* yang dapat membantu pembangunan daerah dan pemanfaatan sumber daya lokal, serta dapat meningkatkan pendapatan sumber daya manusia yang terlibat didalamnya.

Sejalan dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu potensi bagi kontribusi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu melalui pajak dan retribusi yang dikenakan dengan hasil produksi, dimana dengan segala kekuatan dan peluang yang dimiliki UMKM menjadi prospek usaha yang menjanjikan.

Dalam pemberdayaan ekonomi sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Garut, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pelatihan agar UMKM di Kabupaten Garut memiliki kualitas dan kinerja yang baik sehingga berdampak pada produktivitas UMKM serta dukungan bagi terwujudnya peningkatan efektivitas kelangsungan usaha UMKM khususnya di Kabupaten Garut. Bagaimanapun juga dengan meningkatnya kualitas UMKM baik dari sisi pelaku dan produksinya maka akan berdampak pula bagi pemerintah daerah, khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terdapat tumpang tindih dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi, UMKM dan BMT Kabupaten Garut, sehingga terkesan diantara kedua lembaga tersebut tidak terdapat koordinasi dalam pembinaan UMKM. Di satu pihak bahwa Dinas Koperasi, UMKM dan BMT merupakan organisasi yang menaungi kegiatan UMKM namun disisi lain untuk keperluan ijin usaha berada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu partisipasi UMKM untuk mengikuti program pembinaan cenderung rendah yang ditunjukkan salah satunya adalah masih minimnya jumlah unit UMKM yang hadir, sehingga terkesan hanya UMKM tertentu yang diundang atau menghadiri kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM di Kabupaten Garut masih terkendala dengan berbagai hambatan.

Dengan demikian fenomena permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM belum optimal yang ditunjukkan dengan masih terdapat tumpang tindih pelaksanaan kebijakan dan peran aktif UMKM masih rendah untuk mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh kedua Dinas tersebut.
2. Kinerja bisnis UMKM belum optimal, hal ini ditunjukkan oleh tingkat perkembangan UMKM relatif rendah dan manajerial pengelolaan usaha masih tradisional dan bersifat turun temurun.
3. Efektivitas kelangsungan usaha belum efektif hal ini ditunjukkan dengan faktor pertumbuhan UMKM relatif rendah, faktor penyerapan tenaga kerja (SDM) UMKM masih rendah, faktor produktivitas kerja relatif rendah, dan

letak keberadaannya tidak diketahui karena tidak semua UMKM tersebut menjadi perusahaan formal yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral .Kabupaten Garut.

Berdasarkan uraian fenomena masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan meneliti lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelangsungan usaha UMKM sebagaimana yang terungkap pada fenomena permasalahan tersebut melalui penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Kinerja Bisnis Untuk Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha di Kabupaten Garut.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka yang menjadi pernyataan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa efektivitas kelangsungan usaha belum efektif diduga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM yang belum optimal dan belum maksimalnya kinerja bisnis.

Sehubungan dengan fenomena masalah tersebut maka diajukan pertanyaan penelitian yaitu; ” Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap kinerja bisnis untuk mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha?”.

Selanjutnya pertanyaan penelitian tersebut dapat dirumuskan ke dalam sub-sub pertanyaan terhadap masalah yang ada, sebagai berikutL

1. Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap kinerja bisnis?
2. Adakah pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap efektivitas kelangsungan usaha?
3. Adakah pengaruh kinerja bisnis terhadap efektivitas kelangsungan usaha?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilaksanakannya penelitian ini untuk memperoleh gambaran nyata dan kajian ilmiah mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama fenomena efektivitas kelangsungan usaha UMKM dan faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain yaitu kebijakan yang terkait pembinaan UMKM dan kinerja bisnis UMKM.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data dan informasi dari suatu penelitian ilmiah yang dapat digunakan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan UMKM terhadap Kinerja Bisnis dalam Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha di Kabupaten Garut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat dari aspek teoritis maupun praktis khususnya implementasi di lingkungan objek yang diteliti, dan penelitian ini dapat bernilai guna dengan mengungkapkan beberapa informasi untuk perbaikan pembinaan UMKM serta pihak-pihak yang terkait dengan UMKM.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk pengembangan pengetahuan dalam bidang kajian ilmu administrasi negara dan

kebijakan publik dan dapat dijadikan bahan atau referensi penelitian lebih lanjut bagi kepentingan pengembangan ilmu administrasi negara.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai rekomendasi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Garut dan saran bagi pembuat kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan dan peningkatan kinerja UMKM pada masa yang akan datang.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

Pemberdayaan UMKM sebagai kegiatan ekonomi secara makro diarahkan agar UMKM makin mampu menjadi wadah ekonomi yang handal untuk dapat bersaing dan berkiprah mengisi pembangunan perekonomian di daerah, khususnya di Kabupaten Garut.

UMKM merupakan aktivitas ekonomi dalam produksi barang industri memiliki keunggulan komparatif untuk menciptakan perubahan ekonomi antara lain meliputi (Abduddin, 2006:84):

- a. Produk industri tidak dipengaruhi oleh musim sehingga jarak waktu produksi tidak terkena *time lag* seperti pada pertanian.
- b. Produktivitas sektor industri lebih tinggi daripada sektor pertanian, misalnya perbandingan luas tanah yang dipakai walaupun sama tetapi produktivitasnya berbeda.
- c. Efektivitas tenaga kerja yang memiliki nilai lebih dari sektor pertanian dimana daya serap tenaga kerja relatif tinggi.
- d. Produk sektor pertanian mudah terkena aus (rusak), tidak seperti halnya produk industri pada mayoritasnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini berlandaskan kepada konsep administrasi negara yang menempatkan kebijakan dan pelayanan publik yang merupakan intisari administrasi negara. Dimana salah satu fungsi dari administrasi negara ini adalah adanya kebijakan di bidang perekonomian yang

didalamnya menyangkut masalah manajemen. Manajemen merupakan gerak jiwa dari administrasi, organisasi sebagai anatomi dari administrasi, sedangkan manajemen sebagai psikologinya. Di dalam organisasi berlangsung kegiatan-kegiatan manajemen, karena manajemen juga dibutuhkan untuk semua tipe kegiatan diorganisasikan dan dalam semua tipe organisasi (dalam Iskandar, 2010:250).

Lebih lanjut menurut Demock & Dimock (dalam Iskandar, 2009a:17) bahwa Administrasi Negara adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah dan cara memperolehnya. Oleh sebab itu, ilmu administrasi Negara tidak saja mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga bagaimana melakukannya.

Adapun variabel-variabel penelitian yang akan dikaji dan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut; Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM, Kinerja Bisnis, dan Efektivitas Kelangsungan Usaha.

1. Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM

Ramdhani dan Ramdhani (2017:5) menyimpulkan definisi pelaksanaan kebijakan publik yaitu merupakan tahapan aktivitas/kegiatan/program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan.

Menurut Cleaves (dalam Iskandar, 2017:164), implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan dianggap sebagai proses tindakan administrasi dan

politik, yang diperkuat Silalahi (dalam Iskandar, 2017:165) yang mengemukakan bahwa hal paling penting adalah melaksanakan kebijakan publik itu sendiri dimana pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan.

Iskandar (2017:180) menyimpulkan definisi kebijakan sebagai serangkaian rencana aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh aktor-aktor, langkah demi langkah sehubungan dengan masalah yang dihadapi dan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pengukuran implementasi kebijakan menurut Ramdhani dan Ramdhani (2017:6-7) berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan *Good Governance*, maka pelaksanaan kebijakan dapat diukur/dievaluasi berdasarkan dimensi-dimensi:

- a. Konsistensi, berkaitan dengan sikap atau perilaku pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan, dengan indikator; sesuai prosedur dan sesuai aturan/norma.
- b. Transparansi, berkaitan dengan keterbukaan informasi dan data tentang suatu kebijakan dari segi perumusan sampai pelaksanaannya, dengan indikator; bersifat terbuka, mudah dimengerti, dan mudah diakses oleh umum.
- c. Akuntabilitas, berkaitan dengan isi suatu kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan indikator; dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, dapat

dipertanggungjawabkan secara substantif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

- d. Keadilan, berkaitan dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada dalam suatu kebijakan yang tidak memihak golongan atau pihak tertentu, dengan indikator; tidak diskriminatif dan kualitas pelayanan tidak membedakan SARA.
- e. Partisipatif, berkaitan tanggapan atau respon pelaksana kebijakan untuk menerapkan kebijakan dengan sebaik-baiknya dan menampung aspirasi publik, dengan indikator; memperhatikan aspirasi masyarakat, memperhatikan kebutuhan masyarakat, memperhatikan kepentingan masyarakat, dan memperhatikan harapan masyarakat.

2. Kinerja Bisnis

Keberhasilan bagi sebuah perusahaan untuk membangun kinerja perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kualitas seorang manajer. Peran manajer menjadi salah satu topik utama yang tidak akan pernah habis untuk didiskusikan dan diteliti. Menurut Bititci et al., (2011) keterlibatan manajerial dalam strategi bisnis karena adanya pemahaman untuk meyakinkan bahwa proses strategi bisnis dilaksanakan secara menyeluruh, tidak ada perhatian tergantung apakah manajer/pemilik memiliki keahlian untuk menjalankan proses. Proses strategi bisnis tergantung pada sumber-sumber manajerial/pemilik tertentu.

Produktivitas merupakan salah satu faktor penting dalam kesejahteraan UMKM. Produktivitas merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan suatu [UMKM](#) dalam persaingan dunia usaha yang

semakin ketat. Tingkat produktivitas yang dicapai UMKM merupakan indikator seberapa efisien UMKM tersebut dalam mengkombinasikan sumber daya ekonomisnya saat ini. Anis dkk (2007) menyatakan bahwa “Usaha peningkatan produktivitas harus direncanakan secara baik dan sistematis sehingga berhasil apabila diaplikasikan kedalam suatu perusahaan. Tahap pengukuran, evaluasi, perencanaan dan perbaikan harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing perusahaan.”

Kinerja perusahaan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu perusahaan, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi perusahaan tersebut. Terdapat beberapa kriteria dalam menilai suatu kinerja perusahaan yang disampaikan dalam berbagai literatur. Kriteria tersebut meliputi finansial maupun non finansial. Kriteria-kriteria yang berbeda dalam mengukur kinerja perusahaan tersebut sebenarnya bergantung pada pengukuran kinerja itu sendiri.

Lembaga Administrasi Negara (dalam Iskandar, 2017:126) mendefinisikan kinerja berasal dari kata *performance* yaitu sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja atau penampilan kerja.

Menurut Goyal, et. al (2013:367) mengemukakan pengertian kinerja perusahaan merupakan hasil pelaksanaan suatu usaha baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dengan indikator pencapaian hasil kerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Sedarmayanti (dalam Iskandar, 2017:124) menyatakan bahwa kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah

produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi.

Untuk mengukur kinerja suatu organisasi maka seluruh aktivitas organisasi harus dapat diukur, dimana pengukuran kinerja tersebut tidak terbatas pada *input* (masukan) tetapi ditekankan lebih pada *output* (keluaran), *process* (proses), hasil atau manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) dari program organisasi bagi lingkungan dan masyarakat (dalam Iskandar, 2017:128).

Pengukuran kinerja bisnis menurut Kaplan dan Norton (dalam Veithzal dan Sagala, 2010:257) dengan pendekatan *Balanced Scorecard* yang terdiri dari 4 dimensi, terdiri dari:

- a. Dimensi tata kelola desain produk, yaitu totalitas keistimewaan penampilan dan fungsi produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dengan indikator kesesuaian mutu, tampilan produk, dan daya tahan produk
- b. Dimensi tata kelola keuangan, yaitu penatausahaan dalam hal keuangan perusahaan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dengan indikator: peningkatan pendapatan, peningkatan efisiensi, dan peningkatan keuntungan.
- c. Dimensi tata kelola pelanggan, merupakan pengelolaan keluhan dan kebutuhan pelanggan sebagai bagian pelayanan purna jual (*after sales service*), dengan indikator: peningkatan jumlah konsumen, peningkatan kepuasan konsumen, peningkatan atribut produk, serta peningkatan citra dan reputasi produk.

- d. Dimensi tata kelola teknologi dan proses produksi, merupakan pengelolaan penggunaan teknologi sesuai dengan proses produksi untuk menghasilkan produk berkualitas, dengan indikator: peningkatan proses perubahan, peningkatan proses operasional, dan peningkatan produktivitas.
- e. Dimensi tata kelola pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya manusia sebagai aset organisasi, dengan indikator: peningkatan kompetensi pegawai, peningkatan disiplin pegawai, dan peningkatan motivasi pegawai.
- f. Dimensi tata kelola pemasaran, yaitu proses pemasaran hasil produksi untuk dijual ke pasar, dengan indikator kecepatan penyampaian produk atau jasa, peningkatan penjualan dan perluasan pasar.

3. Efektivitas Kelangsungan Usaha

Konsep efektivitas telah banyak digunakan dalam berbagai konteks, sebagian menyatakan efektivitas dengan keuntungan atau produktivitas dan yang lainnya melihat sebagai kegiatan kerja atau karakter kerja (Steers dalam Iskandar, 2017:218).

Gibson et. al (dalam Iskandar, 2017:213) menyebutkan bahwa terdapat dua pendekatan dalam mengidentifikasi keefektifan suatu organisasi yang terdiri dari kumpulan individu dan kelompok, yaitu: pendekatan menurut tujuan, untuk mengukur efektivitas melalui pencapaian tujuan dengan usaha bersama dan pendekatan menurut teori sistem, menekankan pentingnya adaptasi organisasi terhadap lingkungan eksternal.

Namun yang lebih penting, menurut Steers bahwa sudut pandang efektivitas organisasi akan lebih baik dinilai dari tujuan yang sebenarnya yang ingin dicapai oleh organisasi, dimana efektivitas suatu organisasi merupakan kemampuan organisasi memperoleh dan menggunakan secara efisien sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuannya (dalam Iskandar, 2017:219).

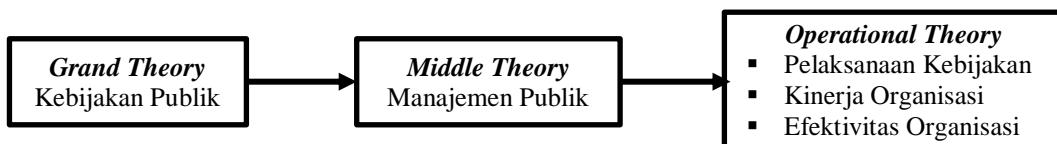
Persepektif yang lebih mendalam terhadap efektivitas organisasi adalah pendekatan konstituensi strategis (*strategic constituencies approach*) yang menyatakan bahwa organisasi dikatakan efektif apabila memenuhi tuntutan dari konstituensi yang terdapat dalam lingkungan organisasi tersebut (Robbins dalam Iskandar, 2017:224).

Dimensi efektivitas organisasi menurut Steers (dalam Iskandar, 2017b:336) terdiri dari:

- a. Dimensi produktivitas dan efisiensi, berkaitan dengan tingkat hasil usaha dan proses penggunaan sumber daya secara efisien, dengan indikator: kuantitas individual, kuantitas kelompok, kuantitas organisasi, tingkat penurunan biaya, dan tingkat pemakaian bahan.
- b. Dimensi laba dan pertumbuhan, berkaitan dengan tingkat perolehan keuntungan atau laba untuk mengembangkan kapasitas usaha, dengan indikator: tingkat penghasilan, tingkat profitabilitas, tingkat penambahan SDM, tingkat penambahan fasilitas, tingkat penambahan modal, dan tingkat inovasi produk.
- c. Dimensi stabilitas usaha, Dimensi ini : pemeliharaan struktur organisasi, pemeliharaan fungsi organisasi, dan pemeliharaan sumber daya,

- d. Dimensi semangat dan kepuasan kerja, berkaitan pemeliharaan dan pengembangan sumber-sumber daya internal organisasi, dengan indikator: perasaan terikat, kebersamaan tujuan, perasaan memiliki, kompensasi, dan penghargaan (*reward*).

Berdasarkan uraian mengenai variabel-variabel penelitian tersebut, maka yang menjadi *grand theory* dalam penelitian ini adalah Administrasi Negara dimana salah satu ruang lingkupnya mengenai kebijakan publik, yang selanjutnya diturunkan menjadi *middle theory* yaitu Manajemen Publik dengan cakupan mengenai pengelolaan organisasi publik. Sedangkan *operational theory* yang digunakan mengenai Pelaksanaan Kebijakan, Kinerja Organisasi dan Efektivitas Organisasi. Untuk lebih jelasnya maka kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambat 1.1
Kerangka Pemikiran

Sehubungan dengan variabel-variabel tersebut di atas, maka peneliti menduga adanya hubungan kausalitas, dimana pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM berpengaruh terhadap kinerja bisnis dalam mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha. Dengan demikian dalam penelitian ini, kinerja bisnis sebagai variabel antara, kemudian efektivitas kelangsungan usaha dijadikan sebagai variabel terikat yang ditentukan atau sangat tergantung kepada sejumlah faktor (variabel bebas) yaitu pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM.

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Juraoda Yunaini Dulman (2011) dengan judul “*Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Untuk Menghadapi ASEAN - China Free Trade Agreement (Studi Kasus Pada Kawasan PIK Pulogadung)*”, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil dan menengah untuk menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung berjalan “Tidak baik”, hal ini disebabkan karena:
 - a. Jumlah industri kecil menengah yang sangat banyak dan ketidakmampuan UKM untuk meningkatkan daya saing.
 - b. Masih adanya keengganan di sebagian pengusaha UKM untuk melakukan perubahan yang bersifat modernisasi dikarenakan oleh hambatan kultural dan tingkat pendidikan terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan mempunyai peranan penting tidak hanya bagi implementor, tapi juga bagi *policy maker*.
 - b. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan sebagai subjek pelaksana kebijakan.

- c. Faktor kepatuhan diperlukan dalam kesuksesan implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien maka para pelaksana harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Temuan penting dalam penelitian ini antara lain:

1. Masih sering ditemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan, yaitu antara komitmen politik untuk mengembangkan kegiatan ekonomi kecil terutama industri kecil menengah dengan langkah nyata di tataran program operasional dari berbagai pihak/otoritas terkait.
2. Belum efektifnya mekanisme pembinaan dikarenakan penerapan pola pembinaan, inkonsistennya dukungan sumberdaya dan lemahnya manajemen.
3. Banyaknya program pemberdayaan, khususnya kegiatan pendidikan dan pelatihan banyak yang kurang memenuhi kebutuhan nyata dari objek binaan di lapangan.

Kedua, penelitian Nitya Pinastika Valeria (2013) dengan judul “*Membangun Kinerja Bisnis Melalui Keunggulan Bersaing pada UKM Manufaktur (Studi Empirik Pada Industri Logam di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten)*”, dengan kesimpulan hasil penelitian yaitu:

1. Hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan antara bersaing yaitu orientasi kewirausahaan, adaptabilitas lingkungan, dan kreativitas inovasi terhadap kinerja bisnis.
2. Dari ketiga faktor tersebut, faktor orientasi kewirausahaan memiliki pengaruh paling kuat terhadap keunggulan bersaing dibandingkan dengan adaptabilitas lingkungan dan kreativitas inovasi.

Temuan penting dari penelitian ini antara lain:

1. Selain itu penelitian ini juga menemukan adanya hubungan antara orientasi kewirausahaan, kreativitas inovasi, dan keunggulan bersaing terhadap kinerja bisnis.
2. Para pengrajin logam masih mengabaikan pentingnya keunggulan bersaing untuk kepentingan perusahaan dimasa yang akan datang.

Ketiga, penelitian Kania Suryaningrum, dkk (2015) dengan judul “*Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Suatu Studi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Manado)*”, dengan kesimpulan hasil penelitian yaitu:

1. Dari sisi pemasaran dari usaha pelaku UMKM sampai saat ini cukup signifikan mengingat pangsa pasar yang ada cukup menunjang untuk peningkatan usaha.
2. Pelaksanaan program pengembangan UMKM belum efektif karena jumlah sumberdaya manusia khususnya bidang UMKM yang masih minim.
3. Dari segi pemberian pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM tidak hanya memberikan pelatihan tapi sekaligus dengan mempraktekannya dengan mengundang orang yang sudah ahli dalam berwirausaha.

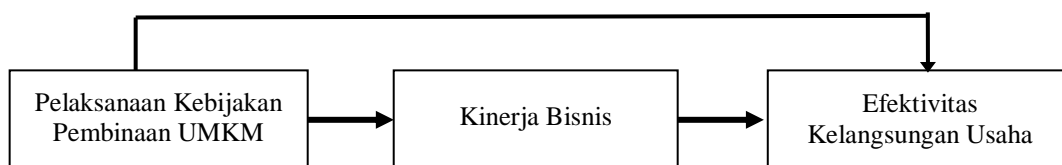
Temuan penting dari penelitian ini antara lain:

1. Pentingnya kerja sama yang baik dan kompak sesama rekan kerja agar tercapainya tujuan pelaksanaan program pembinaan UMKM.
2. Diperlukan pembenahan dan pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) yang akan duduk dalam Dinas Koperasi dan UMKM, serta menambah lagi pegawai yang mempunyai pengetahuan yang benar-benar menguasai bidangnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, anggapan dasar dari penelitian ini:

1. Efektivitas kelangsungan usaha akan baik apabila kinerja bisnis dibina secara optimal.
2. Kinerja bisnis akan maksimal apabila pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM dilaksanakan dengan optimal.
3. Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM yang dilakukan dengan optimal akan berdampak pada meningkatnya kinerja bisnis dan efektivitas kelangsungan usaha UMKM.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai keterkaitan diantara variabel-variabel penelitian yang akan dikaji dalam pembahasan, maka kerangka pemikiran ini dirumuskan dalam suatu model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.2
Model Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang tergambar pada model penelitian berkaitan dengan hubungan antar konsep, maka dapat dirumuskan hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap kinerja bisnis untuk mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha.

H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap kinerja bisnis untuk mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha.

Selanjutnya dari rumusan hipotesis utama yang akan diajukan dalam penelitian ini, dapat dijabarkan dalam sub-sub hipotesis sebagai berikut:

Sub Hipotesis 1:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap kinerja bisnis.

H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap kinerja bisnis.

Sub Hipotesis 2:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap efektivitas kelangsungan usaha.

H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap efektivitas kelangsungan usaha.

Sub Hipotesis 3:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh kinerja bisnis terhadap efektivitas kelangsungan usaha.

H_1 : Terdapat pengaruh kinerja bisnis terhadap efektivitas kelangsungan usaha.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Teori sebagai suatu unsur penelitian mempunyai peranan yang sangat besar, sebab dengan menggunakan unsur ilmu maka suatu penelitian dapat menjelaskan atau menerangkan tentang fenomena sosial maupun fenomena alami yang menjadi pusat penelitian.

Menurut Iskandar (2017c:56), teori adalah proposisi-proposisi yang saling berhubungan, beberapa diantaranya dapat dibuktikan secara empirik. Jadi suatu teori memiliki tiga unsur utama, yaitu:

- a. Terdiri dari serangkaian proposisi
- b. Proposisi-proposisi tersebut saling berhubungan
- c. Beberapa diantaranya dapat dibuktikan secara empirik.

Teori merupakan alat yang terpenting dari ilmu pengetahuan. Tanpa teori maka hanya akan ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan. Menurut Iskandar (2017c: 318) menyatakan bahwa fungsi suatu teori mencakup :

- a. Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan
- b. Memberikan kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi fakta – fakta yang dikumpulkan dalam penelitian
- c. Menjelaskan dan menerangkan tentang gejala-gejala
- d. Memberikan ramalan terhadap gejala-gejala lain yang akan terjadi
- e. Mengisi lowongan-lowongan ilmu pengetahuan tentang gejala-gejala yang tengah, telah atau akan terjadi.

Bab tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk membahas secara teoritis permasalahan yang menjadi pusat penelitian, menguraikan secara berurutan

hubungan antara proposisi-proposisi, konsep-konsep, dan asumsi-asumsi yang melandasi penelitian tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kinerja bisnis dalam mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha di Kabupaten Garut.

Pembahasan dalam bab tinjauan pustaka ini diuraikan menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Tinjauan Tentang Pembangunan Ekonomi dan UMKM
2. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu
3. Relevansi Masalah Penelitian dengan Ilmu Administrasi Negara
4. Tinjauan Teoritis Tentang Variabel-Variabel Penelitian
 - a. Pelaksanaan Kebijakan Publik dan Kebijakan Pembinaan UMKM
 - b. Kinerja Bisnis
 - c. Efektivitas Kelangsungan Usaha
5. Hubungan Konseptual Antar Variabel Penelitian.

2.1 Tinjauan Teoritis Tentang Pembangunan Ekonomi dan UMKM

Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan kombinasi barang dan jasa. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani *oikos* yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan *nomos* atau “peraturan, aturan, hukum” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga”. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut sebagai ilmu ekonomi.

Ilmu ekonomi menurut Samuelson (dalam Sukirno, 2006:9) sebagai berikut:

Ilmu Ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu atau masyarakat dalam membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan masa yang akan datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat.

Teori ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Samuelson (dalam Sukirno, 2006:10) adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang wujudnya dalam kegiatan ekonomi, dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Ilmu ekonomi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang pertama harus diperhatikan adalah tujuan-tujuan dari kebijakan ekonomi. Dalam perekonomian tujuan yang akan dicapai adalah: (1) mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat; (2) menciptakan kestabilan harga; (3) mengatasi masalah pengangguran dan (4) mewujudkan distribusi pendapatan yang merata.

Pada dasarnya pemerintahan selalu berusaha dan mempunyai tujuan mengembangkan perekonomiannya sedemikian rupa agar taraf hidup bangsa bersangkutan meningkat. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi menurut Sukirno (2006:36) adalah sebagai berikut:

1. Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usahawan. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
2. Pemerintah adalah badan-badan pemerintah yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan itu termasuk berbagai departemen

pemerintahan, badan yang mengatur penanaman modal, perbankan, parlemen, pemerintahan daerah, angkatan bersenjata dan sebagainya.

Dalam analisis ekonomi perlu dibedakan arti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kedua konsep ini mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu ekonomi baik produksi barang atau jasa dari sektor industri, infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan modal dan seterusnya dari suatu negara dengan ukuran tingkat pertumbuhan riil yang dicapai. Sedangkan pembangunan ekonomi menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui prosentasi penambahan pendapatan nasional (Sukirno, 2006 : 423). Khususnya di negara berkembang, pembangunan ekonomi juga mengamati aspek perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi. Perbedaan penting lainnya dalam pembangunan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan perkapita.

Pertumbuhan ekonomi banyak terkait dengan berbagai faktor seperti kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, tersedianya usahawan yang gigih, kemampuan mengembangkan teknologi, dan lain sebagainya.

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambahakan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksinya. Disamping itu dampak pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. Hal ini dapat mendorong peningkatan produktivitas yang

berdampak pada pertambahan jumlah produksi daripada penduduk. Maka luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara bergantung kepada jumlah pengusaha dalam ekonomi. Apabila tersedia pengusaha dalam sejumlah penduduk tertentu lebih banyak, maka lebih banyak pula kegiatan ekonomi yang dijalankan.

Menurut Schumpeter (Sukirno, 2006 : 432) menjelaskan tentang pentingnya peran pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi; memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisiensi cara memproduksi dalam mengatasi suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke wilayah pemasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi aktivitas perusahaan, dan dampaknya akan memerlukan investasi baru. Investasi ini akan meningkatkan tingkat ekonomi negara atau daerah, sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat akan bertambah tinggi sekaligus mendorong perusahaan-perusahaan untuk lebih banyak berproduksi dan melakukan penanaman modal baru. Upaya-upaya seperti inilah yang diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan menurut Soediyono (2006:172) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari dua sisi, yakni segi penawaran dan segi permintaan. Adapun segi penawaran antara lain; apabila pemerintah menginginkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya, maka kapasitas produksi nasional perekonomiannya perlu diperbesar. Untuk

memperbesar kapasitas produksi nasional, cadangan kapital nasional perlu diperbesar pula. Agar memperbesar cadangan kapital nasional dapat meningkat, diperlukan investasi yang besar dan jauh melebihi besarnya penyusutan. Dari segi permintaan maka suatu pertumbuhan ekonomi dapat terwujud dengan adanya kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Oleh karena itu menuju pembangunan ekonomi maupun terciptanya pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah apalagi disertai gejala-gejala yang menimbulkan hambatan pada pembangunan ekonomi sering terjadi, seperti lingkaran perangkap kemiskinan (*visicous circle*), dampak demonstrasi (*demonstration effects*), sistem perekonomian yang bersifat dualistik yang sering terjadi di negara berkembang (Soekirno, 2006:212).

Banyak faktor yang menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, antara lain seperti; kekurangan modal, pengetahuan, infrastruktur, dan aplikasi teknologi modern dalam kegiatan perekonomian sehingga menyebabkan tingkat produktivitasnya sangat rendah yang mengakibatkan tingkat pendapatan masyarakat tidak berubah.

Seperti yang diungkapkan Tambunan (2009:73) menyatakan rintangan-rintangan yang umum terjadi yaitu; keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses informasi mengenai peluang pasar, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat

prosedur administratif dan birokrasi yang kompleks, peraturan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak jelas atau tidak tentu arahnya.

Berhubungan dengan keterbatasan modal dan investasi bagi perusahaan-perusahaan sebagai modal kerja aktivitas produksinya tentu menjadi pertimbangan yang penting sehingga perusahaan dapat bertahan hidup atau lebih berkembang di kemudian hari. Mengenai permasalahan permodalan yang merupakan masalah umum setiap perusahaan yang baru ataupun sedang mengembangkan dirinya, dengan adanya kebijakan dari pemerintah tentang pemberian bantuan modal berupa Kredit Usaha Kecil (KUK)

Setiap waktu masyarakat akan menghadapi berbagai masalah ekonomi, hal ini timbul sebagai akibat dari masalah kelangkaan. Dalam setiap masyarakat akan timbul ketidakseimbangan antara kehendak manusia yang tidak terbatas jumlahnya dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang jumlahnya terbatas. Ketidakseimbangan ini menimbulkan masalah untuk membuat pilihan.

2.2 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Budi Haryanto, Djumadi, dan Aji Ratna Kusuma (2014) tentang “*Pengaruh Pelaksanaan Pembinaan KUMKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan (eJournal Administrative Reform Volume 2 Nomor 3 Tahun 2014, pp. 1929 – 1940)*”.

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa KUMKM masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu diantaranya adalah masih kurang kondusifnya iklim usaha, yang mencakup : 1) aspek legalitas badan usaha dan ketidakjelasan prosedur perijinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; 2) praktek bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; 3) ketidakpastian lokasi usaha; dan 4) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan KUMKM. Hal ini misalnya tercermin dari masih terdapat daerah yang memandang KUMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan menggunakan pungutan-pungutan baru yang tidak perlu sehingga biaya usaha KUMKM meningkat. Oleh karena itu aspek kelembagaan masih menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam memperoleh daya jangkau hasil dan manfaat yang semaksimal mungkin mengingat besarnya jumlah, keanekaragaman usaha dan tersebaranya KUMKM.

Dalam kesimpulannya diutarakan bahwa:

1. Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas perindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan yang berupa program Penciptaan iklim usaha KUMKM, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi KUMKM, dan pemberdayaan Usaha skala Mikro mempunyai pengaruh terhadap perkembangan Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah, sehingga dengan semakin membaiknya pelaksanaan ataupun realisasi dari program-program tersebut, maka akan semakin meningkatnya perkembangan KUMKM di kabupaten Nunukan.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penciptaan iklim usaha bagi UMKM lebih dominan dibandingkan dengan variabel yang lain yaitu pengembangan kewirausahaan, keunggulan kompetitif, dan pemberdayaan UMKM.

Selanjutnya dalam penelitian tersebut penulis memberikan saran-saran terhadap perkembangan KUMKM, yaitu hendaknya Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan untuk lebih meningkatkan program dan kegiatan pelayanan klasifikasi usaha bagi UMKM dan koperasi dengan sistem penilaian terhadap koperasi dan UMKM. Serta bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambah variabel-variabel lain yang mendukung perkembangan KUMKM, seperti peran lembaga keuangan mikro, peranan LSM dalam mengawasi pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM dan sebagainya.

Kedua, penelitian lain dari I Putu Lanang Eka Sudiarta, I Ketut Kirya dan I Wayan Cipta (2014) tentang “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangli (e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Volume 2 Tahun 2014)*”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih ada kendala bagi UMKM di Kabupaten Bangli dalam meningkatkan kinerjanya yaitu faktor akses permodalan, teknologi, pemasaran dan kemampuan berwirausaha. Meskipun berbagai dukungan telah diberikan oleh pemerintah terkait, tapi faktanya UMKM di Kabupaten Bangli masih mengalami kendala-kendala dalam menjalankan usahanya.

Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM di Kabupaten Bangli adalah (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal.

2. Faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja UMKM di Kabupaten Bangli adalah faktor internal.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian tersebut, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja UMKM, pihak pemerintah perlu memberikan dukungan kepada UMKM terutama untuk mempermudah akses permodalan. Akses ke sumber-sumber permodalan UMKM masih terbatas, terutama ke lembaga keuangan formal seperti bank. Masalah ini muncul pada pihak UMKM karena keterbatasan pengetahuan atau kemampuan dalam mencukupi kebutuhan prosedur/persyaratan perbankan.
2. Bagi pengusaha UMKM agar lebih memperhatikan pentingnya pembukuan atau pencatatan keuangan. Penyusunan laporan keuangan bukan hanya untuk kemudahan memperoleh kredit dari kreditur, tetapi untuk pengendalian aset, kewajiban dan modal serta perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya-biaya.
3. UMKM yang terkendala masalah sumber daya manusia yang minim pengetahuannya tentang penggunaan teknologi informasi, perlu memperbaiki kualitas sumber daya manusianya (SDM) agar dapat menggunakan teknologi informasi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lila Bismala (2016) tentang “*Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah (Jurnal Entrepreneur dan Entrepreneurship Volume 5 Nomor 1, Maret 2016)*”. Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa UMKM memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi besar dan memiliki daya saing, jika saja memiliki manajemen yang solid.

Dengan demikian diperlukan sebuah model manajemen UMKM yang dapat dijadikan pedoman oleh UMKM dalam mengelola usahanya.

Peneliti mengambil kesimpulan dari penelitiannya sebagai berikut:

1. UMKM sebagai salah satu bentuk perekonomian rakyat yang memiliki peran besar dalam perekonomian negara, memerlukan model manajemen usaha. Model manajemen usaha ini mengadopsi dari manajemen perusahaan, yang bekerja pada aspek manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran.
2. Dalam aplikasi manajemen usaha tersebut, dikembangkan kriteria pengukuran kinerja yang dapat diadopsi dan diaplikasikan secara praktis.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian tersebut, peneliti memberikan saran yaitu bagi pelaku UMKM harus mampu melakukan analisis SWOT atas usahanya sehingga mampu menilai keadaan sekarang, baik terhadap pesaing, maupun perkembangan usaha dan evaluasi usahanya.

Untuk melihat penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan hasil penelitian original, dibawah ini ditampilkan tabel persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Kajian dengan Penelitian Terdahulu

	Penelitian Terdahulu 1	Penelitian Terdahulu 2	Penelitian Terdahulu 3	Penelitian Peneliti
Peneliti/ Tahun	Budi Haryanto, Djumadi, dan Aji Ratna Kusuma (2014)	I Putu Lanang Eka Sudiarta, I Ketut Kirya, I Wayan Cipta (2014)	Lila Bismala (2016)	Irwan Sutiawan (2018)
Judul	Pengaruh Pelaksanaan Pembinaan KUMKM terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kab.Nunukan	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bangli	Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah	Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap Kinerja Bisnis untuk Mewujudkan Efektivitas Kelangusgan Usaha
Lokasi	74 Koperasi dan UMKM di Kabupaten Nunukan	96 UMKM di Kabupaten Bangli	Pelaku UMKM di wilayah Sumatera Utara	96 UMKM di wilayah Kab. Garut
Masalah Penelitian	Adanya faktor penghambat perkembangan Koperasi dan UMKM yaitu: akses permodalan, pasar teknologi dan informasi, rendahnya kualitas SDM, dan belum optimalnya fungsi lembaga pemberdayaan KUMKM	Masih ada kendala bagi UMKM di Kabupaten Bangli dalam meningkatkan kinerjanya yaitu faktor akses permodalan, teknologi, pemasaran dan kemampuan berwirausaha.	Lemahnya manajemen UMKM dalam hal keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan	Kelemahan pada pembinaan dan kinerja bisnis berdampak pada efektivitas kelangusgan UMKM
Variabel Penelitian	Variabel X1: Penciptaan Iklim Usaha Variabel X2: Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Variabel X3: Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Variabel Y: Perkembangan KUMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Internal, terdiri dari: akses permodalan, kemampuan berwirausaha, SDM, pemasaran, rencana bisnis, dan pengetahuan keuangan • Faktor Eksternal, terdiri dari: dukungan pemerintah, legalitas, jaringan sosial, akses informasi, teknologi, dan pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Internal UMKM terdiri dari: kekuatan dan kelemahan • Faktor Eksternal UMKM terdiri dari: peluang dan tantangan 	Variabel X: Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM Variabel Y: Kinerja Bisnis Variabel Z: Efektivitas Kelangusgan Usaha
Metode Penelitian	Metode Eksplanatori dengan teknik Survey	Metode Eksploratif dengan teknik Survey	Metode Eksploratif dan Deskriptif dengan teknik Survey	Metode Ekplanasi dengan teknik Evaluasi

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Fokus penelitian yaitu kajian Ilmu Administrasi Negara, yaitu pelaksanaan kebijakan, kinerja bisnis dan efektivitas usaha.
2. Lokus penelitian dilakukan pada pelaku UMKM yang menjadi anggota Asosiasi Produk Unggulan Kabupaten Garut.
3. Referensi teori yang digunakan untuk variabel penelitian merupakan teori yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Kinerja Organisasi, dan Efektivitas Organisasi, seperti teori pelaksanaan kebijakan dari Dye, teori kinerja organisasi dari Stoner, dan teori efektivitas dari Whitemore.
4. Metode penelitian termasuk didalamnya variabel-variabel penelitian yang digunakan yaitu metode ekplanasi dengan teknik evaluasi, sedangkan variabel penelitiannya terdapat perbedaan pada variabel bebas yang mengkaji tentang kebijakan pembinaan UMKM dan variabel terikat yang mengkaji dengan tentang efektivitas kelangsungan usaha.

2.3 Relevansi Masalah Penelitian Dengan Ilmu Adminitrasi Negara

Permasalahan pokok yang menjadi perhatian pada penelitian ini dalam telaah ilmu Adimistrasi Negara sesungguhnya mempunyai kedudukan dan relevansi signifikan dengan administrasi negara dan kebijakan publik. Karena permasalahan tersebut mengkaji kebijakan yang dibuat pemerintah dan merupakan salah satu kajian dari adminstrasi negara.

Sebelum membahas lebih lanjut kedudukan dan relevansi masalah pokok dengan ilmu Administrasi Negara, terlebih dahulu akan diuraikan pembahasan teoritis tentang ilmu Administrasi Negara itu sendiri sehingga dapat terlihat benang merah keterkaitannya dengan masalah pokok penelitian.

Sebagaimana harapan seluruh masyarakat bahwa pergantian pemerintahan diharapkan akan membawa pembaharuan sistem administrasi negara yang pesat dan lebih baik. Pembaharuan yang diharapkan tersebut sejalan dengan program pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang berencana. Administrasi Negara diharapkan pula dapat mendukung rencana atau program dan pelaksanaan rencana (*plan and plan implementation*), karena keberhasilan pembangunan berencana tergantung pada kapasitas struktur administrasi negara.

Perubahan pada era globalisasi saat ini, menuntut adanya sistem administrasi negara yang semakin efektif dan efisien, yang ditandai dengan adanya keterbukaan, kreativitas, kecepatan, keterkaitan dan kompetisi bebas. Kondisi ini untuk mengantarkan terciptanya sistem pemerintahan yang bersifat *Good Governance*, sebagaimana dikemukakan Supriatna (2004:9) bahwa karakteristik dari *Good Governance* yaitu:

1. Legitimasi pemerintah diakui dan diterima secara umum oleh rakyatnya.
2. Komitmen yang kuat dari rakyat untuk membentuk pemerintahan yang efektif.
3. Pemerintahan yang mampu menjalankan fungsinya.
4. Masyarakat memiliki kebebasan individu dan berserikat untuk berpartisipasi.
5. Kerangka landasan hukum, etika dan moral terbentuk dan terpelihara dengan jelas dan lugas.
6. Pemerintah memiliki akuntabilitas yang tinggi serta transparan.
7. Pemerintahan selalu menyediakan informasi yang akurat.

Pembangunan administrasi pada dasarnya adalah pembangunan prinsip-prinsip Administrasi Negara dengan memperhatikan konteks administrasi dan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan melaksanakan dari administrasi negara tersebut. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa administrasi negara dalam tingkat operasionalnya, memiliki peranan yang lebih besar, karena tidak hanya terlibat dalam perumusan kebijakan, akan tetapi terlibat pula dalam tingkat implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Suradinata (2006:1-2) bahwa :

“Administrasi negara atau *public administration* dapat diartikan sebagai segala kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan negara yang telah ditentukan; yaitu kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara dan tingkat pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi dalam suatu negara, oleh karena itu administrasi negara mencakup berbagai aspek kegiatan termasuk proses suatu species dalam lingkungan pemerintahan yang mencakup makna sebagai kegiatan manusia yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya”.

Demikian pula Pfiffner dan Prestus dalam Iskandar (2017d:12) menjelaskan bahwa :

“In sum, Public Administration is a aprocess concered with carrying out public policies, and compassing innumerable skill and techniques with give order and purpose to the efforts of large number of people (Secara menyeluruh, Administrasi Negara adalah proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahannya kecakapan-kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberi arah dan maksud terhadap usaha-usaha sejumlah orang)”.

Oleh karena itu, administrasi negara sebagai kegiatan negara sangat berpengaruh bukan saja terhadap perencanaan, melainkan pula pada tingkat implementasinya, agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini instansi-instansi yang terkait sebagai

pelaksana-pelaksana kebijakan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi agar penggunaan sumber daya berlangsung secara optimal di sektor publik, selain itu dituntut pula keahlian administratif sehingga dapat diwujudkan sumber daya manusia yang profesional dalam melaksanakan tugas.

Pendekatan administrasi negara sebagaimana diuraikan di atas, sangat berhubungan dengan peranan aparatur pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui aktivitas penyediaan kebutuhan publik dan aktivitas pemberian pelayanan, seperti misalnya dalam bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya.

Istilah Administrasi Negara merupakan salah satu bagian dari Ilmu Administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama berkaitan dengan perumusan kebijakan negara. Oleh karena itu administrasi negara sangat berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan. Hal ini merupakan salah satu fungsi dari Administrasi Negara. Kasim (dalam Iskandar, 2017d:48) mengemukakan bahwa administrasi negara berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan.

Peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam administrasi negara berkenaan dengan perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut telah mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik, yang ruang lingkupnya mulai mencakup analisis dan perumusan kebijakan (*policy analysis and formulation*), pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan, pengawasan dan penilaian hasil pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut White (dalam Iskandar, 2017a:53) menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara (*public administration consist of all those operations having for their purpose the fulfillment and enforcement of public policy*).

Disamping itu pengaruh perubahan tersebut ditandai oleh pergeseran nilai (*shift of value*), keterhubungan (*interconnected*) dan ketidakpastian (*unprediction*) dalam berbagai kehidupan, untuk itu diperlukan kearifan dalam menentukan strategi dan kebijakan. Dalam hal ini peranan administrasi sangat penting, karena kaitannya sangat erat dengan perumusan berbagai kebijakan negara serta implementasinya.

Persoalan administrasi negara merupakan suatu sistem untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat yang senantiasa berkembang, sehingga ketidakpuasan masyarakat dapat diperkecil dan dipersempit jaraknya. Jika persoalan tersebut dapat dipecahkan dengan baik maka tujuan yang telah digariskan dapat tercapai. Siagian (2005 : 8) menyatakan bahwa :

Administrasi negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Dalam menyongsong perubahan di era globalisasi ini, dituntut adanya sistem administrasi yang semakin efektif dan efisien, yang ditandai dengan adanya keterbukaan, kreativitas, kecepatan, keterkaitan dan kompetisi bebas. Kondisi ini untuk mengantarkan terciptanya sistem pemerintahan *Good Governance*.

Uraian di atas, yang dipertegas pandangan ahli menunjukkan bahwa administrasi negara dalam tingkat operasional oleh birokrasi pemerintah, memiliki peranan yang lebih besar, karena banyak terlibat tidak hanya dalam perumusan

kebijakan, akan tetapi terlibat pula dalam tingkat implementasi dan evaluasi kebijakan, termasuk kebijakan pembinaan kepegawaian, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Administrasi negara punya peranan penting dalam perumusan kebijakan negara. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu (Thoha, 2005:8).

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka pelayanan menjadi inti dalam administrasi negara, yang merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh elemen pemerintahan untuk mencapai kepuasan publik. Pendapat para ahli tersebut diperoleh gambaran bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang merupakan salah satu tugas administrasi negara dalam menjalankan fungsinya.

Berkaitan dengan masalah penelitian yang diuraikan pada bab terdahulu, penelitian difokuskan pada pelayanan organisasi publik yang berperan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian didasarkan pada fenomena bahwa efektivitas kelangsungan usaha dari UMKM di Kabupaten Garut dapat dikatakan relatif rendah.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pokok dalam penelitian ini mempunyai kedudukan dan relevansi dengan administrasi negara. Penerapan dari administrasi dan secara umum yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), pengawasan (*controlling*) dan kegiatan lainnya dalam mencapai tujuan. Wilayah

kerja atau bidang telaah atau ruang lingkup administrasi negara itu mencakup keseluruhan aktivitas dalam proses penataan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Proses penataan sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan atau pendidikan, terutama dalam peningkatan kemampuan profesional, sehingga mempunyai kinerja yang tinggi

Berdasarkan definisi-definisi dan pendapat-pendapat diatas memberikan gambaran secara umum bahwa Ilmu Administrasi Negara merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyelenggaraan negara. Adapun proses kebijakan pembinaan UMKM merupakan suatu tahapan penting dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis dapat dan efektivitas kelangsungan usaha, maka adanya kebijakan pembinaan UMKM merupakan urusan negara yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Dengan demikian kebijakan pembinaan UMKM berkaitan erat dengan Ilmu Administrasi Negara.

2.4 Tinjauan Teoritis Tentang Variabel-Variabel Penelitian

2.4.1 Tinjauan Teoritis Tentang Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM

Van Meter dan Van Horn dalam Witaradya (www.wordpress.com) mendefinisikan pelaksanaan kebijakan publik sebagai:

”Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka

melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus dilaksanakan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Witaradya, www.wordpress.com).

Tahap pelaksanaan kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap pelaksanaan kebijakan terjadi jika setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Tachjan (dalam Iskandar, 2017:25) menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Lebih lanjut, Tachjan (dalam Iskandar, 2017:26) menjelaskan tentang unsur-unsur dari pelaksanaan kebijakan yang mutlak harus ada, yaitu; 1) unsur pelaksana, 2) adanya program yang dilaksanakan, dan 3) target grup atau

kelompok sasaran. Menurut Dimock & Dimock (dalam Iskandar, 2013:28), unsur pelaksana adalah implementor kebijakan yang diterangkan sebagai berikut: “Pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.”

Pihak yang terlibat penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan Ripley dan Franklin (dalam Iskandar, 2017:27) yaitu unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam pelaksanaan kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan.

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Terry (dalam Iskandar, 2017:31) bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Siagian (*dalam Witaradya, www.wordpress.com*), program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sasaran yang dikehendaki;
2. Jangka waktu yang diperlukan menyelesaikan pekerjaan tertentu;
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya;
4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan;
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan ditinjau dari jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Selanjutnya Grindle (dalam Witaradya, www.wordpress.com) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan: pembuat keputusan (*site of decision making*), pelaksana program (*program implementers*) serta sumberdaya yang tersedia (*resources committed*). Unsur terakhir dari pelaksanaan kebijakan publik adalah *target group* yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

Implementasi kebijakan memerlukan perangkat yang digunakan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan suatu program dengan kebijakan publik yang menjadi acuannya (Kusumanegara, 2010:108). Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2012: 147) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersarna-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Iskandar (2017:180) menyimpulkan definisi kebijakan sebagai serangkaian rencana aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh aktor-aktor, langkah demi langkah sehubungan dengan masalah yang dihadapi dan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.

Dari kumpulan faktor tersebut, bisa ditarik benang merah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. tersebut adalah (Sugandi, 2011: 90-91):

1. Isi atau *content* kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dari sisi *coment* setidaknya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumber daya, baik manusia maupun finansial yang baik.
2. Implementor dan kelompok target. Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (*implementatory*) dan kelompok target (*target groups*). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (*policy makers*), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan dari pada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian besar dari populasi juga akan lebih mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan.
3. Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan *Good Governance*, menurut Ramdhani dan Ramdhani (2017:6-8) bahwa pelaksanaan kebijakan dapat diukur berdasarkan dimensi-dimensi: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsistensi

Pelaksanaan kebijakan akan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku.

Terdapat dua indikator untuk mengukur dimensi konsistensi yaitu:

- a. Sesuai prosedur, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Pelaksanaan kebijakan pembinaan kepada UMKM sudah sesuai prosedur, dan 2) Penerapan kebijakan pembinaan UMKM dilengkapi dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sesuai aturan/norma, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kebijakan pembinaan UMKM sesuai dengan aturan/norma yang berlaku, dan 2) Pelaksanaan kebijakan pembinaan bagi UMKM memiliki landasan aturan/norma yang jelas

2. Transparansi.

Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti. Diukur oleh tiga indikator yaitu:

- a. Bersifat terbuka, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Informasi kebijakan pembinaan UMKM bersifat terbuka bagi semua UMKM, dan 2) Penyampaian informasi kebijakan pembinaan UMKM sudah dilaksanakan dengan baik sehingga mudah memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut.
 - b. Mudah dimengerti, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Kebijakan pembinaan UMKM sudah disertai petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga mudah dimengerti, dan 2) Informasi kebijakan pembinaan UMKM sudah memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi dari kebijakan.
 - c. Dapat diakses oleh umum, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Pelayanan informasi tentang kebijakan pembinaan UMKM sudah dilaksanakan dengan baik, dan 2) Informasi kebijakan pembinaan UMKM dapat diakses oleh umum dengan mudah.
3. Akuntabilitas

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kebijakan tersebut tidak menyimpang dari jalurnya. Diukur dengan tiga indikator, yaitu:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM sudah sesuai dengan tata kelola administrasi yang dipersyaratkan, dan 2) Materi-materi dalam kebijakan pembinaan UMKM dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

- b. Dapat dipertanggungjawabkan secara substantif, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Informasi yang terkandung dalam kebijakan pembinaan UMKM sudah sesuai dengan kebutuhan UMKM, dan 2) Secara substantif kebijakan pembinaan UMKM dapat diterapkan pada berbagai karakteristik UMKM.
- c. Sesuai peraturan perundang-undangan, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Isi kebijakan pembinaan UMKM sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan 2) Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM memiliki dasar hukum yang jelas.

4. Keadilan

Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keadilan dalam kebijakan publik diwujudkan pada aktivitas pelayanan yang tidak diskriminatif. Pelaksanaan kebijakan publik tidak membedakan kualitas pelayanan pada kelompok sasaran berdasarkan pertimbangan suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. Dimensi diukur oleh dua indikator yaitu:

- a. Tidak diskriminatif, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Kebijakan pembinaan bersifat tidak diskriminatif kepada semua UMKM, dan 2) Setiap UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pembinaan dari instansi terkait.

- b. Kualitas pelayanan tidak membedakan SARA, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Pelayanan pada pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM dilakukan tidak membedakan SARA, dan 2) Fasilitas materi pembinaan UMKM diberikan tanpa memandang salah satu faktor SARA.

5. Partisipatif

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat disamping menopang pencetapan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan berdampak pada proses evaluasi kinerja pemerintah dan mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat adalah kunci sukses pelaksanaan kebijakan publik karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Dimeni ini diukur oleh empat indikator yaitu:

- a. Memperhatikan aspirasi mayarakat, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Materi pembinaan UMKM berdasarkan kebutuhan yang berasal dari aspirasi masyarakat, dan 2) Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM disesuaikan dengan aspirasi masyarakat.
- b. Memperhatikan kebutuhan masyarakat, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Kebijakan pembinaan untuk meningkatkan kinerja UMKM berlandaskan kebutuhan masyarakat, dan 2) Kebijakan pembinaan UMKM diterapkan karena adanya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperhatikan kepentingan masyarakat, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Kajian materi pembinaan UMKM dengan memperhatikan

kepentingan masyarakat, dan 2) Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM disesuaikan dengan kepentingan masyarakat.

- d. Memperhatikan harapan masyarakat, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Harapan masyarakat dengan adanya kebijakan pembinaan menjadikan UMKM yang kuat dan mandiri, dan 2) Dengan adanya kebijakan pembinaan merupakan perwujudan harapan masyarakat agar UMKM berubah kearah yang lebih baik.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas memberikan gambaran secara umum bahwa Ilmu Administrasi Negara merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyelenggaraan negara. Adapun proses kebijakan pembinaan UMKM merupakan suatu tahapan penting dalam pelaksanaan kebijakan publik yang bertujuan membantu dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang, sehingga dengan adanya kebijakan pembinaan UMKM merupakan urusan negara yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Dengan demikian kebijakan pembinaan UMKM berkaitan erat dengan Ilmu Administrasi Negara.

2.4.2 Tinjauan Teoritis Tentang Variabel Kinerja Bisnis

Istilah kinerja telah populer digunakan, sehingga definisi kinerja masih beragam yang disesuaikan dengan bidang ilmu tertentu. Namun demikian, padanan kata dalam bahasa Inggris untuk istilah kinerja yaitu "*performance*". Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 2007).

Kinerja (*performance*) juga dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau "*degree of accomplishment*" atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi (Rue & Byars, 2003). Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Kinerja seorang karyawan akan baik bila dia mempunyai keahlian (*skill*) yang tinggi, bersedia bekerja karena digaji atau diberi upah sesuai dengan perjanjian, mempunyai harapan (*expectation*) masa depan lebih baik.

Suatu lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga yang dinamakan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk: organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang (*group of human being*) yang berperan aktif sebagai pelaku (*actors*) dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Tercapainya tujuan lembaga atau perusahaan hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang terdapat pada organisasi lembaga tersebut.

Menurut Bernardin, H.J. and Russel, J.E.A. (2013), kinerja adalah "*Performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a time period*". Kinerja cenderung dilihat sebagai hasil suatu proses pekerjaan yang pengukurannya dilakukan pada kurun waktu tertentu.

Dessler dalam Suharto dan Devie (2013:6) berpendapat: kinerja adalah prestasi aktual dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari aktivitas dalam

organisasi. Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya.

Menurut Irawan (2009:11), bahwa kinerja adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur. Jika kita mengenal tiga macam tujuan, yaitu tujuan organisasi, tujuan unit, dan tujuan pegawai, maka kita juga mengenal tiga macam kinerja, yaitu kinerja organisasi, kinerja unit, dan kinerja pegawai.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja. Dengan demikian bahwa kinerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja perorangan (*individual performance*) dengan kinerja lembaga (*institutional performance*) atau kinerja perusahaan (*corporate performance*) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan (*individual performance*) baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan (*corporate performance*) juga baik

Disamping itu, Salim dan Woodward (2006) dalam Nasucha (2004:08) melihat kinerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efisiensi, efektifitas dan persamaan pelayanan. Dalam konteks ini, *aspek ekonomi* diartikan sebagai strategi untuk menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik. *Efisiensi kinerja* pelayanan publik juga dilihat untuk menunjuk suatu kondisi tercapainya perbandingan terbaik (*proporsional*) antara *input* pelayanan dengan *output*

pelayanan. Demikian pula, aspek efektivitas kinerja pelayanan ialah untuk melihat tercapainya pemenuhan tujuan atau target pelayanan yang telah ditentukan. Prinsip keadilan dalam pemberian pelayanan publik juga dilihat sebagai ukuran untuk melihat seberapa jauh bentuk pelayanan telah memperhatikan aspek-aspek keadilan dan membuat publik memiliki akses yang sama terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan.

Penilaian kinerja dapat digunakan oleh seorang manajer untuk memperoleh dasar yang obyektif dalam memberikan kompensasi sesuai dengan prestasi yang dilakukan masing-masing pusat pertanggungjawaban kepada perusahaan secara keseluruhan. Semua ini diharapkan agar dapat memberi motivasi dan rangsangan pada masing-masing bagian untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Pengukuran kinerja yang efektif setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Yuwono, dkk: 2010:28):

- a. Didasarkan pada masing-masing aktivitas dan karakteristik organisasi itu sendiri sesuai dengan perspektif pelanggan.
- b. Evaluasi atas berbagai aktivitas, menggunakan ukuran-ukuran kinerja yang *customer-validated*.
- c. Sesuai dengan seluruh aspek kinerja aktivitas yang mempengaruhi pelanggan.
- d. Memberikan umpan balik untuk membantu masalah-masalah yang ada kemungkinan perbaikan.

Pengukuran kinerja mempunyai tujuan pokok untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Menurut Mulyadi (2010), manfaat sistem pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, pemberhentian dan mutasi.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka

Pengukuran kinerja yang efektif dapat mengevaluasi atas berbagai aktivitas dan menghasilkan penilaian yang komprehensif, selain itu juga dapat memberikan umpan balik untuk membantu seluruh anggota organisasi mengenali masalah-masalah yang ada kemungkinan perbaikan.

Balanced scorecard dapat dijadikan alternatif dalam pengukuran kinerja. Tujuan dan pengukuran dengan *Balanced Scorecard* bukan hanya pada pengukuran finansial dan non-finansial saja melainkan hasil dari suatu proses atas – bawah yang berdasarkan visi misi. Manfaat pengukuran kinerja perusahaan menurut Lynch dan Cross (dalam Yuwono, 2010:29) adalah:

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga membawa perusahaan dekat kepada pelanggannya dan membuat seluruh anggota organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (*reduction of waste*).
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkrit sehingga mempercepat proses pembelajaran.
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi *reward* atas perilaku tersebut.

Menurut Goyal, et. al (2013:367) mengemukakan pengertian kinerja perusahaan merupakan hasil pelaksanaan suatu usaha baik yang bersifat fisik

maupun nonfisik dengan indikator pencapaian hasil kerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan

Pengukuran kinerja bisnis menurut Kaplan dan Norton (dalam Veithzal dan Sagala, 2010:257) terdiri dari empat dimensi, terdiri dari:

1. Dimensi tata kelola desain produk

Merupakan totalitas keistimewaan penampilan dan fungsi produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dimensi ini diukur oleh tiga indikator yaitu:

g. Kesesuaian mutu, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1)

Perusahaan memiliki kemampuan membuat desain produk sesuai dengan mutu yang ditetapkan, dan 2) Perusahaan memiliki kemampuan menetapkan kualitas produk sesuai dengan keinginan pasar.

h. Tampilan produk, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1)

Perusahaan memiliki kemampuan mendesain tampilan produk sesuai dengan kualitasnya, dan 2) Kemasan produk memiliki tampilan yang menarik perhatian konsumen.

i. Daya tahan produk, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1)

Perusahaan memiliki kemampuan membuat produk dengan daya tahan yang lama, dan 2) Kemampuan perusahaan menciptakan produk berdaya tahan lama tanpa bahan pengawet atau kimia.

2. Dimensi tata kelola keuangan

Adalah penatausahaan dalam hal keuangan perusahaan atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dimensi ini diukur oleh tiga indikator yaitu:

- a. Peningkatan pendapatan, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dari hasil produksi, dan 2) Dengan kinerja perusahaan saat ini mampu meningkatkan pendapatan.
 - b. Peningkatan efisiensi, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Perusahaan memiliki kemampuan dalam hal efisiensi biaya produksi dan operasional, dan 2) Kemampuan perusahaan melakukan efisiensi berdampak pada kinerja perusahaan.
 - c. Peningkatan keuntungan, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Perusahaan memiliki strategi untuk meningkatkan keuntungan dari hasil produksi, dan 2) Kemampuan untuk meningkatkan keuntungan berdampak pada kinerja perusahaan.
3. Dimensi tata kelola pelanggan
- Merupakan pengelolaan keluhan dan kebutuhan pelanggan sebagai bagian pelayanan purna jual (*after sales service*).
- Dimensi ini diukur dengan empat indikator yaitu:
- a. Peningkatan konsumen, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Perusahaan memiliki kemampuan pengelolaan pelanggan sehingga dapat meningkatkan jumlah pelanggan, dan 2) Dengan tata kelola pelanggan yang baik memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan.
 - b. Peningkatan kepuasan konsumen, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Perusahaan memiliki kemampuan melalui kualitas produk untuk

meningkatkan kepuasan pelanggan, dan 2) Peningkatan kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan kondisi kinerja perusahaan saat ini.

- c. Peningkatan atribut produk, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Perusahaan memiliki kemampuan untuk menambah atribut produk melalui tampilan kemasan yang lebih bervariasi, dan 2) Kemampuan perusahaan meningkatkan atribut produk mengikuti aturan yang berlaku.
- d. Peningkatan citra dan reputasi produk, yang diukur oleh dua butir item yaitu; 1) Perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan citra dan reputasi produk melalui inovasi produk, dan 2) Citra dan reputasi produk yang dimiliki perusahaan saat ini dapat diterima oleh konsumen.

4. Dimensi tata kelola teknologi dan proses produksi

Merupakan pengelolaan penggunaan teknologi sesuai dengan proses produksi untuk menghasilkan produk berkualitas.

Dimensi ini diukur dengan tiga indikator, yaitu:

- a. Peningkatan proses perubahan, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu: 1) Perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan proses perubahan pada bagian produksi, dan 2) Perusahaan dapat mengadopsi teknologi untuk meningkatkan proses perubahan bahan mentah menjadi bahan jadi.
- b. Peningkatan proses operasional, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu: 1) Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan proses operasional dengan kondisi perusahaan saat ini, dan 2) Adanya teknologi

dan proses produksi canggih saat ini dapat meningkatkan proses operasional perusahaan.

- c. Peningkatan produktivitas, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu:
 - 1) Perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan produktivitas dengan kondisi perusahaan saat ini, dan 2) Teknologi dan proses produksi yang digunakan saat ini oleh perusahaan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan.

5. Dimensi tata kelola pertumbuhan dan pembelajaran

Merupakan pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya manusia sebagai aset organisasi.

Dimensi ini diukur dengan tiga indikator, yaitu:

- a. Peningkatan kompetensi pegawai, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kompetensi pegawainya, dan 2) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan sudah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan.
- b. Peningkatan disiplin pegawai, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawainya, dan 2) Perusahaan sudah membuat aturan dan tata tertib untuk mendisiplinkan pegawainya.
- c. Peningkatan motivasi pegawai, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan motivasi pegawai, dan 2) Peningkatan motivasi pegawai sudah dilakukan perusahaan sesuai aturan dan norma yang berlaku.

6. Dimensi tata kelola pemasaran

Merupakan proses pemasaran hasil produksi untuk dijual ke pasar.

Dimensi ini diukur dengan tiga indikator, yaitu:

- a. Kecepatan penyampaian produk atau jasa, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Perusahaan memiliki kemampuan menyampaikan dengan cepat produk atau jasa ke pasar, dan 2) Kemampuan kecepatan penyampaian produk atau jasa sudah dilakukan dengan baik oleh bagian pemasaran.
- b. Peningkatan penjualan, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penjualan hasil produksi, dan 2) Target peningkatan penjualan dapat dicapai perusahaan.
- c. Perluasan pasar, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Perusahaan memiliki kemampuan untuk memperluas pasar, dan 2) Bagian pemasaran sudah melakukan perluasan pasar untuk meningkatkan penjualan.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja bisnis merupakan bagian dalam kinerja organisasi, dimana jika kinerja bisnis dapat berjalan dengan baik maka dampaknya dirasakan oleh organisasi secara keseluruhan. Seperti diketahui bahwa kinerja organisasi merupakan bagian kajian dari Ilmu Administrasi Negara. Dengan demikian kinerja bisnis memiliki keterkaitan yang erat dengan Ilmu Administrasi Negara.

2.4.3 Tinjauan Teoritis Tentang Variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha

Dalam pandangan Gie (dalam Iskandar, 2009: 338) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya suatu akibat yang dikehendaki. Hal ini mengandung pengertian apabila seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu maka perbuatan tersebut dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat sesuai dengan yang dikehendakinya

Efektivitas dapat dikatakan sebagai ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai (Makmur, 2105:6). Lebih lanjut unsur-unsur dari efektivitas dapat dilihat dari segi kriteria, antara lain (Makmur, 2105:7-8):

- a. Ketepatan penentuan waktu.
- b. Ketepatan perhitungan biaya
- c. Ketepatan dan emdalam pengukuran
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan
- e. Ketepatan berpikir
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan
- h. Ketepatan sasaran

Steers (dalam Meitaningrum dkk, 2013:193) menyatakan bahwa efektivitas adalah kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang berharga dengan sependai mungkin dalam mengejar tujuan operasional. Program merupakan kumpulan legiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan (Anggarini dan Puranto, 2010:170).

Menurut Emerson (dalam Iskandar, 2016: 329-330) pengertian efektivitas sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini berarti dapat dikatakan suatu kegiatan dapat mencapai efektivitas jika terjadi sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Rosjidi (dalam Iskandar, 2017: 330) memberikan pengertian

efektivitas adalah hasil guna yang dapat dicapai dengan melakukan serangkaian kegiatan sesuai peraturan perencanaan yang telah ditetapkan.

Susanto (2005:156) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Sedangkan Effendy (2009:14) mengemukakan bahwa efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan, dan jumlah personil yang ditentukan. Pengertian tersebut memiliki makna bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target tercapai sesuai dengan rencana.

Sedangkan Mahmudi (2013:92) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap penganapain tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya. Terdapat beberapa cara pengukuran terhadap efektivitas (Campbell dalam Iskandar,

2017:339) yaitu; keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.

Sehubungan dengan hal diatas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh.

Dimensi efektivitas organisasi menurut Steers (dalam Iskandar, 2017b:336) terdiri dari:

e. Dimensi produktivitas dan efisiensi.

Berkaitan dengan tingkat hasil usaha dan proses penggunaan sumber daya secara efisien dalam proses operasional bisnis.

Dimensi ini diukur dengan lima indikator, yaitu:

- a. Kuantitas individual, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Tingkat kemampuan individu (karyawan) dalam menyelesaikan pekerjaan, dan 2) Jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh individu (karyawan).
- b. Kuantitas kelompok, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Tingkat kemampuan kelompok (grup kerja) dalam menyelesaikan pekerjaan, dan 2) Jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh kelompok (grup kerja).
- c. Kuantitas organisasi, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Tingkat kemampuan organisasi (perusahaan) mencapai target produksi,

dan 2) Jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh organisasi (perusahaan) mencapai target yang ditetapkan.

- d. Tingkat penurunan biaya, dan tingkat pemakaian bahan, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kemampuan pemakaian bahan secara efektif dan efisien, dan 2) Kemampuan menyesuaikan pemakaian bahan dengan target produksi.

f. Dimensi laba dan pengembangan usaha

Berkaitan dengan tingkat perolehan keuntungan atau laba yang diperoleh dari penjualan produk dan digunakan untuk mengembangkan kapasitas usaha.

Dimensi ini diukur menggunakan enam indikator, yaitu:

- a. Tingkat penghasilan, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kemampuan perusahaan memperoleh penghasilan dari hasil produksi, dan 2) Kemampuan mencapai target penghasilan sesuai dengan target produksi.
- b. Tingkat profitabilitas, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kemampuan menghasilkan keuntungan dari hasil produksi, dan Kemampuan perusahaan mencapai target keuntungan atau laba.
- c. Tingkat penambahan SDM, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kemampuan perusahaan mengalokasikan sumber daya manusia secara optimal, dan 2) Kemampuan perusahaan menambah sumber daya manusia untuk mencapai target produksi.
- d. Tingkat penambahan fasilitas, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kemampuan perusahaan memanfaatkan fasilitas secara optimal, dan 2) Kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan fasilitas operasional dan produksi.

- e. Tingkat penambahan modal, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kemampuan mengalokasikan modal untuk operasional dan produksi, dan 2) Kemampuan perusahaan menyesuaikan kebutuhan modal dengan target produksi.
- f. Tingkat inovasi produk, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kemampuan perusahaan menciptakan produk baru sesuai selera pasar, dan 2) Kemampuan perusahaan melakukan inovasi produk.
- g. Dimensi stabilitas usaha.

Dimensi ini diukur oleh indikator, yaitu:

- a. Pemeliharaan struktur organisasi, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kemampuan perusahaan menempatkan sumber daya manusia dalam struktur organisasi, dan 2) Kemampuan perusahaan membina dan memelihara struktur organisasi.

Pemeliharaan fungsi organisasi, diukur oleh indikator, yaitu:

- b. Pemeliharaan fungsi organisasi, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Tingkat optimalisasi fungsi manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan, dan 2) Kemampuan perusahaan melakukan pemeliharaan sumber daya-sumber daya dalam organisasi.
- c. Pemeliharaan sumber daya, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kemampuan perusahaan mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan 2) Kemampuan perusahaan memelihara sumber daya atau fasilitas produksi.
- h. Dimensi semangat dan kepuasan kerja.

Berkaitan pemeliharaan dan pengembangan sumber-sumber daya internal organisasi yang menumbuhkan semangat dan kepuasan kerja bagi pegawai.

Dimensi ini diukur oleh lima indikator, yaitu:

- a. Perasaan terikat, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Tingkat keterikatan karyawan dengan perusahaan, dan 2) Tingkat komitmen kerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan.
- b. Kebersamaan tujuan, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan perusahaan, dan 2) Semua karyawan memiliki komitmen yang sama untuk memajukan perusahaan.
- c. Perasaan memiliki, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Tingkat perasaan memiliki dari semua karyawan terhadap perusahaan, dan 2) Solidaritas sesama karyawan memajukan perusahaan untuk kepentingan bersama.
- d. Kompensasi, yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kemampuan perusahaan memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan 2) Tingkat kepuasan karyawan menerima kompensasi.
- e. Penghargaan (*Reward*). yang diukur kembali oleh dua butir item yaitu; 1) Kemampuan perusahaan memberikan penghargaan (*reward*) kepada karyawan yang berprestasi, dan 2) Tingkat kepuasan karyawan menerima penghargaan (*reward*).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan usaha dikatakan efektif apabila telah menerapkan aturan atau kebijakan yang menjadi pedoman atau panduan sehingga usaha berjalan sesuai dengan aturan atau kebijakan yang berlaku. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan diperlukan pengaturan dan pengelolaan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi atau usaha. Artinya pelaksanaan kebijakan dan efektivitas organisasi merupakan bagian kajian Ilmu

Administrasi Negara, dengan kata lain pelaksanaan kebijakan dan efektivitas organisasi memiliki keterkaitan yang erat dengan Ilmu Administrasi Negara.

2.5 Hubungan Konseptual Antara Variabel Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pada dasarnya kebijakan publik memiliki karakteristik, dibuat oleh pemerintah berupa tindakan pemerintah, mempunyai tujuan yang telah ditetapkan, dibuat untuk memenuhi nilai - nilai yang berkaitan dengan kepentingan publik. Selanjutnya, jika kebijakan memiliki tujuan, maka konsep implementasi kebijakan identik dengan upaya mencapai tujuan kebijakan, seperti menurut Van Meter dan Van Hom (dalam Wahab 2007: 65) bahwa implementasi kebijakan adalah "tindakan - tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan -tujuan yang telah digariskan oleh keputusan kebijakan".

Selanjutnya implementasi kebijakan memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan, atau tidak tercapainya tujuan kebijakan. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan implementasi kebijakan akan berhubungan dengan derajat pencapaian tujuan kebijakan. Sementara, derajat pencapaian tujuan adalah prestasi yang merupakan definisi sederhana dari kinerja dalam konsep penelitian ini. Oleh sebab itu, tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik yang dilakukan oleh sebuah organisasi publik, akan mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja organisasi publik tersebut.

Kemudian bahwa kinerja organisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Iskandar (2005: 265) adalah hasil pencapaian atau prestasi kerja secara kualitas dan kuantitas yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi dengan saling pengertian

dan pertimbangan bersama yang berpedoman pada suatu standar kerja. Standar kerja yang dijadikan pedoman oleh sebuah organisasi publik, dirumuskan kedalam kebijakan publik, sebagaimana dikemukakan PBB (1975) bahwa kebijakan adalah pedoman untuk bertindak, serta dikatakan Laswell dan Kaplan (dalam Iskandar, 2017c: 151) bahwa kebijakan publik merupakan sesuatu program pencapaian tujuan, nilai - nilai dalam praktek yang terarah.

Dunn (dalam Wahab, 2007:441) mengatakan bahwa setiap kebijakan publik harus mempunyai tujuan yang bersifat kolektif, yang dianggap merupakan cerminan dari preferensi kolektif atau kepentingan publik. Sementara itu Kristiadi (dalam Iskandar, 2017a: 142) mengatakan bahwa tujuan dari organisasi dan kebijakan publik adalah memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diberikan tentunya harus sesuai dengan harapan publik sebagai pelanggan. Kesesuaian antara harapan pelayanan dan pelayanan yang diterima pelanggan ini melahirkan sebuah kualitas pelayanan.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif (Santosa, 2012: 43). Solichin (dalam Iskandar, 2017c: 206) menyatakan ada sejumlah alasan yang dapat diberikan mengapa implementasi kebijakan merupakan batu sandungan dalam mewujudkan efektivitas organisasi atau kelangsungan suatu usaha, salah satunya adalah birokrasi Pemerintah belum merupakan kesatuan yang efektif dan berorientasi kepada tujuan.

Berdasarkan uraian tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan publik untuk mencapai tujuan kebijakan dan berpengaruh terhadap kinerja

organisasi atau bisnis dalam melaksanakan tujuan utamanya guna melayani publik sesuai dengan harapan pelanggan. Selanjutnya, juga terdapat hubungan antara kinerja organisasi atau bisnis dengan efektivitas kelangsungan suatu usaha untuk melayani kepentingan publik sesuai harapan pelanggan. Kemudian efektivitas kelangsungan usaha yang diharapkan para pemiliknya (*owner*) akan dipengaruhi pula oleh sejauh mana pelaksanaan kebijakan publik tersebut dapat berjalan optimal untuk memenuhi tujuannya dalam memenuhi kepentingan publik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah metode eksplanasi, merupakan metode untuk mencari keterangan atau penjelasan dengan tujuan menjelaskan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara dua variabel atau lebih berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada dan berusaha untuk mengetahui variabel penyebabnya, sehingga penelitian ini disebut penelitian sebab akibat (*causal effectual*).

Dalam pelaksanaannya maka penelitian ini dilakukan dengan teknik evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, akurat dan faktual tentang fakta, sifat pengaruh atau sebab akibat (*causal effectual*) serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

3.2 Variabel-Variabel Penelitian dan Paradigma Penelitian

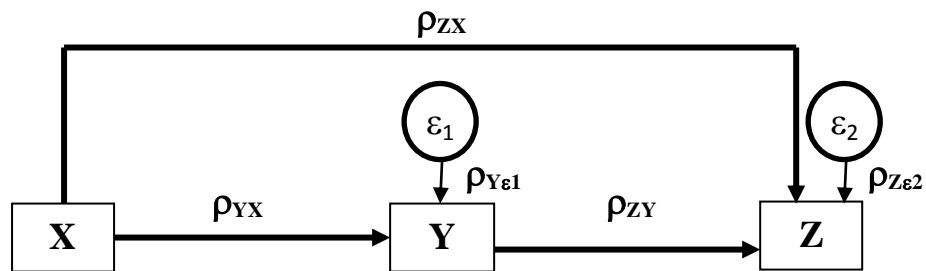
3.2.1 Variabel-Variabel Penelitian

Usulan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) kelompok variabel, yaitu satu variabel bebas (*independent*), satu variabel antara (*intervening*), dan satu variabel terikat (*dependent*) dengan sifat hubungan yaitu *causal effectual*, sebagai berikut:

1. Variabel bebas (*Independent*) dengan simbol X yaitu Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM.
2. Variabel antara (*intervening*) dengan simbol Y yaitu Kinerja Bisnis.
3. Variabel terikat (*dependent*) dengan simbol Z yaitu Efektivitas Kelangsungan Usaha.

3.2.2 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian menggambarkan hubungan variabel-variabel penelitian dalam suatu model bersifat *causal effectual* dimana secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Paradigma Penelitian

Keterangan:

X = Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM

Y = Kinerja Bisnis

Z = Efektivitas Kelangsungan Usaha

→ = Hubungan kausal

ρ_{YX} = Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y

ρ_{ZX} = Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Z

ρ_{ZY} = Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel Y terhadap variabel Z

$\rho_{Z\varepsilon_2}$ = Pengaruh variabel lain terhadap Z

$\rho_{Y\varepsilon_1}$ = Pengaruh variabel lain terhadap Y

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa variabel bebas yang diuji adalah variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X) yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap Kinerja Bisnis (Y) dan Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X) diasumsikan berpengaruh terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha (Z), serta Kinerja Bisnis (Y) diasumsikan mempunyai pengaruh terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha (Z).

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Beberapa variabel penelitian yang telah dirumuskan pada tingkat dimensi tentunya harus dapat dioperasionalkan dengan baik. Untuk kebutuhan analisis perlu diturunkan sampai tingkat indikator dari masing-masing variabel tersebut sehingga memudahkan pengukuran variabel-variabel dalam penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) kelompok variabel yaitu variabel bebas (*dependent*), variabel antara (*intervening*), dan variabel terikat (*dependent*) dengan batasan-batasan mengenai variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X) adalah pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan program ekonomi yang melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam upaya menciptakan pengusaha dan usaha ekonomi yang produktif dan mandiri, diukur melalui jumlah skor total dari jawaban responden dengan item-item pertanyaan pada alat ukur penelitian yang meliputi dimensi:
 - a. Konsistensi, dengan indikator; sesuai prosedur dan sesuai aturan/norma.
 - b. Transparansi, dengan indikator; bersifat terbuka, mudah dimengerti, dan mudah diakses oleh umum.
 - c. Akuntabilitas, dengan indikator; dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, dapat dipertanggungjawabkan secara substantif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. Keadilan, dengan indikator; tidak diskriminatif dan kualitas pelayanan tidak membedakan SARA.

- e. Partisipatif, dengan indikator; memperhatikan aspirasi masyarakat, memperhatikan kebutuhan masyarakat, memperhatikan kepentingan masyarakat, dan memperhatikan harapan masyarakat.
2. Kinerja Bisnis (Y) adalah hasil pencapaian atau suatu prestasi kerja secara kualitas dan kuantitas yang dilaksanakan dalam bisnis UMKM, yang diukur melalui jumlah skor total dari jawaban responden dengan item-item pertanyaan pada alat ukur penelitian yang meliputi dimensi:
 - a. Tata kelola desain produk, dengan indikator kesesuaian mutu, tampilan produk, dan daya tahan produk.
 - b. Tata kelola keuangan, dengan indikator; peningkatan pendapatan, peningkatan penjualan, peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, dan peningkatan keuntungan.
 - c. Tata kelola pelanggan, dengan indikator; peningkatan konsumen, peningkatan kepuasan konsumen, peningkatan atribut produk, serta peningkatan citra dan reputasi produk.
 - d. Tata kelola teknologi dan proses produksi, dengan indikator; proses perubahan, proses operasional, dan proses penyampaian produk dan jasa.
 - e. Tata kelola pertumbuhan dan pembelajaran, dengan indikator; peningkatan kompetensi pegawai, peningkatan disiplin pegawai, dan peningkatan motivasi pegawai.
 - f. Tata kelola pemasaran, dengan indikator peningkatan penjualan dan perluasan pasar.
 3. Efektivitas Kelangsungan Usaha (Z), yaitu kemampuan organisasi memperoleh dan menggunakan secara efisien sumber-sumber yang tersedia

untuk mencapai tujuannya, yang diukur melalui jumlah skor total dari jawaban responden terhadap item-item pertanyaan pada alat ukur penelitian, meliputi dimensi:

- a. Produktivitas dan efisiensi, dengan indikator sebagai berikut: kuantitas individual, kuantitas kelompok, kuantitas organisasi, tingkat penurunan biaya, dan tingkat pemakaian bahan.
- b. Laba dan pertumbuhan, dengan indikator sebagai berikut: tingkat penghasilan, tingkat profitabilitas, tingkat penambahan SDM, tingkat penambahan fasilitas, tingkat penambahan modal, dan tingkat inovasi produk.
- c. Stabilitas usaha, dengan indikator sebagai berikut: pemeliharaan struktur organisasi, pemeliharaan fungsi organisasi, dan pemeliharaan sumber daya,
- d. Semangat kerja dan kepuasan, dengan indikator sebagai berikut; perasaan terikat, kebersamaan tujuan, perasaan memiliki, kompensasi, dan penghargaan.

3.4 Operasionalisasi Variabel-Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel penelitian disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan asumsi-asumsi dari variabel penelitian yang ditetapkan.

Operasionalisasi variabel ini meliputi dimensi-dimensi dan indikator-indikator yang ditunjukkan dalam merumuskan item-item pertanyaan atau

pernyataan dengan alternatif jawaban pada kuisioner (alat ukur) untuk diisi atau dijawab oleh responden dalam penelitian ini.

Adapun operasionalisasi variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
1	Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X) Ramdhani dan Ramdhani (2017:5) Merupakan tahapan aktivitas/ kegiatan/ program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan	1. Konsistensi	a. Sesuai prosedur b. Sesuai aturan/norma	1, 2 3, 4
		2. Transparansi	a. Bersifat terbuka b. Mudah dimengerti c. Dapat diakses oleh umum	5, 6 7, 8 9,10
		3. Akuntabilitas	a. Dapat dipertanggungjawabkan secara administratif b. Dapat dipertanggungjawabkan secara substantif c. Sesuai peraturan perundang-undangan	11, 12 13, 14 15, 16
		4. Keadilan	a. Tidak diskriminatif b. Kualitas pelayanan tidak membedakan SARA	17, 18 19, 20
		5. Partisipatif	a. Memperhatikan aspirasi masyarakat b. Memperhatikan kebutuhan masyarakat c. Memperhatikan kepentingan masyarakat d. Memperhatikan harapan masyarakat	21, 22 23, 24 25, 26 27, 28
2	Kinerja Bisnis UMKM (Y) Goyal, et. al (2013:367) Merupakan hasil pelaksanaan suatu usaha baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dengan indikator pencapaian hasil kerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan.	1. Tata Kelola Desain Produk	a. Kesesuaian mutu b. Tampilan produk c. Daya tahan produk	29, 30 31, 32 33, 34
		2. Tata Kelola Keuangan	a. Peningkatan pendapatan b. Peningkatan efisiensi c. Peningkatan keuntungan	35, 36 37, 38 39, 40
		3. Tata Kelola Pelanggan	a. Peningkatan jumlah konsumen b. Peningkatan kepuasan konsumen c. Peningkatan atribut produk d. Peningkatan citra dan reputasi produk	41, 42 43, 44 45, 46 47, 48
		4. Tata Kelola Teknologi dan Proses Produksi	a. Peningkatan proses perubahan b. Peningkatan proses operasional c. Peningkatan produktivitas	49, 50 51, 52 53, 54

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Item
		5. Tata Kelola Pertumbuhan dan Pembelajaran	a. Peningkatan kompetensi pegawai b. Peningkatan disiplin pegawai c. Peningkatan motivasi pegawai	55, 56 57, 58 59, 60
		6. Tata Kelola Pemasaran	a. Kecepatan penyampaian produk atau jasa b. Peningkatan penjualan c. Perluasan pasar	61, 62 63, 64 65, 66
3	Efektivitas Kelangsungan Usaha UMKM (Z) Steers, Richard M. (Iskandar, 2017b:219) Sudut pandang efektivitas organisasi akan lebih baik dinilai dari tujuan yang sebenarnya yang ingin dicapai oleh organisasi, dimana efektivitas suatu organisasi merupakan kemampuan organisasi memperoleh dan menggunakan secara efisien sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuannya.	1. Produktivitas dan Efisiensi	a. Kuantitas individual b. Kuantitas kelompok c. Kuantitas organisasi d. Tingkat penurunan biaya e. Tingkat pemakaian bahan	67, 68 69, 70 71, 72 73, 74 75, 76
		2. Laba dan Pengembangan Usaha	a. Tingkat penghasilan b. Tingkat profitabilitas c. Tingkat penambahan SDM d. Tingkat penambahan fasilitas e. Tingkat penambahan modal f. Tingkat inovasi produk	77, 78 79, 80 81, 82 83, 84 85, 86 87, 88
		3. Stabilitas usaha	a. Pemeliharaan struktur organisasi b. Pemeliharaan fungsi organisasi c. Pemeliharaan sumber daya	89, 90 91, 92 93, 94
		4. Semangat dan kepuasan kerja	a. Perasaan terikat b. Kebersamaan tujuan c. Perasaan memiliki d. Kompensasi e. Penghargaan (<i>reward</i>)	95, 96 97, 98 99, 100 101, 102 103, 104

3.5 Alat Ukur Penelitian, Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

3.5.1 Alat Ukur Penelitian

Alat ukur penelitian yang baik sangat diperlukan untuk menghasilkan suatu penelitian dengan tingkat informasi yang tepat dan sesuai dengan kaidah ilmiah. Sebelum peneliti melakukan penelitian, maka langkah yang ditempuh adalah merumuskan dan menyusun alat ukur penelitian.

Iskandar (2017:171) mengemukakan bahwa salah satu tahapan yang paling penting dalam proses penelitian ilmiah adalah menyusun alat ukur penelitian

sebagai pedoman untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Oleh sebab itu perlu disusun sesuai kebutuhan data berdasarkan variabel yang akan diukur, sehingga alat ukur yang baik sangat diperlukan untuk menghasilkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah.

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket (kuisisioner) yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain (responden) yang bersedia memberikan tanggapan (respon) sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mencari informasi yang lengkap mengenai fenomena masalah penelitian. Angket yang digunakan berupa angket jenis tertutup (terstruktur) yang terdiri dari sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup berikut alternatif jawaban yang telah disediakan sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalam kegiatan pengumpulan data penelitian ini menggunakan tingkat pengukuran variabel yang bersifat ordinal dan kategori jawaban terdiri dari 5 (lima) tingkatan skala perbedaan semantik dengan menggunakan model *Likert Scale*. Sugiyono (2014:86) menjelaskan bahwa "Skala Likert digunakan mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial".

Jawaban dengan menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari positif sampai negatif berupa jawaban terhadap pertanyaan dengan skor berikut:

1. Sangat Baik (SB) dengan skor 5 atau berjenis kebalikannya dengan skor 1
2. Baik (B) dengan skor 4 atau pertanyaan berjenis kebalikannya dengan skor 2
3. Cukup (C) dengan skor 3 atau pernyataan berjenis kebalikannya dengan skor 3

4. Buruk (B) dengan skor 2 atau pernyataan berjenis kebalikannya dengan skor 4
5. Sangat Buruk (SB) dengan skor 1 atau berjenis kebalikannya dengan skor 5

3.5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian

3.5.2.1 Pengujian Validitas Alat Ukur Penelitian

Sebelum melakukan pengumpulan data, terlebih dahulu dilakukan pengujian alat ukur penelitian yang akan digunakan. Oleh karena itu, mengingat ketepatan alat ukur sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian hipotesis. Maka terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian.

Iskandar (2017:147) mengemukakan bahwa validitas suatu alat ukur didefinisikan sebagai suatu ukuran yang memungkinkan peneliti beranggapan bahwa alat ukur tersebut dapat dipergunakan untuk karakter yang hendak diukurnya. Dengan kata lain, validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu alat ukur. Suatu alat ukur yang sah akan mempunyai validitas yang tinggi, begitu pula sebaliknya.

Menurut Iskandar (2017:130-131) ada dua kriteria untuk menyusun pengukuran yang baik, yaitu pertama, ukuran harus menggambarkan secara tepat kegiatan sosial yang nyata. Kedua, besarnya jawaban-jawaban yang sama dalam setiap waktu dan dapat dipergunakan dalam berbagai situasi. Kriteria pertama dinamakan validitas dan kriteria kedua dinamakan reliabilitas.

Tujuan dari pengujian validitas alat ukur adalah supaya alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini benar-benar valid, sehingga tujuan dari penelitian bisa tercapai sesuai harapan. Untuk pengujian validitas alat ukur dilakukan pengujian sebagai berikut :

- a. Uji Validitas konseptual, yang terdiri dari uji validitas isi atau validitas muka, uji validitas prediktif dan concurrent serta uji validitas konstrak, untuk lebih jelaskan penulis uraikan sebagai berikut :
 - 1). Uji validitas Isi yaitu merupakan tipe validitas kuantitatif. Item-item itu harus mencakup dalam ukuran sehingga mencerminkan kemampuan-kemampuan dan tujuan orang yang melakukan pengujian atau pengalaman pribadi dan latar belakang profesi mereka.
 - 2). Uji Validitas Prediktif dan Concurrent yaitu validitas yang didasarkan pada aturan hubungan antara bagaimana alat ukur meramalkan perilaku yang terjadi dengan akibat perilaku yang dilakukan individu atau kelompok.
 - 3). Uji Validitas Konstrak berguna untuk mengukur karakter / sifat misalnya keagresifan yang tersembunyi / atau laten. Magnuson dalam Iskandar (2009b ; 161) Validitas Konstrak secara umum ditentukan melalui aplikasi dari faktor analisis terhadap suatu pengukuran instrument.
- b. Uji Validitas Lapangan, yang dilaksanakan terhadap sampel populasi, supaya alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini benar-benar valid.

Pengujian validitas alat ukur dalam penelitian ini menggunakan pendekatan rumus korelasi *Product Moment Pearson* (dalam Iskandar, 2017) dengan formulasinya sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2] - [n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

$\sum X$ = Jumlah skor tiap item ke-i

$\sum Y$ = Total seluruh item

n = Jumlah responden

Selanjutnya untuk menguji signifikansi koefisien korelasi (r) dilakukan uji pada taraf nyata (α) sebesar 0,05 dan derajat kebebasan (dk) yaitu n – 2 dengan rumus (dalam Iskandar, 2017):

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Nilai t hitung

r = koefisien korelasi hasil hitung

n = Jumlah responden

Kaidah keputusan sebagai berikut:

- a. Jika t hitung > t tabel, maka alat ukur penelitian dinyatakan valid.
- b. Jika t hitung \leq t tabel, maka alat ukur penelitian dinyatakan tidak valid.

Secara operasional, pengujian validitas alat ukur penelitian dilakukan melalui uji coba terhadap 20 orang responden yang mewakili kelompok populasi. Secara statistik, jumlah responden sebesar itu sudah memadai untuk menentukan validitas alat ukur penelitian karena akan menghasilkan distribusi skor mendekati kurva normal. Jika alat ukur valid, maka selanjutnya dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber; Sugiyono, 2014

Adapun hasil pengujian validitas lapangan terhadap pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuisioner/angket dari masing-masing variabel hasilnya sebagai berikut:

1) Uji validitas variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X)

Alat ukur variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X) telah diuji validitasnya dari total 28 butir item pertanyaan/pernyataan (nomor item 1 sampai 28). Hasil uji validitas variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Hasil Uji Validitas Variabel X
(Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM)

Nomor Item	Nilai Korelasi (r hitung)	Interpretasi Koefisien Korelasi	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Keterangan
1	0,660	Kuat	3,726	2,101	Valid

Nomor Item	Nilai Korelasi (r hitung)	Interpretasi Koefisien Korelasi	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Keterangan
2	0,568	Sedang	2,930	2,101	Valid
3	0,579	Sedang	3,012	2,101	Valid
4	0,819	Sangat Kuat	6,062	2,101	Valid
5	0,814	Sangat Kuat	5,942	2,101	Valid
6	0,568	Sedang	2,930	2,101	Valid
7	0,587	Sedang	3,079	2,101	Valid
8	0,819	Sangat Kuat	6,062	2,101	Valid
9	0,702	Kuat	4,182	2,101	Valid
10	0,814	Sangat Kuat	5,942	2,101	Valid
11	0,579	Sedang	3,012	2,101	Valid
12	0,579	Sedang	3,012	2,101	Valid
13	0,587	Sedang	3,079	2,101	Valid
14	0,531	Sedang	2,658	2,101	Valid
15	0,520	Sedang	2,580	2,101	Valid
16	0,819	Sangat Kuat	6,062	2,101	Valid
17	0,702	Kuat	4,182	2,101	Valid
18	0,814	Sangat Kuat	5,942	2,101	Valid
19	0,727	Kuat	4,491	2,101	Valid
20	0,627	Kuat	3,414	2,101	Valid
21	0,449	Sedang	2,130	2,101	Valid
22	0,634	Kuat	3,479	2,101	Valid
23	0,579	Sedang	3,012	2,101	Valid
24	0,725	Kuat	4,470	2,101	Valid
25	0,819	Sangat Kuat	6,062	2,101	Valid
26	0,579	Sedang	3,012	2,101	Valid
27	0,794	Kuat	5,547	2,101	Valid
28	0,472	Sedang	2,271	2,101	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

2) Uji validitas variabel Kinerja Bisnis (Y)

Alat ukur variabel Kinerja Bisnis (Y) telah diuji validitasnya dari total 38 butir item pertanyaan/ pernyataan (nomor item 29 sampai 66). Hasil uji validitas variabel Kinerja Bisnis (Y) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Hasil Uji Validitas Variabel Y
(Kinerja Bisnis)

Nomor Item	Nilai Korelasi (r hitung)	Interpretasi Koefisien Korelasi	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Keterangan
29	0,825	Sangat Kuat	6,184	2,101	Valid
30	0,825	Sangat Kuat	6,197	2,101	Valid
31	0,825	Sangat Kuat	6,197	2,101	Valid
32	0,571	Sedang	2,948	2,101	Valid
33	0,825	Sangat Kuat	6,184	2,101	Valid
34	0,825	Sangat Kuat	6,184	2,101	Valid
35	0,825	Sangat Kuat	6,197	2,101	Valid
36	0,571	Sedang	2,948	2,101	Valid
37	0,825	Sangat Kuat	6,184	2,101	Valid
38	0,825	Sangat Kuat	6,197	2,101	Valid
39	0,825	Sangat Kuat	6,184	2,101	Valid
40	0,825	Sangat Kuat	6,197	2,101	Valid
41	0,792	Kuat	5,495	2,101	Valid
42	0,571	Sedang	2,948	2,101	Valid
43	0,767	Kuat	5,065	2,101	Valid
44	0,825	Sangat Kuat	6,197	2,101	Valid
45	0,825	Sangat Kuat	6,184	2,101	Valid
46	0,825	Sangat Kuat	6,197	2,101	Valid
47	0,825	Sangat Kuat	6,184	2,101	Valid
48	0,825	Sangat Kuat	6,197	2,101	Valid
49	0,825	Sangat Kuat	6,197	2,101	Valid
50	0,571	Sedang	2,948	2,101	Valid
51	0,536	Sedang	2,694	2,101	Valid
52	0,825	Sangat Kuat	6,197	2,101	Valid
53	0,825	Sangat Kuat	6,184	2,101	Valid
54	0,825	Sangat Kuat	6,197	2,101	Valid
55	0,571	Sedang	2,948	2,101	Valid
56	0,825	Sangat Kuat	6,184	2,101	Valid
57	0,544	Sedang	2,753	2,101	Valid
58	0,825	Sangat Kuat	6,184	2,101	Valid
59	0,825	Sangat Kuat	6,197	2,101	Valid
60	0,825	Sangat Kuat	6,184	2,101	Valid

Nomor Item	Nilai Korelasi (r hitung)	Interpretasi Koefisien Korelasi	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Keterangan
61	0,792	Kuat	5,495	2,101	Valid
62	0,774	Kuat	5,184	2,101	Valid
63	0,825	Sangat Kuat	6,197	2,101	Valid
64	0,825	Sangat Kuat	6,197	2,101	Valid
65	0,571	Sedang	2,948	2,101	Valid
66	0,767	Kuat	5,065	2,101	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

3) Uji validitas variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha (Z)

Alat ukur variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha (Z) telah diuji validitasnya dari total 38 butir item pertanyaan/pernyataan (nomor item 67 sampai 104).

Hasil uji validitas variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha (Z) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Hasil Uji Validitas Variabel Z
(Efektivitas Kelangsungan Usaha)

Nomor Item	Nilai Korelasi (r hitung)	Interpretasi Koefisien Korelasi	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Keterangan
67	0,786	Kuat	5,394	2,101	Valid
68	0,854	Sangat Kuat	6,956	2,101	Valid
69	0,752	Kuat	4,846	2,101	Valid
70	0,795	Kuat	5,555	2,101	Valid
71	0,762	Kuat	4,992	2,101	Valid
72	0,748	Kuat	4,779	2,101	Valid
73	0,788	Kuat	5,429	2,101	Valid
74	0,854	Sangat Kuat	6,956	2,101	Valid
75	0,736	Kuat	4,610	2,101	Valid
76	0,801	Sangat Kuat	5,670	2,101	Valid
77	0,771	Kuat	5,139	2,101	Valid
78	0,788	Kuat	5,429	2,101	Valid
79	0,854	Sangat Kuat	6,956	2,101	Valid
80	0,752	Kuat	4,846	2,101	Valid
81	0,795	Kuat	5,555	2,101	Valid
82	0,762	Kuat	4,992	2,101	Valid
83	0,748	Kuat	4,779	2,101	Valid
84	0,495	Sedang	2,420	2,101	Valid
85	0,748	Kuat	4,779	2,101	Valid

Nomor Item	Nilai Korelasi (r hitung)	Interpretasi Koefisien Korelasi	Nilai t hitung	Nilai t tabel	Keterangan
86	0,788	Kuat	5,429	2,101	Valid
87	0,854	Sangat Kuat	6,956	2,101	Valid
88	0,495	Sedang	2,420	2,101	Valid
89	0,748	Kuat	4,779	2,101	Valid
90	0,773	Kuat	5,171	2,101	Valid
91	0,854	Sangat Kuat	6,956	2,101	Valid
92	0,786	Kuat	5,394	2,101	Valid
93	0,530	Sedang	2,652	2,101	Valid
94	0,801	Sangat Kuat	5,670	2,101	Valid
95	0,854	Sangat Kuat	6,956	2,101	Valid
96	0,736	Kuat	4,610	2,101	Valid
97	0,801	Sangat Kuat	5,670	2,101	Valid
98	0,771	Kuat	5,139	2,101	Valid
99	0,788	Kuat	5,429	2,101	Valid
100	0,854	Sangat Kuat	6,956	2,101	Valid
101	0,495	Sedang	2,420	2,101	Valid
102	0,748	Kuat	4,779	2,101	Valid
103	0,773	Kuat	5,171	2,101	Valid
104	0,854	Sangat Kuat	6,956	2,101	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

3.5.2.2 Pengujian Reliabilitas Alat Ukur Penelitian

Selain harus valid, alat ukur penelitian juga harus handal (*reliable*). Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila alat ukur penelitian memberikan hasil yang tetap selama variabel yang diukur tidak berubah. Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini dapat dilihat, apabila suatu alat ukur dipakai berulang kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif konstan, maka alat ukur tersebut reliabel atau handal. Dengan demikian reliabilitas menunjukkan konsistensi alat ukur penelitian dalam mengukur gejala yang sama (dalam Sugiyono, 2014:102).

Menurut Iskandar (2017:166) bahwa reliabilitas suatu instrumen pengukuran sebagai suatu kemampuan instrumen guna mengukur secara konsisten

terhadap fenomena yang dirancang untuk diukur. Pengujian reliabilitas alat ukur penelitian ini menggunakan pendekatan *Alpha Cronbach* dengan tahapan berikut:

1. Penentuan nilai koefisien korelasi (r)

Untuk menentukan nilai koefisien korelasi (r) digunakan rumus berikut:

$$r = \left\{ \frac{k}{k-1} \right\} \left\{ 1 - \frac{S_i^2}{S_t^2} \right\}$$

Rumus menghitung S_i^2 dan S_t^2

$$S_i^2 = \frac{JK_i}{n} - \frac{JK_s}{n^2}$$

$$S_t^2 = \frac{\sum X_i^2}{n} - \frac{(\sum X_i)^2}{n^2}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

k = Jumlah item

JK_i = Penjumlahan dari kuadrat seluruh skor tiap item

JK_s = Penjumlahan dari kuadrat jumlah skor tiap item

X_i = Skor masing-masing responden

2. Penentuan nilai t_{hitung}

Untuk menentukan t_{hitung} menggunakan persamaan:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

3. Kaidah keputusan

Nilai t_{hitung} yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan tingkat α tertentu dan derajat bebas (dk) sebesar $n-2$. Keputusan diambil dengan kaidah sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka alat ukur yang digunakan reliabel
- b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka alat ukur yang digunakan tidak reliabel

Adapun hasil pengujian reliabilitas terhadap pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuisioner/angket dari masing-masing variabel menggunakan sampel sebanyak 20 responden dengan hasil sebagai berikut:

1) Uji reliabilitas variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X)

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X) berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* menunjukkan bahwa hasilnya adalah reliabel.

Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan uji reliabilitas variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Hasil Uji Reliabilitas Variabel X
(Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM)

Nomor Item	Varians	Hasil Perhitungan	
1	0,793	Varians Total	245,841
2	0,729	Varians Instrumen	20,217
3	0,606	Alpha	0,952
4	0,800	t_{hitung}	13,159
5	0,606	t_{tabel}	2,101
6	0,729	Keputusan	Reliabel
7	0,736	Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka alat ukur yang digunakan reliabel	
8	0,800		
9	0,839	Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka alat ukur yang digunakan reliabel	
10	0,606		
11	0,606		
12	0,606		
13	0,736		

Nomor	Varians	Hasil Perhitungan
14	0,766	
15	0,802	
16	0,800	
17	0,839	
18	0,606	
19	0,871	
20	0,623	
21	0,763	
22	0,798	
23	0,606	
24	0,606	
25	0,800	
26	0,606	
27	0,807	
28	0,735	

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

2) Uji reliabilitas variabel Kinerja Bisnis (Y)

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel Kinerja Bisnis (Y) berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* menunjukkan bahwa hasilnya adalah reliabel.

Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan uji reliabilitas variabel Kinerja Bisnis (Y) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y
(Kinerja Bisnis)

Nomor Item	Varians	Hasil Perhitungan
29	0,796	Varians Total 620,167
30	0,784	Varians Instrumen 27,591
31	0,784	Alpha 0,981
32	0,432	t_{hitung} 21,650
33	0,796	t_{tabel} 2,101
34	0,796	Keputusan Reliabel
35	0,784	Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka alat ukur yang digunakan reliabel
36	0,432	
37	0,796	Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka alat ukur yang digunakan tidak reliabel
38	0,784	
39	0,796	

Nomor	Varians	Hasil Perhitungan
40	0,784	
41	0,793	
42	0,432	
43	0,785	
44	0,784	
45	0,796	
46	0,784	
47	0,796	
48	0,784	
49	0,784	
50	0,432	
51	0,606	
52	0,784	
53	0,796	
54	0,784	
55	0,432	
56	0,796	
57	0,729	
58	0,796	
59	0,784	
60	0,796	
61	0,793	
62	0,785	
63	0,784	
64	0,784	
65	0,432	
66	0,785	

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

3) Uji reliabilitas variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha (Z)

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha (Z) berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* menunjukkan bahwa hasilnya adalah reliabel.

Lebih jelasnya hasil perhitungan uji reliabilitas variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha (Z) disajikan pada tabel berikut

:

Tabel 3.8
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Z
(Efektivitas Kelangsungan Usaha)

Nomor Item	Varians	Hasil Perhitungan	
		67	0,634
68	0,636	Varians Instrumen	27,030
69	0,802	Alpha	0,980
70	0,634	t_{hitung}	20,708
71	0,802	t_{tabel}	2,101
72	0,785	Keputusan	Reliabel
73	0,763	Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka alat ukur yang digunakan reliabel Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka alat ukur yang digunakan tidak reliabel	
74	0,636		
75	0,634		
76	0,634		
77	0,813		
78	0,763		
79	0,636		
80	0,802		
81	0,634		
82	0,802		
83	0,785		
84	0,839		
85	0,785		
86	0,763		
87	0,636		
88	0,839		
89	0,785		
90	0,634		
91	0,636		
92	0,634		
93	0,768		
94	0,502		
95	0,636		
96	0,634		
97	0,634		
98	0,813		
99	0,763		
100	0,636		
101	0,839		
102	0,785		
103	0,634		
104	0,636		

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

3.6 Populasi Penelitian dan Teknik Penarikan Sampel

3.6.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri tertentu (dalam Iskandar, 2017f:230). Populasi yang dijadikan objek penelitian adalah organisasi berupa Asosiasi dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang termasuk dalam 7 (tujuh) produk unggulan Kabupaten Garut (penyamakan kulit, kerajinan kulit, dodol garut, kain sutera alam, minyak akar wangi, anyaman bambu, dan batik garutan).

Pengambilan Asosiasi dari ketujuh produk unggulan tersebut sebagai objek penelitian berkaitan dengan permasalahan penelitian yang mengkaji pelaksanaan kebijakan, kinerja bisnis dan efektivitas kelangsungan usaha dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Ketujuh produk unggulan tersebut usaha yang memiliki kinerja bisnis dan efektivitas usaha untuk menghasilkan produk berkualitas.
2. Memiliki tingkat adaptasi yang tinggi dengan kondisi pasar dan tuntutan mode (*fashion*) atau selera (*taste*) konsumen.
3. Asosiasi tersebut mengetahui mengenai kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan UMKM.

Adapun Asosiasi yang menaungi UMKM dalam 7 (tujuh) produk unggulan Kabupaten Garut tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Populasi Penelitian

No	Asosiasi	Jumlah Anggota
1	Asosiasi Kulit (APKUGA)	748
2	Asosiasi Anyaman Bambu Selaawi (ASABAWI)	280
3	Asosiasi Makanan Olahan (GAPURA)	628
4	Asosiasi Batik Garutan (ASBAGA)	127
5	Asosiasi Sutera Alam (ASULAM)	107
6	Asosiasi Minyak Akar Wangi (ASMAWA)	65
Total		1.955

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Kab. Garut, 2017.

3.6.2 Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Dalam suatu penelitian tidak selalu perlu meneliti semua individu dalam populasi, karena memakan biaya yang sangat besar, terbatasnya tenaga ahli serta memerlukan waktu yang lama, maka untuk mewakili populasi tersebut menggunakan sampel yang dapat dipandang representatif dan tidak bias (dalam Iskandar, 2017:230).

Dalam penelitian ini tidak mengambil seluruh anggota populasi, namun menggunakan *sampling* dengan menggunakan teknik non-probabilitas dan *Cluster Random Sampling*. Penggunaan *sampling* secara non probabilitas menurut Sekaran (2006:135-136) karena suatu pertimbangan tertentu yang memungkinkan mendapatkan data yang sesuai dan alasan pengambilan secara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan karena memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan peneliti. Sedangkan *Cluster Random Sampling* adalah teknik penarikan sampel yang terlebih dahulu mengolong-golongkan dalam kelompok yang sejenis, kemudian dirandom dari setiap golongan tersebut secara proporsional (dalam Sudrajat dan Achyar, 2012:81).

Untuk kepentingan penelitian ini maka unit analisis sebagai sampel penelitian (responden) adalah anggota Asosiasi atau Himpunan UMKM dengan pertimbangan bahwa anggota Asosiasi atau Himpunan UMKM tersebut dianggap mengetahui dan melaksanakan kebijakan pembinaan UMKM.

Umar (2013:78) menjelaskan untuk menentukan ukuran sampel dapat menggunakan metode Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

N = Ukuran populasi

n = Ukuran sampel

e = Nilai kritis (toleransi) sebesar 10%

Berdasarkan rumus pengambilan sampel tersebut, maka ditarik sampel atas populasi dalam penelitian ini dengan nilai kritis (e) yang ditetapkan sebesar 10 % sebagai berikut:

$$n = \frac{1.955}{1 + (1.955 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{1.955}{20,55}$$

$$n = 95,13 \approx 96$$

Hasil *sampling* dengan rumus Slovin tersebut secara proporsional dilakukan sebaran sampel yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Sebaran Sampel Penelitian

No	Asosiasi	Populasi	Perhitungan	Sampel
1	Asosiasi Kulit (APKUGA)	748	(748 : 1.955) x 96	37
2	Asosiasi Anyaman Bambu Selaawi (ASABAWI)	280	(280 : 1.955) x 96	14
3	Asosiasi Makanan Olahan (GAPURA)	628	(628 : 1.955) x 96	31
4	Asosiasi Batik Garutan (ASBAGA)	127	(127 : 1.955) x 96	6
5	Asosiasi Sutera Alam (ASULAM)	107	(107 : 1.955) x 96	5

6	Asosiasi Minyak Akar Wangi (ASMAWA)	65	$(65 : 1.955) \times 96$	3
		1.955	Jumlah	96

Sumber: Hasil Olah Data, 2017

Sebaran sampel yang dijadikan responden berdasarkan tabel 3.10 yang diproporsionalkan pada masing-masing Asosiasi ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Sebaran Sampel Berdasarkan Asosiasi

No	Nama UMKM	Asosiasi	No	Nama UMKM	Asosiasi
1	Kharisma Leather	APKUGA	52	Pabrik Abon Selera	GAPURA
2	Tresna	APKUGA	53	Syari'ah	GAPURA
3	Ade Kusyana	APKUGA	54	Olih	GAPURA
4	H. Uun	APKUGA	55	Aep Ozim	GAPURA
5	Ujang	APKUGA	56	Aep Ohin	GAPURA
6	Bareno	APKUGA	57	Aep	GAPURA
7	PD. As Jaya	APKUGA	58	Ukas	GAPURA
8	H. Ili Sadili	APKUGA	59	Siti	GAPURA
9	Usaha Produktif	APKUGA	60	Ekus	GAPURA
10	Mandiri	APKUGA	61	Ade Tisna	GAPURA
11	Bina Warga	APKUGA	62	Nunang	GAPURA
12	Sirna Galih	APKUGA	63	Ikin Aca	GAPURA
13	Karay Colection	APKUGA	64	Enih	GAPURA
14	WHY	APKUGA	65	Emu	GAPURA
15	PD. Kusnawan	APKUGA	66	Ibah	GAPURA
16	Shinsa	APKUGA	67	Eti	GAPURA
17	Karya Mandiri	APKUGA	68	Aca P	GAPURA
18	Mandala Putra	APKUGA	69	Aja	GAPURA
19	Mandiri	APKUGA	70	Tolib	GAPURA
20	Laksana	APKUGA	71	PD Jaya Putra	GAPURA
21	Dede Dermawan	APKUGA	72	Rina Alawi	GAPURA
22	PD. M Zone	APKUGA	73	Aas Asmanah	GAPURA
23	Muda- Mudi	APKUGA	74	Rd. Wiwin	GAPURA
24	Palenza	APKUGA	75	H. Jamal	GAPURA
25	Silvian	APKUGA	76	Nidah	GAPURA
26	Altova	APKUGA	77	Wajit Empit	GAPURA
27	H. Wasman	APKUGA	78	Sauyunan	GAPURA
28	Wafina	APKUGA	79	Dedah Jubaedah	GAPURA
29	Wahidin	APKUGA	80	Sinar Harapan	GAPURA
30	H. Rosid	APKUGA	81	Ohi	GAPURA

No	Nama UMKM	Asosiasi	No	Nama UMKM	Asosiasi
31	H. Rusmana	APKUGA	82	PD. Dodol Hade	GAPURA
32	H. Ejeb	APKUGA	83	PD. RM	ASBAGA
33	H. Imam	APKUGA	84	PD. SHD	ASBAGA
34	H. Dani	APKUGA	85	Ratnasari Batik Garutan	ASBAGA
35	CV. Chandra Mekar	APKUGA	86	Rasya Batik Garutan	ASBAGA
36	PD. Asgar Jaya	APKUGA	87	Batik Tulis Garut Asli	ASBAGA
37	PD. Astiga	APKUGA	88	Batik Garutan Abaz	ASBAGA
38	Komar	ASABAWI	89	PD. SAS	ASULAM
39	Engkos	ASABAWI	90	CV. AMSA	ASULAM
40	Madin	ASABAWI	91	PD. Aman Sahuri	ASULAM
41	Ipi	ASABAWI	92	PD. Sutra Alam	ASULAM
42	Etas	ASABAWI	93	PD. Sawargi	ASULAM
43	Ruhy	ASABAWI	94	PD. Sumber Wangi	ASMAWA
44	Ade Nuyama	ASABAWI	95	Pabrik Akar Wangi Haji Ade	ASMAWA
45	Enah	ASABAWI	96	Zocha Graha Kriya	ASMAWA
46	Dani	ASABAWI			
47	Pasar	ASABAWI			
48	Zaeni	ASABAWI			
49	PD. Wumel	ASABAWI			
50	PD. Barokah Ilahi	ASABAWI			
51	Pa Mamat	ASABAWI			

3.7 Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data serta Proses Pengumpulan Data

3.7.1 Jenis dan Sumber Data

Berikut adalah klasifikasi jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer, merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama, yaitu jawaban responden dengan bentuk angket/kuesioner dan hasil wawancara serta hasil observasi peneliti berupa data keadaan tentang pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM, kinerja bisnis, dan efektivitas kelangsungan usaha.

- b. Data Sekunder, berupa dokumentasi-dokumentasi seperti buku-buku, jurnal, literatur lainnya, yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk peraturan perundang-undangan, perda, kebijakan-kebijakan dan sebagainya.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara penyebaran angket (kuesioner) kepada responden selaku objek penelitian yang selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan statistik. Data primer bersumber dari hasil jawaban responden melalui kuisisioner berisikan item-item pertanyaan yang dilengkapi dengan alternatif jawaban yang disediakan untuk dijawab oleh responden sebagai objek penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen-dokumen yang diterbitkan para pihak yang berkompeten berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder bersumber dari lembaga-lembaga yang mengeluarkan dokumen dan publikasi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek penelitian, antara lain Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Kabupaten Garut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, BPS Kabupaten Garut, perpustakaan, dan jurnal ilmiah nasional maupun internasional.

3.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui:

1. Studi lapangan (*Field Research*)

Yaitu meneliti secara langsung variabel-variabel objek penelitian di lokasi yang telah ditentukan dengan teknik pengumpulan data berupa:

- a. Observasi, melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan mencatat secara sistematis data-data penunjang yang berkaitan dengan keperluan penelitian terutama mengenai kebijakan pembinaan UMKM, kinerja bisnis dan efektivitas kelangsungan usaha.
 - b. Angket/ Kuesioner, melakukan penyebaran angket/ kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis dengan disertai lima alternatif jawaban untuk setiap item pertanyaan, sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penyebaran angket/kuesioner dilakukan untuk pengumpulan data primer berkenaan dengan variabel-variabel penelitian, yaitu pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM, kinerja bisnis, dan efektivitas kelangsungan usaha. Data yang dikumpulkan akan memberikan kontribusi sangat besar dalam mendeskripsikan hasil penelitian.
 - c. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung/dialog dengan responden berkaitan dengan masalah penelitian guna memperoleh data yang tidak dapat dilakukan melalui observasi atau studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yaitu pemilik UMKM yang tergabung dalam asosiasi untuk menggali tentang kebijakan pembinaan UMKM, kinerja bisnis, dan efektivitas kelangsungan usaha serta hal lainnya yang berkaitan dengan fenomena masalah.
2. Studi dokumentasi/ kepustakaan

Yaitu pengambilan data sekunder dengan menggali dan mencari beberapa dokumen tentang: (a) data profil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi

dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, (b) data program-program yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, dan (c) dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

3.7.3 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur (kuisisioner) meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan meliputi :
 - a. Mengurus surat-surat perijinan yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai media pemberitahuan kepada para pihak dalam penelitian.
 - b. Melakukan uji validitas dan realibilitas terhadap alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian.
 - c. Melakukan rekrutmen tenaga pengumpul data, direncanakan 5 orang.
 - d. Memberikan pelatihan kepada tenaga pengumpul data dalam hal memberikan kemampuan pengetahuan baik tentang objek penelitian ataupun tentang apa yang akan diteliti, kecakapan melakukan riset terutama dalam keterampilan melakukan wawancara, membuat laporan dan keterampilan dalam berkomunikasi, serta sikap positif sebagai seorang ilmuwan terhadap ilmu pengetahuan, responden dan masalah yang dihadapi.
 - e. Melaksanakan uji coba teknik pengumpulan data ke lapangan oleh tim pengumpul data untuk mengestimasi waktu pengumpulan data.
 - f. Memperbanyak alat ukur penelitian sesuai dengan jumlah sampel.

kuesioner telah diisi dan dikembalikan kepada peneliti dan untuk selanjutnya akan dilakukan proses analisis data.

3.8 Teknik Pengolahan, Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian

3.8.1 Teknik Pengolahan Data

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan makna untuk menjawab masalah yang diteliti dan peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yang tepat terhadap hasil penelitiannya (dalam Iskandar, 2017:279).

Sementara data yang diperoleh dari data primer, pengolahan datanya melalui proses:

1. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan kembali kelengkapan pengumpulan data dan penyuntingan terhadap data yang diperoleh untuk mendapatkan data yang benar-benar otentik.
2. *Coding*, yaitu melakukan penggolongan, pengelompokkan dan memilah data berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mempermudah proses analisis data.
3. *Tabulating* yaitu menyusun data dalam bentuk tabel untuk digunakan dalam mengolah data kedalam tabel-tabel tertentu serta mengaturnya untuk keperluan analisis data dan pengujian hipotesis.

3.8.2 Proses Transformasi Data

Mengingat data yang diperoleh dari kuesioner adalah data ordinal sedangkan analisis data memerlukan data interval, maka terlebih dahulu data mentah yang telah terkumpul ditransformasikan menjadi data interval melalui metode MSI (*Method Successive Interval / Scale Value*) yaitu teknik penskalaan yang bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat pengukuran dari data ordinal ke interval, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghitung frekuensi jawaban dari masing-masing item pertanyaan.
2. Menentukan rasio proporsi melalui frekuensi dibagi jumlah responden.
3. Menghitung proporsi kumulatif yaitu menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respons atau jawaban.
4. Menghitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan menggunakan tabel normal.
5. Tentukan nilai interval (*scale value*) untuk setiap nilai Z dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SV(\text{Scale Value}) = \frac{ (\text{Density At Lower Limit}) - (\text{Density At Upper Limit}) }{ (\text{Area Under Upper Limit}) - (\text{Area Under Lower Limit}) }$$

6. Hitung *score* (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan : $SV_{\text{Transformasi}} = SV - SV_{\text{Minimum}} + 1$

3.8.3 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis Penelitian

Selanjutnya data yang telah diolah diidentifikasi untuk menguji hipotesis yang diajukan, kemudian dibahas secara mendalam untuk menggambarkan fenomena atas kasus yang dikaji dalam penelitian ini.

Berdasarkan identifikasi masalah dan hipotesis yang diajukan maka analisis data yang akan digunakan adalah analisis statistik dengan rumus *Path Analysis*. Iskandar (2017: 32) mengemukakan bahwa analisis jalur dimaksudkan untuk menguji hipotesis hubungan kausalitas (sebab akibat dan pengaruh).

Adapun langkah-langkah pengujian data dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) adalah sebagai berikut:

1. Menyusun matriks korelasi (R) antar variabel dengan variabel terikat (Z) serta variabel antara (Y) yang dipengaruhi oleh variabel bebas (X) serta faktor luar yang tidak teridentifikasi sebagai berikut :

$$R = \begin{bmatrix} r_{xx} & r_{yx} & r_{zx} \\ & r_{yy} & r_{zy} \\ & & r_{zz} \end{bmatrix}$$

$$r_{x_1x_i} = \frac{n \sum X_i X_i - \sum X_i \sum X_i}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - [\sum X_i]^2\} \{n \sum X_i^2 - [\sum X_i^2]\}}}$$

2. Menguji koefisien jalur P_{YX_i}

Hipotesis statistik :

$H_0 : P_{yix_i} \leq 0$ artinya pengaruh variabel X_i terhadap Y_i tidak signifikan

$H_1 : P_{yix_i} > 0$ artinya pengaruh variabel X_i terhadap Y_i signifikan

Statistik Uji :

$$t = \frac{P_{x_i x_i}}{\sqrt{\frac{1 - P_{x_i x_i}^2}{n - 2}}} \quad \text{dimana } P_{x_i x_i} = r_{x_i x_i}$$

Kriteria Uji : Tolak H_0 apabila $t > t_{(1-\alpha)(n-2)}$

3. Membuat invers korelasi (R^{-1})

$$R^{-1} \begin{bmatrix} C_{xx} & C_{yx} & C_{zx} \\ & C_{yy} & C_{zy} \\ & & C_{zz} \end{bmatrix}$$

4. Menghitung besarnya pengaruh

$$\rho_{ZX} = \frac{-C_{ZX}}{C_{ZZ}}$$

$$\rho_{ZY} = \frac{-C_{ZY}}{C_{ZZ}}$$

$$\rho_{ZXY}^2 = \rho_{ZX}r_{ZX} + \rho_{ZY}\rho_{ZY}$$

Menguji hipotesis keberartian koefisien jalur:

$$H_0 : \rho_{ZX} \leq 0 \text{ melawan } H_0 : \rho_{ZX} > 0$$

$$H_0 : \rho_{ZY} \leq 0 \text{ melawan } H_0 : \rho_{ZY} > 0$$

Statistik Uji :

$$t_x = \frac{P_{ZX}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n-k-1)(1 - R_{YX}^2)}}}$$

$$t_y = \frac{P_{ZY}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n-k-1)(1 - R_{YX}^2)}}}$$

Kriteria Uji :

Tolak H_0 apabila $t_{\text{hitung}} > t_{(1-\alpha)(n-k-1)}$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

5. Menentukan besar pengaruh variabel lain

Besar pengaruh variabel lain terhadap variabel Z

$$P_{X\epsilon 2} = \sqrt{1 - R_{ZXY}^2}$$

No	Kegiatan	2017								2018		
		Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar
5	Melakukan seminar usulan penelitian											
6	Perbaiki usulan penelitian											
7	Melakukan uji validitas dan reliabilitas											
8	Proses pengumpulan data											
9	Pengolahan dan analisis data											
10	Penyusunan hasil penelitian/ tesis											
11	Ujian sidang tesis											
12	Perbaiki tesis											
13	Publikasi tesis											

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejak krisis global dan ekonomi tahun 1997 serta krisis moneter tahun 2008 yang lalu, masalah sosial kritis di Indonesia semakin meningkat, yang ditandai antara lain meningkatnya kemiskinan absolut, pengangguran yang luas, disintegrasi sosial, konflik etnis, korupsi, kekerasan oleh negara, gerakan separatisme, kriminalitas, massa pengungsi yang semakin besar, marjinalisasi, ketimpangan sosial, ketidakadilan sosial, serta masalah-masalah sosial lain sebagai dampak negatif dari proses pembangunan.

Hal tersebut berdampak pula terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Garut dimana menurut proyeksi indikator makro 2015-2016 masih terdapat pengangguran terbuka dengan angka yang signifikan dari seluruh angkatan kerja Kabupaten Garut, belum termasuk pengangguran tersembunyi (*disguished unemployment*) yakni angkatan kerja yang meskipun sudah bekerja namun memiliki produktivitas rendah.

Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Garut terutama masalah-masalah terkait dengan ekonomi, baik dari pelaku-pelaku kebijakan dengan seperangkat birokrasinya maupun dari sisi masyarakatnya sendiri sedemikian rupa secara simultan dapat terinci sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kemampuan pengelolaan hasil produksi, penguatan modal dan jaringan pemasaran.

2. Rendahnya minat investasi, karena keterbatasan informasi, prosedur tidak sederhana, rendahnya dukungan infrastruktur, serta belum adanya jaminan keamanan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat.
 3. Masih banyaknya sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain sektor pertambangan, energi, kelautan dan pariwisata.
 4. Belum optimalnya pembinaan terhadap potensi-potensi ekonomi lokal.
 5. Belum optimalnya pemanfaatan sentra-sentra agroindustri.
 6. Belum optimalnya pengembangan UMKM dan Bank Syariah.
 7. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga BUMD.
- (Sumber : BAPPEDA Kabupaten Garut, 2017)

Inilah yang kemudian sedemikian rupa harus menjadi perhatian dari pelaku kebijakan di Kabupaten Garut pada umumnya, mengingat kondisi yang dominan dari peran UMKM bagi terwujudnya pembangunan Kabupaten Garut yang pada gilirannya dapat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemberdayaan ekonomi sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Garut, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan kebijakan berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pelatihan agar UMKM di Kabupaten Garut memiliki kualitas dan kinerja yang baik sehingga berdampak pada produktivitas UMKM serta dukungan bagi terwujudnya peningkatan efektivitas kelangsungan usaha UMKM khususnya di Kabupaten Garut.

Permasalahan yang muncul dengan terbitnya kebijakan pembinaan UMKM tersebut antara lain masih terdapat tumpang tindih pelaksanaan kebijakan

dan peran aktif UMKM masih rendah untuk mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh kedua Dinas tersebut, tingkat perkembangan UMKM relatif rendah dan manajerial pengelolaan usaha masih tradisional serta bersifat turun temurun, faktor penyerapan tenaga kerja (SDM) UMKM masih rendah sehingga berdampak kepada faktor produktivitas kerja relatif rendah, dan letak keberadaannya tidak diketahui karena tidak semua UMKM tersebut menjadi perusahaan formal yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral .Kabupaten Garut.

4.1.1 Keadaan Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Garut

UMKM dengan segala potensi yang dimilikinya merupakan angin segar sebagai solusi pembangunan yang akseleratif, karena selain keunggulan komparatif dibandingkan dengan sektor pertanian secara terpisah, mengingat mayoritas UMKM bergerak dibidang industri tetapi juga sektor ini dikualifikasikan banyak menyerap tenaga kerja serta produksi yang dibuat secara umum dan sudah memasyarakat sehingga pekerja memerlukan keterampilan. Disamping itu pengembangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Garut cukup besar.

Usaha Kecil Mikro dan Menengah di Kabupaten Garut telah berperan sebagai pelaku utama kegiatan-kegiatan ekonomi, penyedia kesempatan kerja dan penggerak ekonomi masyarakat. Dalam tahun-tahun mendatang diharapkan UMKM dapat memerankan peran baru sebagai pencipta pasar dan

mengembangkan perbaikan terhadap pendapatan asli daerah dan kestabilan perekonomian daerah.

Namun demikian UMKM dengan segala kemampuan yang dimilikinya memerlukan berbagai pembenahan terutama terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi UMKM di Kabupaten Garut, antara lain meliputi:

1. Masalah yang dihadapi UMKM perorangan:
 - a. Kurangnya pengetahuan teknologi produksi dan pengendalian mutu,
 - b. Kurangnya sumber daya manusia,
 - c. Kurangnya pengetahuan masyarakat,
 - d. Kurangnya pengetahuan manajemen termasuk keuangan dan akuntansi.
2. Sedangkan masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2017 dapat diprediksi tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti:
 - a. Lemahnya kelembagaan,
 - b. Hambatan regulasi,
 - c. Persaingan tidak sehat,
 - d. Belum berkembangnya lembaga-lembaga penyedia jasa layanan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),
 - e. Keterbatasan modal, pasar dan informasi,
 - f. Lemahnya daya saing.

(Sumber : Disperindag dan ESDM Kab.Garut, 2016)

Secara umum pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM sudah berjalan dengan baik yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral serta Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Kabupaten

Garut. Akan tetapi, apabila ditinjau dari sudut pandang profesional pelaksanaan, pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM tersebut masih belum optimal. Hal itu dikarenakan adanya beberapa permasalahan, diantaranya permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat tumpang tindih pelaksanaan kebijakan dan peran aktif UMKM masih rendah untuk mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh kedua Dinas tersebut.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kedua Dinas tersebut terdapat beberapa persamaan kebijakan-kebijakan yang diwujudkan menjadi program-program pembinaan, pelatihan dan pendidikan kepada UMKM, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan oleh masing-masing Dinas. Tentunya diperlukan koordinasi antara kedua Dinas tersebut agar pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM dapat lebih terfokus dan efektif dalam pelaksanaannya. Namun demikian dengan banyaknya program-program pembinaan, pelatihan dan pendidikan tersebut tidak sebanding dengan partisipasi UMKM untuk berperan aktif mengikuti program-program tersebut, antara lain dikarenakan tumpang tindihnya kebijakan pembinaan UMKM sehingga harus memilih salah satu Dinas yang melaksanakan, dan masih rendahnya motivasi pelaku atau pemilik UMKM untuk menghadiri program-program tersebut.

- b. Tingkat perkembangan UMKM relatif rendah dan manajerial pengelolaan usaha masih tradisional serta bersifat turun temurun.

Secara umum manajerial pengelolaan UMKM di Kabupaten Garut masih bersifat tradisional dan turun menurun dikarenakan usaha yang dijalannya

merupakan usaha keluarga dan dikelola oleh keluarga, artinya kemampuan manajerial berdasarkan pengalaman dan bergantian secara turun temurun. Tentunya kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat perkembangan UMKM. Disinilah peran pemangku dan pelaku kebijakan untuk berkontribusi membantu para pelaku atau pemilik UMKM untuk dapat meningkatkan kemampuan manajerial usaha melalui program-program pelatihan dan pendidikan.

- c. Faktor penyerapan tenaga kerja (SDM) UMKM masih rendah sehingga berdampak kepada faktor produktivitas kerja relatif rendah.

Fenomena masih rendahnya faktor produktivitas UMKM tersebut secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen serta informasi pasar. Kemampuan UMKM untuk berkembang saat ini belum merata, terutama karena terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang tersedia. Berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia tidak terlepas dari latar belakang pendidikannya, hal tersebut mempunyai korelasi dimana tingkat pendidikan dapat membedakan kompetensi sumber daya manusia. Paradigma ini dapat dilihat dilapangan dimana banyak sumber daya manusia yang terlibat dalam UMKM memiliki tingkat pendidikan dengan tamatan SD, SMP dan SMA, namun dengan jenjang Diploma atau Sarjana masih sangat rendah.

d. Letak keberadaannya tidak diketahui karena tidak semua UMKM tersebut menjadi perusahaan formal yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral .Kabupaten Garut.

Kondisi ini berkaitan dengan belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perijinan, pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, penataan lokasi usaha dan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya kemajuan daerah melaksanakan pemberdayaan koperasi dan UMKM

4.1.2 Kebijakan Pemerintah Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berkaitan dengan permasalahan pada uraian sebelumnya maka kebijakan pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM) berusaha untuk mencapai tujuan agar dapat menjawab kebutuhan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masyarakat sesuai dengan tuntutan ekonomi global serta pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berjalan lebih terarah, fokus, terpadu dan berkesinambungan, maka kebijakan pemerintah di Kabupaten Garut khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM) melakukan kebijakan-kebijakan demi terciptanya tujuan yang diharapkan.

Kebijakan-kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. Prioritas Kebijakan Pemerintah di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat tujuh program.

- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui dukungan kebijakan yang responsif terhadap persoalan dan kepentingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh dan berkembang baik kelembagaannya maupun usahanya.
 - b. Adapun kegiatannya antara lain:
 - 1) Penyelesaian perubahan UU Nomor 25 tahun 1995 tentang perkoperasian,
 - 2) Undang Undang tentang usaha kecil,
 - 3) Undang Undang / Peraturan / Ketentuan tentang Sub Kontrak,
 - 4) Waralaba,
 - 5) Kemitraan,
 - 6) Pengembangan perizinan yang efisien,
 - 7) Monitoring dan evaluasi.
2. Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- a. Mendorong kegiatan produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha yang unggul, kompetitif dan bermutu.
 - b. Adapun kegiatannya antara lain:
 - 1) Perkuatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor agrobisnis (termasuk peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, modal usaha secara kolektif, manajemen modern, sosialisasi, monitoring dan evaluasi),

- 2) Penerapan teknologi tepat guna,
 - 3) Peningkatan keterampilan SDM melalui diklat dan magang.
3. Pengembangan Sentra dan Lembaga Keuangan Non Bank bagi Koperasi dan UMKM.
- a. Menjaga dinamika perkembangan sentra menjadi sentra bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui perkuatan dukungan finansial dan non finansial, sehingga menjadi penggerak/lokomotif dalam pengembangan ekonomi lokal.
 - b. Keberadaan peningkatan layanan bisnis diharapkan dapat memberikan layanan kepada koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara fokus, kolektif, dan efisien, karena dengan sumber daya yang terbatas mampu menjangkau kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang lebih luas.
 - c. Adapun kegiatannya antara lain:
 - 1) Perkuatan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui KSP Koperasi, lembaga keuangan mikro, penjaminan kredit, dan dana bergulir seperti modal awal, kompensasi BBM, dan modal ventura.
 - 2) Pendampingan
 - 3) Dukungan dana penjaminan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 4) Pengembangan program pola penjaminan
 - 5) Diklat

- 6) Sosialisasi
 - 7) Monitoring dan evaluasi.
4. Pemberdayaan dan Penataan Usaha Mikro Sektor Informal.
 - a. Memfasilitasi dan memperkuat keberadaan serta peran usaha mikro dan sektor informal terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di perkotaan; perkuatan usaha mikro di daerah pasca kerusuhan; bencana alam dan kantong-kantong kemiskinan.
 - b. Adapun kegiatannya antara lain:
 - 1) Dukungan iklim kepastian usaha dan perlindungan melalui penertiban PERDA.
 - 2) Dukungan modal dengan dana bergulir, sarana usaha, pelatihan, dan bimbingan manajemen.
 - 3) Sosialisasi
 - 4) Monitoring dan evaluasi
 5. Pengembangan Lembaga Diklat SDM Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - a. Tujuannya untuk mengintensifkan peranan lembaga diklat bagi peningkatan kualitas SDM Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di masyarakat, di bidang peningkatan keterampilan manajerial, perkoperasian, kewirausahaan yang responsif terhadap tuntutan dunia usaha dan perubahan lingkungan strategis.
 - b. Adapun kegiatannya melalui:
 - 1) Dukungan insentif kepada lembaga diklat SDM,

- 2) Penyusunan modul diklat dan diklat pendampingan,
 - 3) Magang,
 - 4) Pengkaderan,
 - 5) Penelitian pengembangan sistem insentif,
 - 6) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi.
6. Perkuatan Jaringan Dasar Produk UMKM.
- a. Memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memperluas akses dan pangsa pasar melalui pengembangan dan penguatan lembaga pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); pengembangan jaringan usaha termasuk kemitraan dan memanfaatkan teknologi informasi.
 - b. Kemitraan dalam bentuk kerjasama inovatif, saling menguntungkan antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan usaha besar. Termasuk memperkuat jaringan warung masyarakat ke dalam pola grosir untuk memperkuat daya tawar dalam pengadaan produknya.
 - c. Adapun kegiatannya melalui:
 - 1) Pemanfaatan internet bagi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 2) Penyediaan *hardware* pada koperasi dalam sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 3) Penyusunan dan penggandaan brosur produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- 4) Penyusunan dan penggandaan direktori produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 5) Penyusunan profil usaha sukses (*success story*) UMKM
- 6) Pameran
- 7) Misi dagang
- 8) Fasilitasi forum untuk memperkuat daya tawar dan daya saing.
- 9) Pengembangan model kerjasama usaha.
- 10) Sosialisasi dan monitoring evaluasi.

Dalam rangka mencapai program kebijakan diatas, maka diperlukan kerjasama semua pihak terkait karena pembangunan ekonomi masyarakat adalah suatu proses yang panjang memerlukan kerangka ekonomi, politik dan sosial budaya bagi terjadinya pembangunan tersebut. Hal tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah mengingat karakter masyarakat yang beragam dengan segala aspek yang positif dan negatif terdapat dalam perilaku masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari. Kebijakan, kecermatan, empati, kerja keras dan tanggung jawab pelaku-pelaku kebijakan disertai perubahan masyarakat yang terus dinamis diikuti implementasi kebijakan yang riil merupakan suatu penunjang untuk solusi permasalahan yang ada sekaligus dapat terlaksananya pembangunan ekonomi yang diharapkan.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan berfungsi sebagai pemegang peran kepemimpinan dan dapat mengayoni seluruh lapisan masyarakat serta dalam mendukung terciptanya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya di atas apda intinya yang menjadi tugas dan fungsi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM) Kabupaten Garut diatur dengan Surat Keputusan Bupati Garut dengan nomor: 584 tahun 2014 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM) sebagai berikut:

A. Dinas

- 1) Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Baitul Mal Watamwil dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Tugas pokok dan fungsi dinas sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 tahun 2014.
- 3) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana diatur dalam pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 tahun 2015.

B. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan otonomi daerah bidang perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral sesuai visi, misi dan strategi pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.

- 2) Untuk menyelenggarakan uraian pokok sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan pengaturan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis operasional di bidang perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral.
 - b. Pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang meliputi program koperasi, pengembangan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.
- 3) Uraian tugas Kepala Dinas.
 - a. Merumuskan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi dinas.
 - b. Merumuskan sasaran dan program kerja bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan kebijakan teknis dinas.
 - c. Mendistribusikan tugas kepada para bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing.
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas.

- e. Membina para bawahan sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karir para bawahan.
 - f. Mengadakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas.
 - g. Memantau tugas para bawahan berdasarkan program kerja dinas.
 - h. Memeriksa konsep-konsep surat dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani.
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut.
 - j. Melaporkan pelaksanaan tugas unit kerja yang bersangkutan baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun insidental kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - k. Memberi saran dan pertimbangan menyangkut bidang tugas dinas.
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Kepala Dinas membawahi:
- a. Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Dinas Perindustrian
 - c. Sub Dinas Perdagangan
 - d. Dinas Koperasi
 - e. Sub Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - f. Cabang Dinas

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2 Karakteristik Responden

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah anggota Asosiasi atau Himpunan UMKM dengan pertimbangan bahwa anggota Asosiasi atau Himpunan UMKM tersebut dianggap mengetahui dan melaksanakan kebijakan pembinaan UMKM. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 orang. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini peneliti klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, lama usaha berdiri dan jumlah produksi/bulan.

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah pelaku atau pemilik UMKM yang tergabung dalam Asosiasi atau Himpunan UMKM, dapat diperoleh informasi mengenai sebaran jenis kelamin responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Pria	85	88.54
2	Wanita	11	11.46
Jumlah		96	100

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran jenis kelamin responden paling banyak adalah Pria berjumlah 85 orang atau 88,54% dari total keseluruhan responden, sedangkan wanita berjumlah 11 orang atau 11,46% dari total

keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari segi jenis kelamin, mayoritas responden sebagai pelaku usaha yaitu pria yang menggeluti Usaha Mikro Kecil dan Menengah, namun demikian wanita pun memiliki kesempatan untuk berusaha, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini dan dapat memberikan jawaban yang jelas sesuai dengan kepentingan penelitian.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah pelaku atau pemilik UMKM yang tergabung dalam Asosiasi atau Himpunan UMKM, dapat diperoleh informasi mengenai sebaran umur responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	< 25 tahun	2	2.08
2	25 - 30 tahun	11	11.46
3	31 - 35 tahun	33	34.38
4	36 - 40 tahun	12	12.50
5	41 - 45 tahun	14	14.58
6	46 - 50 tahun	10	10.42
7	51 - 55 tahun	8	8.33
8	> 55 tahun	6	6.25
Jumlah		96	100

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel di atas diperoleh gambaran umur responden paling banyak pada kisaran 31 - 35 tahun yaitu berjumlah 33 orang atau 34,38% dari total keseluruhan responden. Sedangkan yang paling sedikit pada kisaran < 25 tahun yaitu berjumlah 2 orang, atau hanya 2,08% dari total keseluruhan. Hal ini

menunjukkan bahwa dilihat dari segi usia, keseluruhan responden berada dalam umur dewasa dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini dan dapat memberikan jawaban yang jelas sesuai dengan kepentingan penelitian.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah pelaku atau pemilik UMKM yang tergabung dalam Asosiasi atau Himpunan UMKM, dapat diperoleh informasi mengenai tingkat pendidikan responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	0	0.00
2	SMP / sederajat	17	17.71
3	SMA / sederajat	47	48.96
4	Diploma (D3)	19	19.79
5	Sarjana (S1)	13	13.54
6	Magister (S2)	0	0.00
7	Doktor (S3)	0	0.00
Jumlah		96	100

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden pada umumnya berada pada jenjang SMA/Sederajat sebanyak 47 orang atau 48,96% dari keseluruhan responden. Sedangkan tingkat pendidikan responden dengan jenjang akademi dan perguruan tinggi relatif sedikit yaitu Diploma sebanyak 19 orang atau 19,79%, dan Sarjana sebanyak 13 orang atau 13,54%. Hal ini dapat menggambarkan bahwa rata-rata responden mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang cukup memadai terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga

tanggapan responden untuk menjawab kusioner penelitian yang dilakukan mempunyai akurasi yang baik.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Berdiri

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah pelaku atau pemilik UMKM yang tergabung dalam Asosiasi atau Himpunan UMKM, dapat diperoleh informasi mengenai sebaran lama usaha berdiri dari responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Berdiri

No	Lama Usaha Berdiri	Jumlah	Persentase (%)
1	< 1 tahun	4	4.17
2	1 - 5 tahun	41	42.71
3	6 - 10 tahun	48	50.00
4	> 10 tahun	3	3.13
Jumlah		96	100

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa modus masa kerja responden ada pada interval lama usaha berdiri 6 – 10 tahun, yaitu sebanyak 48 orang atau sebesar 50,00%, dan 1 – 5 tahun, yaitu sebanyak 41 orang atau sebesar 42,71, dari keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden berada pada masa sudah cukup berpengalaman mengelola perusahaan dan cukup memahami permasalahan yang diteliti sehingga dianggap jawaban responden mempunyai akurasi yang baik.

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Produksi/Bulan

Berdasarkan sebaran angket yang dilakukan kepada responden dalam hal ini adalah pelaku atau pemilik UMKM yang tergabung dalam Asosiasi atau Himpunan UMKM, dapat diperoleh informasi mengenai sebaran jumlah Produksi/Bulan dari responden. Informasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Produksi/Bulan

No	Jumlah Produksi/bulan	Jumlah	Persentase (%)
1	< Rp. 5 juta	0	0.00
2	Rp. 5 juta - Rp.15 juta	4	4.17
3	Rp. 16 juta - Rp. 30 juta	2	2.08
4	Rp. 31 juta - Rp. 45 juta	15	15.63
5	Rp. 46 juta - Rp. 60 juta	26	27.08
6	Rp. 61 juta - Rp. 75 juta	37	38.54
7	Rp. 75 juta - Rp. 90 juta	9	9.38
8	> Rp. 90 juta	3	3.13
Jumlah		96	100

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa modus Jumlah Produksi/Bulan responden berada pada interval Rp. 61 juta – Rp. 75 juta, sebanyak 37 orang atau 38,54%, interval Rp. 46 juta - Rp. 60 juta sebanyak 26 orang atau sebesar 27,08% dan interval Rp. 31 juta - Rp. 45 juta sebanyak 15 orang atau sebesar 15,63% dari keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden telah berpengalaman mengelola produksi perusahaan dan dianggap mampu untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, sehingga akurasi dari jawaban yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

4.3 Deskripsi Hasil Penelitian

Untuk mengetahui kondisi variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM, Kinerja Bisnis, dan Efektivitas Kelangsungan Usaha, maka dilakukan

pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Dari jawaban tersebut, kemudian disusun kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Nilai kumulatif adalah jumlah nilai dari setiap item pertanyaan yang merupakan jawaban dari 96 responden.
2. Persentase adalah nilai kumulatif item dibagi dengan nilai frekuensinya dikalikan dengan 100%.
3. Jumlah responden adalah 96 orang, dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 5, sedangkan skala pengukuran terkecil adalah 1, sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:
 - a. Jumlah kumulatif nilai terbesar = $96 \times 5 = 480$
 - b. Jumlah kumulatif nilai terkecil = $96 \times 1 = 96$
 - c. Nilai Persentase terbesar adalah = $(480/480) \times 100\% = 100\%$
 - d. Nilai persentase terkecil = $(96/480) \times 100\% = 20\%$,
 - e. Dari kedua nilai persentase tersebut diperoleh nilai rentang = $100\% - 20\% = 80\%$ dan jika dibagi dengan 5 skala pengukuran didapat nilai interval persentase sebesar = $(80\%)/5 = 16\%$ sehingga diperoleh klasifikasi kriteria penilaian persentase sebagai berikut:

Tabel 4.6
Kriteria Penilaian Berdasarkan Persentase

No	Persentase (%)	Kriteria Penilaian
1	20 - 35,99	Sangat kurang baik
2	36 - 51,99	Kurang baik

3	52 - 67,99	Cukup baik
4	68 - 83,99	Baik
5	84 - 100	Sangat baik

4.3.1 Variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Untuk mengetahui kondisi variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 28 pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 28 pernyataan tentang Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Kriteria Penilaian Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
1	Pelaksanaan kebijakan pembinaan kepada UMKM sudah sesuai prosedur	400	83.33	Baik
2	Penerapan kebijakan pembinaan UMKM dilengkapi dengan prosedur yang telah ditetapkan	363	75.63	Baik
3	Kebijakan pembinaan UMKM sesuai dengan aturan/norma yang berlaku	370	77.08	Baik
4	Pelaksanaan kebijakan pembinaan bagi UMKM memiliki landasan aturan/norma yang jelas	390	81.25	Baik
5	Informasi kebijakan pembinaan UMKM bersifat terbuka bagi semua UMKM	305	63.54	Cukup baik
6	Penyampaian informasi kebijakan pembinaan UMKM sudah dilaksanakan dengan baik sehingga mudah memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut	359	74.79	Baik
7	Kebijakan pembinaan UMKM sudah disertai petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga mudah dimengerti	347	72.29	Baik
8	Informasi kebijakan pembinaan UMKM sudah memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi dari kebijakan	390	81.25	Baik

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
9	Pelayanan informasi tentang kebijakan pembinaan UMKM sudah dilaksanakan dengan baik	312	65.00	Cukup baik
10	Informasi kebijakan pembinaan UMKM dapat diakses oleh umum dengan mudah	315	65.63	Cukup baik
11	Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM sudah sesuai dengan tata kelola administrasi yang dipersyaratkan	366	76.25	Baik
12	Materi-materi dalam kebijakan pembinaan UMKM dapat dipertanggungjawabkan secara administratif	364	75.83	Baik
13	Informasi yang terkandung dalam kebijakan pembinaan UMKM sudah sesuai dengan kebutuhan UMKM	346	72.08	Baik
14	Secara substantif kebijakan pembinaan UMKM dapat diterapkan pada berbagai karakteristik UMKM	373	77.71	Baik
15	Isi kebijakan pembinaan UMKM sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	374	77.92	Baik
16	Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM memiliki dasar hukum yang jelas	390	81.25	Baik
17	Kebijakan pembinaan bersifat tidak diskriminatif kepada semua UMKM	347	72.29	Baik
18	Setiap UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pembinaan dari instansi terkait	364	75.83	Baik
19	Pelayanan pada pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM dilakukan tidak membedakan SARA	337	70.21	Baik
20	Fasilitas materi pembinaan UMKM diberikan tanpa memandang salah satu faktor SARA	345	71.88	Baik
21	Materi pembinaan UMKM berdasarkan kebutuhan yang berasal dari aspirasi masyarakat	390	81.25	Baik
22	Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM disesuaikan dengan aspirasi masyarakat	310	64.58	Cukup baik
23	Kebijakan pembinaan untuk meningkatkan kinerja UMKM berlandaskan kebutuhan masyarakat	366	76.25	Baik
24	Kebijakan pembinaan UMKM diterapkan karena adanya kebutuhan masyarakat	350	72.92	Baik
25	Kajian materi pembinaan UMKM dengan memperhatikan kepentingan masyarakat	390	81.25	Baik
26	Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM disesuaikan dengan kepentingan masyarakat	366	76.25	Baik
27	Harapan masyarakat dengan adanya kebijakan pembinaan menjadikan UMKM yang kuat dan mandiri	394	82.08	Baik
28	Dengan adanya kebijakan pembinaan merupakan perwujudan harapan masyarakat agar UMKM berubah kearah yang lebih baik	350	72.92	Baik
Jumlah			2098.54	
Rata-Rata			74.95	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM adalah baik yaitu sebesar 74,95% dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut. Berdasarkan jawaban responden tersebut, Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM secara umum dianggap memuaskan.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi pada butir item nomor 1, yaitu: *Pelaksanaan kebijakan pembinaan kepada UMKM sudah sesuai prosedur*, sebesar 83,33%, dengan kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut secara umum oleh para responden dianggap baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, setiap pelaku atau pemilik UMKM memiliki tanggapan mengenai pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM yang diterimanya telah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur dalam pelaksanaannya. Sehingga secara umum proses pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden menunjukkan bahwa pelaku atau pemilik UMKM memiliki komitmen yang cukup kuat untuk bersama-sama mengoptimalkan fungsi pelaksanaan pembinaan sebagai suatu wahana perbaikan bagi kinerja bisnis sehingga usahanya dapat berkembang.

Selanjutnya persentase terendah terdapat pada butir item nomor 5, yaitu *Informasi kebijakan pembinaan UMKM bersifat terbuka bagi semua UMKM*, sebesar 63,54%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, informasi kebijakan pembinaan UMKM bersifat terbuka bagi semua belum sepenuhnya dapat diakses oleh semua pelaku atau pemilik UMKM, sehingga secara umum responden menganggap sebagai butir item terendah dan termasuk

kategori cukup baik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, umumnya informasi kebijakan belum bersifat terbuka bagi semua pelaku atau pemilik UMKM, hal ini berkaitan dengan status pelaku atau pemilik UMKM yang belum menjadi anggota Asosiasi atau Himpunan UMKM dan belum terdaftar pada Dinar Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag dan ESDM). Menurut hasil wawancara, beberapa responden menjawab bahwa sebelum tergabung dengan Asosiasi atau Himpunan UMKM dan terdaftar pada Disperindag dan ESDM maka informasi yang diperoleh masih terbatas aksesnya, sedangkan sesudah bergabung dan terdaftar maka akses informasi jauh lebih luas dan terbuka.

Selanjutnya, untuk mengetahui lebih jelas dan terperinci jawaban responden dari setiap dimensi variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM, rincian dan penjelasan setiap dimensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

4.3.1.1 Dimensi Konsistensi

Untuk mengetahui kondisi dimensi konsistensi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 (empat) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Kriteria Penilaian Dimensi Konsistensi

No Item	Tentang	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
---------	---------	------------------	------------	----------

1	Pelaksanaan kebijakan pembinaan kepada UMKM sudah sesuai prosedur	400	83.33	Baik
2	Penerapan kebijakan pembinaan UMKM dilengkapi dengan prosedur yang telah ditetapkan	363	75.63	Baik
3	Kebijakan pembinaan UMKM sesuai dengan aturan/norma yang berlaku	370	77.08	Baik
4	Pelaksanaan kebijakan pembinaan bagi UMKM memiliki landasan aturan/norma yang jelas	390	81.25	Baik
Jumlah			317.29	
Rata-rata			79.32	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel 4.7, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi konsistensi rata-rata penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 79,32% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi konsistensi, secara umum konsistensi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan pembinaan UMKM dianggap baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item *Pelaksanaan kebijakan pembinaan kepada UMKM sudah sesuai prosedur*, sebesar 83,33%, dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, aparat pelaksana kebijakan pembinaan UMKM dalam melaksanakannya sudah sesuai prosedur dan berjalan dengan baik, sehingga responden memberikan jawaban terhadap pernyataan dalam kuesioner dengan kriteria baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, hasilnya menunjukkan bahwa responden yang terdiri dari para pelaku atau pemilik UMKM telah memiliki konsistensi yang cukup kuat untuk bersama-sama mengoptimalkan hasil kebijakan pembinaan UMUM untuk meningkatkan kinerja bisnis mereka agar usahanya dapat berkembang.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item *Penerapan kebijakan pembinaan UMKM dilengkapi dengan prosedur yang telah ditetapkan*, dengan

Persentase sebesar 75,63%, dan termasuk kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, penerapan kebijakan pembinaan UMKM dilengkapi dengan prosedur yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dilaksanakan untuk semua UMKM terutama yang belum bergabung dalam asosiasi atau himpunan serta belum terdaftar pada Diperindag dan ESDM, sehingga secara umum responden menganggap sebagai butir item terendah. Namun demikian, secara Persentase butir item ini termasuk kategori baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, beberapa responden menjawab bahwa penerapan kebijakan pembinaan UMKM dilengkapi dengan prosedur yang telah ditetapkan masih perlu diperbaiki, sehingga pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM dapat dilaksanakan lebih optimal.

4.3.1.2 Dimensi Transparansi

Untuk mengetahui kondisi dimensi sumber daya, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 (delapan) pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-8 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9
Kriteria Penilaian Dimensi Transparansi

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
5	Informasi kebijakan pembinaan UMKM bersifat terbuka bagi semua UMKM	305	63.54	Cukup baik
6	Penyampaian informasi kebijakan pembinaan UMKM sudah dilaksanakan dengan baik sehingga mudah memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut	359	74.79	Baik
7	Kebijakan pembinaan UMKM sudah disertai petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga mudah	347	72.29	Baik

	dimengerti			
8	Informasi kebijakan pembinaan UMKM sudah memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi dari kebijakan	390	81.25	Baik
9	Pelayanan informasi tentang kebijakan pembinaan UMKM sudah dilaksanakan dengan baik	312	65.00	Cukup baik
10	Informasi kebijakan pembinaan UMKM dapat diakses oleh umum dengan mudah	315	65.63	Cukup baik
Jumlah			422.50	
Rata-rata			70.42	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel 4.9, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi trnsparansi, rata-rata penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 70,42% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi ini, secara umum dimensi transparansi sudah dianggap baik oleh para responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item *Informasi kebijakan pembinaan UMKM sudah memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi dari kebijakan*, dengan persentase 81,25% dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut secara umum informasi kebijakan pembinaan UMKM dapat memberikan gambaran mengenai isi dari kebijakan tersebut karena informasi kebijakan tersebut sesuai dengan pelaksanaan programnya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, rata-rata responden sudah mengetahui secara umum informasi mengenai isi kebijakan tersebut sehingga responden dapat mengetahui program-program yang akan dilaksanakan berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, para responden membenarkan sudah mengetahui secara umum kebijakan pembinaan UMKM yang akan mereka ikuti, hal ini diperkuat oleh beberapa rsponden yang sering mengikuti program

pembinaan yang menyatakan bahwa pada dasarnya kebijakan pembinaan tidak terlepas dari program pembinaan yang akan dilaksanakan.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item *Informasi kebijakan pembinaan UMKM bersifat terbuka bagi semua UMKM*, dengan persentase 63,53%, dan termasuk ke dalam kategori cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, informasi kebijakan pembinaan UMKM belum semuanya bersifat terbuka terutama bagi UMKM yang belum terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, akses yang luas terhadap informasi yang berkaitan dengan UMKM baru sebatas yang terdaftar di Disperindag dan ESDM karena berkaitan dengan legalitas usaha.. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa sebelum terdaftar di Disperindag dan ESDM akses informasi hanya sebatas informasi umum berkaitan UMKM tetapi setelah terdaftar maka akses dapat lebih luas dan terbuka untuk mengetahui informasi yang ingin diketahui.

4.3.1.3 Dimensi Akuntabilitas

Untuk mengetahui kondisi dimensi disposisi atau sikap dan perilaku aparatur, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-8 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.10

Kriteria Penilaian Dimensi Akuntabilitas

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
11	Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM sudah sesuai dengan tata kelola administrasi yang dipersyaratkan	366	76.25	Baik
12	Materi-materi dalam kebijakan pembinaan UMKM dapat dipertanggungjawabkan secara administratif	364	75.83	Baik
13	Informasi yang terkandung dalam kebijakan pembinaan UMKM sudah sesuai dengan kebutuhan UMKM	346	72.08	Baik
14	Secara substantif kebijakan pembinaan UMKM dapat diterapkan pada berbagai karakteristik UMKM	373	77.71	Baik
15	Isi kebijakan pembinaan UMKM sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	374	77.92	Baik
16	Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM memiliki dasar hukum yang jelas	390	81.25	Baik
Jumlah			461.04	
Rata-rata			76.84	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel 4.10, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi akuntabilitas, rata-rata penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 76,84% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi ini, maka akuntabilitas kebijakan pembinaan dan pelaksanaannya secara umum dianggap baik oleh responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 16 yaitu *Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM memiliki dasar hukum yang jelas*, dengan persentase 81,25% dan termasuk dalam kriteria sangat baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, konsultasi dan evaluasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga responden menjawab sangat baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan oleh dinas terkait sudah mempunyai dasar

hukum yang jelas, walaupun kedua dinas tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan pada waktu dan konsep pembinaan yang berbeda. Namun secara umum sudah memenuhi kebutuhan dan kepentingan para pemilik usaha atau UMKM.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 13 yaitu *Informasi yang terkandung dalam kebijakan pembinaan UMKM sudah sesuai dengan kebutuhan UMKM*, dengan persentase 72,08%, dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, tidak semua responden menilai bahwa informasi yang terkandung dalam kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan UMKM, akan tetapi sebagian responden menilai bahwa informasi dalam kebijakan pembinaan tersebut terkadang mengulang apa yang sudah dilakukan sebelumnya dan belum memenuhi kebutuhan UMKM yang masih belum lama berdiri. Berdasarkan hasil observasi dilapangan kepada responden, informasi kebijakan pembinaan terkesan mengulang apa yang pernah dilakukan oleh dinas terkait. Hasil wawancara kepada responden menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan UMKM dikarenakan keterbatasan akses informasi.

4.3.1.4 Dimensi Keadilan

Untuk mengetahui kondisi dimensi keadilan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 4 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-4 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.11

Kriteria Penilaian Dimensi Keadilan

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
17	Kebijakan pembinaan bersifat tidak diskriminatif kepada semua UMKM	347	72.29	Baik
18	Setiap UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pembinaan dari instansi terkait	364	75.83	Baik
19	Pelayanan pada pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM dilakukan tidak membedakan SARA	337	70.21	Baik
20	Fasilitas materi pembinaan UMKM diberikan tanpa memandang salah satu faktor SARA	345	71.88	Baik
Jumlah			290.21	
Rata-rata			72.55	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel 4.11, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi keadilan, rata-rata penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 75,55% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi keadilan secara umum dinilai baik oleh para responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 18 yaitu *Setiap UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pembinaan dari instansi terkait*, dengan persentase 75,83% dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, setiap UMKM yang tergabung dalam Asosiasi atau Himpunan dan terdaftar pada Dinas Disperindag dan ESDM memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pembinaan dari instansi terkait, namun tergantung partisipasi dari UMKM itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, mengatakan bahwa selama ini menerima pemberitahuan atau undangan dari instansi terkait untuk mengikuti kegiatan pembinaan UMKM. Hal tersebut tidak terlepas dari data-data

UMKM yang terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, sehingga dapat diketahui dan memudahkan pemberitahuan atau undangan kepada masing-masing UMKM.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 19 yaitu *Pelayanan pada pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM dilakukan tidak membedakan SARA*, dengan persentase 70,21%, dan termasuk dalam kategori baik.

Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, bahwa pelayanan pada pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM pada prinsipnya tidak membedakan SARA, namun secara administrasi karena masih banyak UMKM yang belum tergabung dengan Asosiasi atau Himpunan dan terdaftar pada Disperindag dan ESDM Kabupaten Garut maka mereka tidak dapat mengikuti kegiatan pembinaan UMKM tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, pada dasarnya para pelaksana kegiatan pembinaan UMKM memberikan pelayanan yang sama kepada para UMKM yang mengikuti pembinaan, memang dikarenakan data UMKM yang belum terdaftar menjadi suatu masalah untuk mengetahui lokasi atau tempat usaha mereka sehingga menyulitkan untuk memberikan informasi atau undangan kegiatan pembinaan tersebut. Hal tersebut dimungkinkan karena faktor keaktifan dan kesadaran para pemilik UMKM untuk mendaftarkan diri. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa sewaktu belum bergabung dengan Asosiasi atau Himpunan dan mendaftarkan pada Disperindag dan ESDM Kabupaten Garut maka informasi atau undangan mengenai kegiatan pembinaan UMKM tidak

menerimanya, tetapi setelah bergabung dan terdaftar secara berkala memperoleh informasi atau undangan berkaitan dengan pembinaan UMKM.

4.3.1.5 Dimensi Partisipatif

Untuk mengetahui kondisi dimensi partisipatif, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-8 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12
Kriteria Penilaian Dimensi Partisipatif

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
21	Materi pembinaan UMKM berdasarkan kebutuhan yang berasal dari aspirasi masyarakat	390	81.25	Baik
22	Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM disesuaikan dengan aspirasi masyarakat	310	64.58	Cukup baik
23	Kebijakan pembinaan untuk meningkatkan kinerja UMKM berlandaskan kebutuhan masyarakat	366	76.25	Baik
24	Kebijakan pembinaan UMKM diterapkan karena adanya kebutuhan masyarakat	350	72.92	Baik
25	Kajian materi pembinaan UMKM dengan memperhatikan kepentingan masyarakat	390	81.25	Baik
26	Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM disesuaikan dengan kepentingan masyarakat	366	76.25	Baik
27	Harapan masyarakat dengan adanya kebijakan pembinaan menjadikan UMKM yang kuat dan mandiri	394	82.08	Baik
28	Dengan adanya kebijakan pembinaan merupakan perwujudan harapan masyarakat agar UMKM berubah kearah yang lebih baik	350	72.92	Baik
Jumlah			607.50	
Rata-rata			75.94	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi keadilan, rata-rata penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 75,94% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi partisipatif secara umum dinilai baik oleh para responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 27 yaitu *Harapan masyarakat dengan adanya kebijakan pembinaan menjadikan UMKM yang kuat dan mandiri*, dengan persentase 82,08% dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, masyarakat memiliki harapan besar dengan adanya kebijakan pembinaan UMKM sehingga menjadi UMKM yang kuat dan mandiri karena dapat memberikan kontribusi kepada Kabupaten Garut baik dari sisi Pendapatan Asli Daerah maupun memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Garut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, mengatakan bahwa dengan adanya pembinaan UMKM yang mereka peroleh selama ini dapat membantu dan meningkatkan sisi manajerial maupun produksi. Tentunya hal tersebut sesuai dengan harapan masyarakat agar UMKM di Kabupaten Garut menjadi kuat dan mandiri dalam memproduksi produk UMKM maupun produk unggulan yang berkualitas dari Kabupaten Garut dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 22 yaitu *Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM disesuaikan dengan aspirasi masyarakat*, dengan persentase 64,58%, dan termasuk dalam kategori cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, bahwa pelaksanaan

kebijakan pembinaan UMKM belum tentu sesuai dengan aspirasi masyarakat khususnya UMKM, namun pada dasarnya kegiatan pembinaan tersebut sangat membantu UMKM untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada responden, bahwa pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM secara umum sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau UMKM, namun mereka menyadari bahwa kegiatan pembinaan UMKM tersebut juga merupakan program dinas terkait yang sudah direncanakan atau diagendakan sesuai dengan program kerja dinas terkait. Namun hal ini tidak terlepas dari partisipasi para pemilik UMKM untuk selalu *update* informasi agar mereka mengetahui program-program pembinaan UMKM secara berkala dan berkelanjutan

4.3.2 Variabel Kinerja Bisnis

Untuk mengetahui kondisi variabel Kinerja Bisnis, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 38 pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 38 pernyataan tentang variabel Kinerja Bisnis sebagai berikut:

Tabel 4.13
Kriteria Penilaian Variabel Kinerja Bisnis

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
29	Perusahaan memiliki kemampuan membuat desain produk sesuai dengan mutu yang ditetapkan	371	77.29	Baik
30	Perusahaan memiliki kemampuan menetapkan kualitas produk sesuai dengan keinginan pasar	322	67.08	Cukup baik
31	Perusahaan memiliki kemampuan mendesain tampilan produk sesuai dengan kualitasnya	340	70.83	Baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
32	Kemasan produk memiliki tampilan yang menarik perhatian konsumen	370	77.08	Baik
33	Perusahaan memiliki kemampuan membuat produk dengan daya tahan yang lama	371	77.29	Baik
34	Kemampuan perusahaan menciptakan produk berdaya tahan lama tanpa bahan pengawet atau kimia	371	77.29	Baik
35	Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dari hasil produksi	340	70.83	Baik
36	Dengan kinerja perusahaan saat ini mampu meningkatkan pendapatan	317	66.04	Cukup baik
37	Perusahaan memiliki kemampuan dalam hal efisiensi biaya produksi dan operasional	318	66.25	Cukup baik
38	Kemampuan perusahaan melakukan efisiensi berdampak pada kinerja perusahaan	340	70.83	Baik
39	Perusahaan memiliki strategi untuk meningkatkan keuntungan dari hasil produksi	371	77.29	Baik
40	Kemampuan untuk meningkatkan keuntungan berdampak pada kinerja perusahaan	340	70.83	Baik
41	Perusahaan memiliki kemampuan pengelolaan pelanggan sehingga dapat meningkatkan jumlah pelanggan	316	65.83	Cukup baik
42	Dengan tata kelola pelanggan yang baik memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan	367	76.46	Baik
43	Perusahaan memiliki kemampuan melalui kualitas produk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan	375	78.13	Baik
44	Peningkatan kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan kondisi kinerja perusahaan saat ini.	340	70.83	Baik
45	Perusahaan memiliki kemampuan untuk menambah atribut produk melalui tampilan kemasan yang lebih bervariasi	315	65.63	Cukup baik
46	Kemampuan perusahaan meningkatkan atribut produk mengikuti aturan yang berlaku	340	70.83	Baik
47	Perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan citra dan reputasi produk melalui inovasi produk	371	77.29	Baik
48	Citra dan reputasi produk yang dimiliki perusahaan saat ini dapat diterima oleh konsumen	340	70.83	Baik
49	Perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan proses perubahan pada bagian produksi	323	67.29	Cukup baik
50	Perusahaan dapat mengadopsi teknologi untuk meningkatkan proses perubahan bahan mentah menjadi bahan jadi	370	77.08	Baik
51	Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan proses operasional dengan kondisi perusahaan saat ini	390	81.25	Baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
52	Adanya teknologi dan proses produksi canggih saat ini dapat meningkatkan proses operasional perusahaan	340	70.83	Baik
53	Perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan produktivitas dengan kondisi perusahaan saat ini	314	65.42	Cukup baik
54	Teknologi dan proses produksi yang digunakan saat ini oleh perusahaan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan	340	70.83	Baik
55	Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kompetensi pegawainya	370	77.08	Baik
56	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan sudah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan	371	77.29	Baik
57	Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawainya	361	75.21	Baik
58	Perusahaan sudah membuat aturan dan tata tertib untuk mendisiplinkan pegawainya	371	77.29	Baik
59	Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan motivasi pegawai	340	70.83	Baik
60	Peningkatan motivasi pegawai sudah dilakukan perusahaan sesuai aturan dan norma yang berlaku	371	77.29	Baik
61	Perusahaan memiliki kemampuan menyampaikan dengan cepat produk atau jasa ke pasar	344	71.67	Baik
62	Kemampuan kecepatan penyampaian produk atau jasa sudah dilakukan dengan baik oleh bagian pemasaran	375	78.13	Baik
63	Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penjualan hasil produksi	340	70.83	Baik
64	Target peningkatan penjualan dapat dicapai oleh perusahaan	340	70.83	Baik
65	Perusahaan memiliki kemampuan untuk memperluas pasar	370	77.08	Baik
66	Bagian pemasaran sudah melakukan perluasan pasar untuk meningkatkan penjualan	375	78.13	Baik
Jumlah			2779.17	
Rata-Rata			73.14	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, hal ini dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden pada variabel Kinerja Bisnis adalah baik yaitu sebesar 73,14% dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut, yang dapat peneliti dapat simpulkan bahwa Kinerja Bisnis UMKM secara umum dianggap sudah baik .Artinya pemilik

UMKM telah menjalankan usahanya dan berdasarkan jawaban responden memiliki kinerja yang baik.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item butir 51 yaitu *Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan proses operasional dengan kondisi perusahaan saat ini*, yaitu sebesar 81,25% dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, para pemilik usaha atau UMKM memiliki kemampuan untuk meningkatkan proses operasioal dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini diketahui bahwa pasokan bahan baku beberapa produk mengalami pasang surut baik kuantitas, kualitas maupun harga, sehingga mau tidak mau setiap UMKM harus tetap berproduksi dan berusaha memenuhi permintaan pasar atau konsumen. Selain itu kemampuan dalam proses produksi sudah mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas setelah para pemilik UMKM mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan baik manajerial maupun produksi.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat terlihat beberapa responden atau pemilik UMKM sudah dapat menerapkan hasil pembinaan dimana mereka melakukan pembenahan manajerial dan proses produksi untuk menghasilkan produk berkualitas. Berdasarkan hasil wawancara, responden menjawab bahwa kemampuan meningkatkan proses operasional dan produksi dalam kondisi perusahaan saat ini tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan pembinaan yang membantu pembenahan dan perbaikan kondisi perusahaan atau UMKM menjadi lebih kuat dan mandiri.

Selanjutnya persentase terendah terdapat pada item butir 53 yaitu *Perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan produktivitas dengan kondisi perusahaan saat ini*, sebesar 65,42%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, kemampuan perusahaan meningkatkan produktivitas belum optimal berkaitan dengan kondisi perusahaan saat ini yang mengalami banyak tekanan dari luar terutama berkaitan dengan pasokan bahan baku baik kualitas, kuantitas dan harga. Oleh karenanya, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai butir item terendah dibandingkan butir item lainnya pada variabel Kinerja Bisnis dan termasuk kategori cukup baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, umumnya tidak semua pemilik UMKM memiliki kemampuan yang sama dalam meningkatkan produktivitas perusahaannya, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satu diantaranya yaitu pengalaman menjalankan usaha setiap pemilik berbeda. Pemilik UMKM yang sudah berpengalaman memiliki kemampuan yang terbiasa dengan berbagai kondisi sehingga tahu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu dengan adanya pembinaan UMKM jelas sangat membantu mereka dalam hal manajerial perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa responden tidak mengingkari bahwa kemampuan meningkatkan produktivitas perusahaan setiap pemilik UMKM pasti berbeda dan hal ini dipengaruhi dan terasah seiring pengalaman mengelola dan menjalankan perusahaan. Ditambah pula dengan adanya kebijakan pembinaan UMKM yang dilaksanakan oleh dinas terkait

melalui program-program pembinaan sangat membantu mereka dalam meningkatkan produktivitas usahanya.

Selanjutnya, untuk mengetahui jawaban responden dari setiap dimensi variabel Kinerja Bisnis, dapat dilihat pada penjelasan berikut:

4.3.2.1 Dimensi Tata Kelola Desain Produk

Untuk mengetahui kondisi dimensi tata kelola desain produk, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.14
Kriteria Penilaian Dimensi Tata Kelola Desain Produk

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
29	Perusahaan memiliki kemampuan membuat desain produk sesuai dengan mutu yang ditetapkan	371	77.29	Baik
30	Perusahaan memiliki kemampuan menetapkan kualitas produk sesuai dengan keinginan pasar	322	67.08	Cukup baik
31	Perusahaan memiliki kemampuan mendesain tampilan produk sesuai dengan kualitasnya	340	70.83	Baik
32	Kemasan produk memiliki tampilan yang menarik perhatian konsumen	370	77.08	Baik
33	Perusahaan memiliki kemampuan membuat produk dengan daya tahan yang lama	371	77.29	Baik
34	Kemampuan perusahaan menciptakan produk berdaya tahan lama tanpa bahan pengawet atau kimia	371	77.29	Baik
Jumlah			446.88	
Rata-rata			74.48	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi tata kelola desain produk, memiliki kriteria penilaiannya adalah baik dengan rata-

rata sebesar 74,48% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Artinya secara umum jawaban responden tersebut menilai dimensi tata kelola desain produk dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 29 yaitu *Perusahaan memiliki kemampuan membuat desain produk sesuai dengan mutu yang ditetapkan*; dan item butir 33 yaitu *Perusahaan memiliki kemampuan membuat produk dengan daya tahan yang lama*; serta item butir 34 yaitu *Kemampuan perusahaan menciptakan produk berdaya tahan lama tanpa bahan pengawet atau kimia*, yaitu sebesar 77,29% dan termasuk dalam kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada ketiga butir item tersebut, pada dasarnya setiap UMKM memiliki kemampuan desain produk dengan mutu produk yang ditetapkan sesuai standar mutu perusahaannya masing-masing. Setiap UMKM memiliki standar mutu yang berbeda satu sama lain walaupun pada produk yang sama, sehingga hal ini berpengaruh pada selera konsumen atau pasar dan segmen pasar. Namun terdapat persamaan yang sama diantara UMKM yaitu mampu membuat membuat produk dengan daya tahan yang lama. Hal ini sudah diterapkan sejak awal sebagai salah satu keunggulan produk UMKM sehingga dapat bersaing di pasar. Untuk beberapa UMKM yang memproduksi berupa produk makanan dengan daya tahan cukup lama yang sudah menggunakan bahan baku tanpa pengawet atau kimia, hal ini pun tidak terlepas dari peran beberapa dinas terkait diantaranya Dinas Kesehatan dan UPTD Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Garut yang melaksanakan program pembinaan UMKM dalam hal higienitas (kebersihan dan kelayakan) makanan olahan, selain

itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut yang juga melaksanakan program pembinaan UMKM dalam hal penggunaan bahan baku yang alami tanpa bahan pengawet.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, UMKM di Kabupaten Garut sudah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam hal desain produk sesuai dengan mutu sesuai standar masing-masing UMKM dan memiliki daya tahan relatif lama dengan tidak menggunakan bahan pengawet atau kimia untuk produk-produk makanan olahan. Namun untuk produk selain makanan olahan masih terdapat penggunaan bahan pengawet dikarenakan bahan baku yang digunakan pun harus dicuci atau dibersihkan dengan bahan pengawet seperti jaket kulit yang berasal dari kulit domba.

Berdasarkan hasil wawancara, responden menjawab bahwa kemampuan membuat desain produk dengan mutu sesuai standar mereka masing-masing tidak terlepas dari pengalaman dan pembinaan yang dilakukan dinas-dinas terkait. Mereka pun sudah tidak menggunakan bahan pengawet agar produknya tahan lama karena pasar atau konsumen sudah kritis, namun untuk produk tertentu seperti jaket kulit, batik garutan dan minyak akar wangi masih menggunakan bahan kimia dalam proses produksinya.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 30 yaitu *Perusahaan memiliki kemampuan menetapkan kualitas produk sesuai dengan keinginan pasar*, dengan persentase sebesar 67,08% dengan kriteria penilaian berdasarkan jawaban responden yaitu cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, menunjukkan bahwa belum semua UMKM

mampu menetapkan kualitas produk menyesuaikan yang sesuai dengan keinginan atau selera pasar. Hal ini berkaitan dengan persaingan usaha pada produk sejenis dan juga segmen pasar yang mereka masuki. Contohnya UMKM yang menghasilkan produk dodol garut, tidak mengherankan jika dalam satu toko yang menjual dodol garut terdapat beberapa merek dan kualitas yang berbeda yang pada akhirnya konsumen akan memilih sesuai dengan selera mereka.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, pada dasarnya masing-masing UMKM memiliki standar mutu yang berbeda satu sama lain. Hal ini dapat dilihat di toko-toko yang menjual produk UMKM yang menjual berbagai merek dan kualitas yang berbeda. Selain itu, hasil wawancara pun lebih menjelaskan bahwa desain dan mutu produk yang mereka hasilkan disesuaikan pula dengan kemampuan perusahaan. Menurut mereka terutama pada bahan baku yang sangat jelas membedakan kualitas atau mutu produknya. Selain itu, menurut mereka bahwa tidak dapat dipungkiri untuk menghasilkan produk yang bermutu atau berkualitas sesuai selera pasar atau konsumen membutuhkan bahan baku yang berkualitas pula, namun bahan baku tersebut memiliki harga yang mahal. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa UMKM dapat menghasilkan produk yang bermutu sesuai dengan selera konsumen atau pasar.

4.3.2.2 Dimensi Tata Kelola Keuangan

Untuk mengetahui kondisi dimensi tata kelola keuangan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus

dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.15
Kriteria Penilaian Dimensi Tata Kelola Keuangan

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Persentase	Kriteria
35	Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan dari hasil produksi	340	70.83	Baik
36	Dengan kinerja perusahaan saat ini mampu meningkatkan pendapatan	317	66.04	Cukup baik
37	Perusahaan memiliki kemampuan dalam hal efisiensi biaya produksi dan operasional	318	66.25	Cukup baik
38	Kemampuan perusahaan melakukan efisiensi berdampak pada kinerja perusahaan	340	70.83	Baik
39	Perusahaan memiliki strategi untuk meningkatkan keuntungan dari hasil produksi	371	77.29	Baik
40	Kemampuan untuk meningkatkan keuntungan berdampak pada kinerja perusahaan	340	70.83	Baik
Jumlah			422.08	
Rata-rata			70.35	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi tata kelola keuangan memberikan tanggapan penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 70,35% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi tata kelola keuangan tersebut, secara umum tata kelola keuangan yang telah diterapkan dalam menjalankan UMKM dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 39 yaitu *Perusahaan memiliki strategi untuk meningkatkan keuntungan dari hasil produksi*, dengan persentase sebesar 77,29%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, setiap perusahaan atau UMKM memiliki strateginya masing-masing untuk meningkatkan keuntungan dari hasil produksinya, hal ini

terjadi karena setiap pemilik UMKM memiliki kemampuan manajerial dan tata kelola keuangan yang tidak sama.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, umumnya setiap pemilik UMKM memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman mengelola usaha yang berbeda sehingga berdampak pada bagaimana para pemilik UMKM tersebut menerapkan strategi untuk menghasilkan keuntungan, selain itu tata kelola keuangan UMKM belum sepenuhnya menggunakan aturan akuntansi. Berdasarkan hasil wawancara, responden menunjukkan bahwa setiap UMKM memiliki strategi masing-masing untuk meningkatkan keuntungan yang dipengaruhi oleh kemampuan manajerial dan tata kelola keuangan para pemiliknya. Bahkan menurut responden masih terdapat pemilik yang mengelola usahanya dengan cara yang konvensional atau tradisional berdasarkan turun temurun dari generasi sebelumnya, namun tidak banyak yang melakukannya karena bagaimanapun juga pengelolaan usaha harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 36 yaitu *Dengan kinerja perusahaan saat ini mampu meningkatkan pendapatan*, dengan persentase sebesar 66,04%, dan item butir 37 yaitu *Perusahaan memiliki kemampuan dalam hal efisiensi biaya produksi dan operasional* dengan persentase sebesar 66,25%, kedua item tersebut termasuk dalam kategori cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada kedua butir item tersebut, kemampuan meningkatkan pendapatan perusahaan serta efisiensi biaya produksi belum maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti kemampuan manajerial dan tata kelola keuangan yang belum

optimal oleh para pemilik UMKM, serta berkaitan dengan harga bahan baku dan biaya ekonomi yang harus ditanggung perusahaan. Oleh karenanya, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai butir item terendah dibandingkan butir item lainnya pada variabel Kinerja Bisnis. Namun demikian, secara umum kedua butir item ini termasuk kategori cukup baik.

Berdasarkan hasil observasi, umumnya kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial pemilik usaha, sehingga dalam hal meningkatkan pendapatan serta efisiensi biaya produksi dan operasional sangat tergantung pada keputusan pemilik usaha. Jika melihat kondisi harga bahan baku yang fluktuatif dan ketersediaan kuantitas bahan baku yang terkadang tidak stabil maka disinilah peran pemilik usaha sangat dominan,

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir semua responden tidak mengingkari hal tersebut, bagaimanapun juga maju mundurnya kinerja perusahaan akan langsung dirasakan oleh pemilik usaha. Menurut responden menjelaskan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang mereka hadapi, dalam hal faktor internal bahwa kemampuan manajerial dan tata kelola perusahaan dari pemilik usaha merupakan faktor dominan untuk dalam kinerja bisnis untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan faktor eksternal, menurut penjelasan responden sangat dipengaruhi kondisi ekonomi seperti harga dan ketersediaan bahan baku serta biaya transportasi sehingga berpengaruh pada bagaimana pemilik usaha melakukan efisiensi biaya produksi dan operasional. Selain itu juga faktor permintaan pasar atau konsumen dapat mempengaruhi

keputusan pemilik usaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi dan operasioal.

4.3.2.3 Dimensi Tata Kelola Pelanggan

Untuk mengetahui kondisi dimensi tata kelola pelanggan, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 8 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-8 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.16
Kriteria Penilaian Dimensi Tata Kelola Pelanggan

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
41	Perusahaan memiliki kemampuan pengelolaan pelanggan sehingga dapat meningkatkan jumlah pelanggan	316	65.83	Cukup baik
42	Dengan tata kelola pelanggan yang baik memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan	367	76.46	Baik
43	Perusahaan memiliki kemampuan melalui kualitas produk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan	375	78.13	Baik
44	Peningkatan kepuasan pelanggan dapat dilakukan dengan kondisi kinerja perusahaan saat ini.	340	70.83	Baik
45	Perusahaan memiliki kemampuan untuk menambah atribut produk melalui tampilan kemasan yang lebih bervariasi	315	65.63	Cukup baik
46	Kemampuan perusahaan meningkatkan atribut produk mengikuti aturan yang berlaku	340	70.83	Baik
47	Perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan citra dan reputasi produk melalui inovasi produk	371	77.29	Baik
48	Citra dan reputasi produk yang dimiliki perusahaan saat ini dapat diterima oleh konsumen	340	70.83	Baik
Jumlah			575.83	
Rata-rata			71.98	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi tata kelola pelanggan, responden memberikan penilaiannya adalah baik dengan rata-rata sebesar 71,90% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi tata kelola pelanggan tersebut, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir *Perusahaan memiliki kemampuan melalui kualitas produk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan*, dengan persentase 78.13% dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, secara umum UMKM memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui kualitas produk yang dihasilkannya, oleh karena itu responden menilai butir item tersebut pada kategori baik.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, umumnya kebutuhan permintaan pasar dapat dipenuhi oleh para pemilik usaha, namun yang membedakannya adalah kualitas produk yang mereka hasilkan. Sehingga konsumen atau pelanggan memiliki alternatif pilihan untuk membeli dan mengkonsumsi beragamnya produk dan kualitasnya. Berdasarkan hasil wawancara, responden menjelaskan bahwa mereka mengakui bahwa kepuasan konsumen atau pelanggan merupakan salah satu faktor yang menentukan penerimaan terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini sangat diperhatikan oleh responden agar dapat mempertahankan kualitas produk yang sudah baik bahkan untuk dapat meningkatkannya sehingga diterima pasar dan memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggan

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 41 yaitu *Perusahaan memiliki kemampuan pengelolaan pelanggan sehingga dapat meningkatkan jumlah pelanggan dengan persentase 65,83%*, dan item butir 45 yaitu *Perusahaan memiliki kemampuan untuk menambah atribut produk melalui tampilan kemasan yang lebih bervariasi dengan persentase sebesar 65,63%*, dimana kedua item tersebut termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada kedua butir item tersebut, kemampuan meningkatkan jumlah pelanggan oleh perusahaan masih belum optimal, hal ini berkaitan dengan kemampuan tata kelola pelanggan yang belum maksimal serta adanya persaingan usaha dimana setiap perusahaan tentu ingin menampilkan dan memberikan kualitas terbaiknya. Sama halnya dengan kemampuan menambah variasi pada tampilan kemasan yang belum maksimal, masih terdapat produk UMKM menggunakan kemasan yang sederhana semisal cukup dibungkus dengan plastik dengan rapi disertai merek dagang. Sehingga, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai butir item terendah. Namun demikian, butir item ini masih termasuk kategori cukup baik.

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar responden memang sudah memiliki pelanggan tetap sehingga mereka berupaya mempertahankan loyalitas pelanggan mereka, namun ada pula upaya untuk meningkatkan jumlah pelanggan salah satunya dengan memperluas wilayah pemasaran produk, sedangkan untuk variasi kemasan banyak dari pemilik UMKM sudah menggunakan kemasan yang memberikan variasi pada kemasannya seperti sebelumnya dengan plastik biasa sudah diganti dengan plastik yang lebih baik

kualitasnya bahkan ada pula yang menggunakan kemasan karton dengan variasi warna yang menarik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa responden berupaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada, akan tetapi tentunya agar usaha berkembang maka dilakukan upaya meningkatkan pelanggan dengan cara memperluas wilayah pemasaran dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat promosi produk seperti pameran atau kegiatan sejenisnya. Sedangkan dalam hal kemampuan variasi kemasan menurut responden bahwa penambahan atribut dapat dilakukan sepanjang tidak menambah beban biaya produksi lebih besar, namun diakui responden bahwa kondisi pasar saat ini memerlukan tampilan kemasan yang memiliki variasi sehingga dapat menarik minat dan perhatian konsumen atau pelanggan untuk membeli produknya.

4.3.2.4 Dimensi Tata Kelola Teknologi dan Proses Produksi

Untuk mengetahui kondisi dimensi tata kelola teknologi dan proses produksi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.17
Kriteria Penilaian Dimensi Tata Kelola Teknologi dan Proses Produksi

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
49	Perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan proses perubahan pada bagian produksi	323	67.29	Cukup baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
50	Perusahaan dapat mengadopsi teknologi untuk meningkatkan proses perubahan bahan mentah menjadi bahan jadi	370	77.08	Baik
51	Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan proses operasional dengan kondisi perusahaan saat ini	390	81.25	Baik
52	Adanya teknologi dan proses produksi canggih saat ini dapat meningkatkan proses operasional perusahaan	340	70.83	Baik
53	Perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan produktivitas dengan kondisi perusahaan saat ini	314	65.42	Cukup baik
54	Teknologi dan proses produksi yang digunakan saat ini oleh perusahaan mampu meningkatkan produktivitas perusahaan	340	70.83	Baik
Jumlah			432.71	
Rata-rata			72.12	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi tata kelola teknologi dan proses produksi, rata-rata penilaian dinyatakan baik dengan persentase sebesar 72,12% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi tata kelola teknologi dan proses produksi tersebut, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi responden ada pada item butir 51 yaitu *Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan proses operasional dengan kondisi perusahaan saat ini*, dengan persentase sebesar 81,25%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, kemampuan meningkatkan proses produksi dengan kondisi saat ini berjalan sudah dimiliki oleh setiap UMKM, hal ini berkaitan dengan pengalaman operasional usaha yang telah mengalami berbagai kondisi dan situasi pasar, sehingga responden menilai butir item ini ada pada penilaian tertinggi dengan kriteria baik.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, secara umum para pemilik UMKM sudah memiliki kemampuan untuk meningkatkan proses produksi yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi pasar serta saat-saat tertentu yang memerlukan peningkatan proses produksi. Berdasarkan hasil wawancara, para responden membenarkan bahwa setiap UMKM memiliki kemampuan meningkatkan proses produksi sesuai dengan kemampuannya. Faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi dan situasi pasar yang mengharuskan proses produksi harus ditingkatkan. Bahkan menurut responden terdapat pola peningkatan permintaan di saat-saat tertentu seperti hari raya lebaran dan menjelang akhir tahun yang biasanya jumlah permintaan akan meningkat. Sehingga setiap UMKM memiliki strategi masing-masing untuk menghadapi kenaikan permintaan tersebut..

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 49 yaitu *Perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan proses perubahan pada bagian produksi*, dengan persentase sebesar 67,29% dan item butir 53 yaitu *Perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan produktivitas dengan kondisi perusahaan saat ini*, dengan persentase sebesar 65,42%. Berdasarkan jawaban responden pada kedua butir item tersebut, kemampuan meningkatkan proses pada bagian produksi dan kemampuan meningkatkan produktivitas perusahaan belum maksimal, hal ini berkaitan dengan penggunaan peralatan dan teknologi yang masih sederhana bahkan konvensional. Sehingga, proses perubahan pada bagian produksi tidak dapat terlaksana dengan cepat yang berdampak pada produktivitas tidak optimal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, mayoritas responden membenarkan penggunaan peralatan dan teknologi proses produksi masih banyak yang sederhana dan konvensional. Kondisi ini berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia yang bekerja di bagian produksi. Menurut responden bahwa mayoritas sumber daya manusia yang bekerja pada bagian produksi memiliki latar belakang pendidikan relatif rendah yaitu rata-rata SMP atau SMA, sehingga perubahan proses produksi tidak akan berjalan dengan cepat dan hal ini berdampak pada produktivitas perusahaan. Namun secara perlahan para pemilik UMKM berupaya melakukan proses perubahan dengan berbagai cara agar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

4.3.2.5 Dimensi Tata Kelola Pertumbuhan dan Pembelajaran

Untuk mengetahui kondisi dimensi tata kelola pertumbuhan dan pembelajaran, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.18
Kriteria Penilaian Dimensi Tata Kelola Pertumbuhan dan Pembelajaran

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
55	Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kompetensi pegawainya	370	77.08	Baik
56	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan sudah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan	371	77.29	Baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
57	Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawainya	361	75.21	Baik
58	Perusahaan sudah membuat aturan dan tata tertib untuk mendisiplinkan pegawainya	371	77.29	Baik
59	Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan motivasi pegawai	340	70.83	Baik
60	Peningkatan motivasi pegawai sudah dilakukan perusahaan sesuai aturan dan norma yang berlaku	371	77.29	Baik
Jumlah			455.00	
Rata-rata			75.83	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi tata kelola pertumbuhan dan pembelajaran, rata-rata penilaiannya adalah baik dengan persentase sebesar 75,83% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi tata kelola pertumbuhan dan pembelajaran tersebut, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 56 yaitu *Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan sudah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan*, item butir 58 yaitu *Perusahaan sudah membuat aturan dan tata tertib untuk mendisiplinkan pegawainya*, dan item butir 60 yaitu *Peningkatan motivasi pegawai sudah dilakukan perusahaan sesuai aturan dan norma yang berlaku*, dengan persentase sebesar 77,29% dan termasuk kriteria baik. Berdasarkan jawaban responden pada ketiga butir item tersebut, pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai sudah berjalan dengan baik, adanya aturan dan tata tertib serta motivasi pegawai sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, sehingga responden menilai ketiga butir item ini ada pada penilaian tertinggi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pelaksanaan pelatihan bagi pegawai, membuat aturan dan tata tertib serta motivasi pegawai sudah berjalan dengan baik tidak terlepas dari kesadaran para pemilik UMKM dan pegawainya dalam menjalankan hak serta kewajiban yang seimbang. Berdasarkan hasil wawancara, responden menjelaskan bahwa pelatihan yang dilaksanakannya sesuai kebutuhan perusahaan dimana fokus utamanya adalah peningkatan kapasitas produksi yang dilakukan secara langsung oleh para pemilik UMKM. Agar situasi pekerjaan kondusif maka para pemilik UMKM membuat aturan dan tata tertib sehingga para pegawai mengetahui hak dan kewajibannya. Para pemilik UMKM pun sudah memberikan motivasi kepada para pegawainya agar dapat bekerja dengan baik, hanya saja pemberian motivasi lebih menitikberatkan pada unsur materi berupa insentif.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 59 yaitu *Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan motivasi pegawai*, dengan persentase sebesar 70.83%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, pemberian motivasi sudah dilakukan oleh para pemilik UMKM baik secara materi maupun non materi. Namun demikian, terkadang hal tersebut mendapat kendala, salah satunya adalah para pegawai lebih tertarik dengan pemberian insentif yang bersifat materi sebagai wujud motivasi, sehingga secara umum responden menganggap butir item ini sebagai butir item terendah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, responden menyampaikan bahwa tidak selalu motivasi yang diberikan berjalan dengan baik, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendalanya, antara lain kemampuan komunikasi

pemilik usaha yang belum optimal dan bentuk motivasi yang diinginkan oleh pegawai. Berkaitan dengan komunikasi kepada pegawainya, rata-rata responden mengakui bahwa cara berkomunikasi menganggap sama semua pegawainya, sehingga motivasi yang disampaikan cenderung bersifat perintah. Selain itu, para pegawai akan termotivasi jika bentuk motivasinya yaitu berupa materi dalam bentuk insentif, sehingga pegawai akan bekerja lebih cepat karena akan mendapat insentif jika memenuhi target yang ditetapkan.

4.3.2.6 Dimensi Tata Kelola Pemasaran

Untuk mengetahui kondisi dimensi tata kelola pemasaran, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.19
Kriteria Penilaian Dimensi Tata Kelola Pemasaran

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
61	Perusahaan memiliki kemampuan menyampaikan dengan cepat produk atau jasa ke pasar	344	71.67	Baik
62	Kemampuan kecepatan penyampaian produk atau jasa sudah dilakukan dengan baik oleh bagian pemasaran	375	78.13	Baik
63	Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penjualan hasil produksi	340	70.83	Baik
64	Target peningkatan penjualan dapat dicapai oleh perusahaan	340	70.83	Baik
65	Perusahaan memiliki kemampuan untuk memperluas pasar	370	77.08	Baik
66	Bagian pemasaran sudah melakukan perluasan pasar untuk meningkatkan penjualan	375	78.13	Baik
Jumlah			446.67	

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
	Rata-rata		74.44	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi tata kelola pemasaran, responden memberikan penilaiannya adalah baik dengan rata-rata persentase sebesar 74,44% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi tata kelola pemasaran tersebut, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 62 yaitu *Kemampuan kecepatan penyampaian produk atau jasa sudah dilakukan dengan baik oleh bagian pemasaran*, dan item butir 66 yaitu *Bagian pemasaran sudah melakukan perluasan pasar untuk meningkatkan penjualan*, dengan persentase sebesar 78,13%. Berdasarkan jawaban responden pada kedua butir item tersebut, bagian pemasaran memiliki kecepatan penyampaian produk dan melakukan perluasan pasar untuk meningkatkan penjualan sudah berjalan dengan baik, sehingga responden menilai butir item ini ada pada penilaian tertinggi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, bahwa kecepatan bagian pemasaran menyampaikan produk ke pasar berkaitan dengan pemenuhan permintaan pasar dan persaingan bisnis, semakin cepat produk dipasarkan maka kebutuhan pasar terpenuhi. Dengan semakin cepat permintaan terpenuhi maka berdampak pada perluasan pasar untuk meningkatkan penjualan.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item 63 yaitu *Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penjualan hasil produksi*, serta item butir 64 yaitu *Target peningkatan penjualan dapat dicapai oleh perusahaan*,

dengan persentase sebesar 70,83%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, peningkatan penjualan produksi hasil dan pencapaian target penjualan belum dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item terendah namun kedua butir item ini termasuk kategori baik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, menurut responden bahwa peningkatan penjualan hasil produksi dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan karena mayoritas responden memiliki modal kerja yang tidak terlalu besar sehingga target penjualan pun tidak selamanya dapat terpenuhi. Umumnya peningkatan penjualan hasil produksi dilakukan pada saat-saat tertentu saja, semisal pada saat liburan hari raya lebaran karena menurut responden pada momen tersebut permintaan akan meningkat.

4.3.3 Variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha

Untuk mengetahui kondisi variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan angket yang terdiri dari 38 pernyataan yang masing-masing disertai 5 kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai menurut responden. Hasil pengolahan data terhadap 38 pernyataan tentang Efektivitas Kelangsungan Usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20
Kriteria Penilaian Variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
---------	------	------------------	------------	----------

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
67	Tingkat kemampuan individu (karyawan) dalam menyelesaikan pekerjaan	386	80.42	Baik
68	Jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh individu (karyawan)	391	81.46	Baik
69	Tingkat kemampuan kelompok (grup kerja) dalam menyelesaikan pekerjaan	381	79.38	Baik
70	Jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh kelompok (grup kerja)	369	76.88	Baik
71	Tingkat kemampuan organisasi (perusahaan) mencapai target produksi	380	79.17	Baik
72	Jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh organisasi (perusahaan) mencapai target yng ditetapkan	323	67.29	Cukup baik
73	Kemampuan untuk menurunkan biaya produksi sebagai proses efisiensi	315	65.63	Cukup baik
74	Kemampuan optimalisasi biaya operasional perusahaan dalam rangka efisiensi	324	67.50	Cukup baik
75	Kemampuan pemakaian bahan secara efektif dan efisien	388	80.83	Baik
76	Kemampuan menyesuaikan pemakaian bahan dengan target produksi	390	81.25	Baik
77	Kemampuan perusahaan memperoleh penghasilan dari hasil produksi	386	80.42	Baik
78	Kemampuan mencapai target penghasilan sesuai dengan target produksi	380	79.17	Baik
79	Kemampuan menghasilkan keuntungan dari hasil produksi	387	80.63	Baik
80	Kemampuan perusahaan mencapai target keuntungan atau laba	317	66.04	Cukup baik
81	Kemampuan perusahaan mengalokasikan sumber daya manusia secara optimal	362	75.42	Baik
82	Kemampuan perusahaan menambah sumber daya manusia untuk mencapai target produksi	380	79.17	Baik
83	Kemampuan perusahaan memanfaatkan fasilitas secara optimal	375	78.13	Baik
84	Kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan fasilitas operasional dan produksi	318	66.25	Cukup baik
85	Kemampuan mengalokasikan modal untuk operasional dan produksi	375	78.13	Baik
86	Kemampuan perusahaan menyesuaikan kebutuhan modal dengan target produksi	322	67.08	Cukup baik
87	Kemampuan perusahaan menciptakan produk baru sesuai selera pasar	320	66.67	Cukup baik
88	Kemampuan perusahaan melakukan inovasi produk	345	71.88	Baik
89	Kemampuan perusahaan menempatkan sumber daya manusia dalam struktur organisasi	375	78.13	Baik
90	Kemampuan perusahaan membina dan memelihara struktur organisasi	386	80.42	Baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
91	Tingkat optimalisasi fungsi manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan	323	67.29	Cukup baik
92	Kemampuan perusahaan melakukan pemeliharaan sumber daya-sumber daya dalam organisasi	319	66.46	Cukup baik
93	Kemampuan perusahaan mengoptimalkan sumber daya yang ada	353	73.54	Baik
94	Kemampuan perusahaan memelihara sumber daya atau fasilitas produksi	390	81.25	Baik
95	Tingkat keterikatan karyawan dengan perusahaan	363	75.63	Baik
96	Tingkat komitmen kerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan	388	80.83	Baik
97	Rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan perusahaan	390	81.25	Baik
98	Semua karyawan memiliki komitmen yang sama untuk memajukan perusahaan	386	80.42	Baik
99	Tingkat perasaan memiliki dari semua karyawan terhadap perusahaan	380	79.17	Baik
100	Solidaritas sesama karyawan memajukan perusahaan untuk kepentingan bersama	392	81.67	Baik
101	Kemampuan perusahaan memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	345	71.88	Baik
102	Tingkat kepuasan karyawan menerima kompensasi	375	78.13	Baik
103	Kemampuan perusahaan memberikan penghargaan (<i>reward</i>) kepada karyawan yang berprestasi	362	75.42	Baik
104	Tingkat kepuasan karyawan menerima penghargaan (<i>reward</i>)	387	80.63	Baik
Jumlah			2880.83	
Rata-Rata			75.81	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.20, dapat dilihat bahwa rata-rata persentase jawaban responden pada variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha adalah baik yaitu sebesar 75,81% dari seluruh pernyataan pada variabel tersebut. Berdasarkan jawaban responden pada variabel tersebut, secara umum Efektivitas Kelangsungan Usaha tersebut dianggap sudah baik.

Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada item butir 100 yaitu *Solidaritas sesama karyawan memajukan perusahaan untuk kepentingan bersama*, sebesar 81,67%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item

tersebut, karyawan memiliki solidaritas untuk memajukan perusahaan demi kepentingan bersama sudah terlaksana dengan baik, sehingga secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item tertinggi dengan kategori baik.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, solidaritas sesama karyawan ini muncul karena adanya kepentingan bersama yaitu bahwa mereka bekerja di tempat yang sama sehingga menganggap bahwa maju mundurnya perusahaan akan berdampak pada penghasilan pegawai. Berdasarkan hasil wawancara, menurut responden bahwa para pegawai memiliki solidaritas cukup tinggi terhadap perusahaan, kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya kepentingan para pegawai agar memiliki penghasilan yang berkelanjutan dan hal ini pun berdampak pada peningkatan penjualan produk.

Selanjutnya persentase terendah terdapat pada item butir 73 yaitu *Kemampuan untuk menurunkan biaya produksi sebagai proses efisiensi*, sebesar 65,63% dan termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, kemampuan untuk menurunkan biaya produksi sebagai proses efisiensi belum optimal, kemungkinan yang terjadi adalah belum maksimalnya tata kelola keuangan perusahaan dan kondisi ekonomi yang belum stabil.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, secara umum responden mengakui bahwa kemampuan menurunkan biaya produksi sebagai proses efisiensi belum mereka laksanakan dengan optimal dikarenakan kemampuan tata kelola keuangan perusahaan pun belum maksimal sebagai akibat kurangnya pengetahuan tentang tata kelola keuangan dan akuntansi. Selain itu disebabkan oleh kondisi ekonomi, yaitu harga dan ketersediaan bahan baku belum stabil sehingga

mengakibatkan naik turunnya biaya produksi. Pada akhirnya berimbas pada kapasitas produksi yang tidak dapat mencapai target penjualan, sehingga margin laba tidak selalu tetap akibatnya produktivitas perusahaan menjadi tidak stabil.

Untuk mengetahui jawaban responden dari setiap dimensi yang mengukur variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha dapat dilihat pada tabel dan penjelasan berikut:

4.3.3.1 Dimensi Produktivitas dan Efisiensi

Untuk mengetahui kondisi dimensi Produktivitas dan Efisiensi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-10 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.21
Kriteria Penilaian Dimensi Produktivitas dan Efisiensi

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
67	Tingkat kemampuan individu (karyawan) dalam menyelesaikan pekerjaan	386	80.42	Baik
68	Jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh individu (karyawan)	391	81.46	Baik
69	Tingkat kemampuan kelompok (grup kerja) dalam menyelesaikan pekerjaan	381	79.38	Baik
70	Jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh kelompok (grup kerja)	369	76.88	Baik
71	Tingkat kemampuan organisasi (perusahaan) mencapai target produksi	380	79.17	Baik
72	Jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh organisasi (perusahaan) mencapai target yang ditetapkan	323	67.29	Cukup baik
73	Kemampuan untuk menurunkan biaya produksi sebagai proses efisiensi	315	65.63	Cukup baik
74	Kemampuan optimalisasi biaya operasional perusahaan dalam rangka efisiensi	324	67.50	Cukup baik

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
75	Kemampuan pemakaian bahan secara efektif dan efisien	388	80.83	Baik
76	Kemampuan menyesuaikan pemakaian bahan dengan target produksi	390	81.25	Baik
Jumlah			759.79	
Rata-rata			75.98	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi produktivitas dan efisiensi, kategori penilaiannya adalah baik dengan rata-rata persentase sebesar 75,98% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi produktivitas dan efisiensi, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 68 yaitu *Jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh individu (karyawan)*, dengan persentase sebesar 81,46% dan termasuk kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh individu (karyawan) sudah baik, artinya setiap individu (karyawan) dapat menghasilkan jumlah produk sesuai target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi, pada umumnya para karyawan berusaha memenuhi target jumlah produk yang ditetapkan, hal ini berkaitan dengan penghasilan dan insentif yang akan mereka dapatkan. Berdasarkan hasil wawancara, menurut responden bahwa secara umum karyawannya bekerja dengan baik dan dapat mencapai target jumlah produk yang ditetapkan. Responden menjelaskan bahwa unsur penghasilan merupakan fokus karyawannya disamping adanya insentif jika dapat melebihi target yang ditetapkan. Hal ini pun dapat berdampak positif pada peningkatan produksi dan penjualan.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 73 yaitu *Kemampuan untuk menurunkan biaya produksi sebagai proses efisiensi*, dengan persentase sebesar 65,63% dan termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, kemampuan menurunkan biaya produksi sebagai proses efisiensi belum optimal yang dapat disebabkan belum maksimalnya tata kelola keuangan dan kondisi ekonomi yang belum stabil.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, secara umum responden mengakui bahwa kemampuan menurunkan biaya produksi sebagai proses efisiensi belum mereka laksanakan dengan optimal dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang tata kelola keuangan dan akuntansi. Faktor lainnya adalah harga dan ketersediaan bahan baku belum stabil sehingga mengakibatkan naik turunnya biaya produksi. Akibatnya proses efisiensi tidak maksimal sehingga berdampak pada target penjualan yang tidak selalu tetap.

4.3.3.2 Dimensi Laba dan Pengembangan Usaha

Untuk mengetahui kondisi dimensi Laba dan Pengembangan Usaha, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 12 pernyataan yang dilengkapi 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.22
Kriteria Penilaian Dimensi Laba dan Pengembangan Usaha

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
---------	------	------------------	------------	----------

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
77	Kemampuan perusahaan memperoleh penghasilan dari hasil produksi	386	80.42	Baik
78	Kemampuan mencapai target penghasilan sesuai dengan target produksi	380	79.17	Baik
79	Kemampuan menghasilkan keuntungan dari hasil produksi	387	80.63	Baik
80	Kemampuan perusahaan mencapai target keuntungan atau laba	317	66.04	Cukup baik
81	Kemampuan perusahaan mengalokasikan sumber daya manusia secara optimal	362	75.42	Baik
82	Kemampuan perusahaan menambah sumber daya manusia untuk mencapai target produksi	380	79.17	Baik
83	Kemampuan perusahaan memanfaatkan fasilitas secara optimal	375	78.13	Baik
84	Kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan fasilitas operasional dan produksi	318	66.25	Cukup baik
85	Kemampuan mengalokasikan modal untuk operasional dan produksi	375	78.13	Baik
86	Kemampuan perusahaan menyesuaikan kebutuhan modal dengan target produksi	322	67.08	Cukup baik
87	Kemampuan perusahaan menciptakan produk baru sesuai selera pasar	320	66.67	Cukup baik
88	Kemampuan perusahaan melakukan inovasi produk	345	71.88	Baik
Jumlah			888.96	
Rata-rata			74.08	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi laba dan pengembangan usaha, kriteria penilaiannya adalah baik dengan rata-rata persentase sebesar 74,08% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi tersebut, secara umum dimensi laba dan pengembangan usaha yang dihasilkan dan dilakukan oleh para responden dianggap sudah baik.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 79 yaitu *Kemampuan menghasilkan keuntungan dari hasil produksi*, dengan persentase sebesar 80,63%. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut,

kemampuan menghasilkan keuntungan dari hasil produksi sudah dilakukan dengan baik oleh para pemilik UMKM sehingga berdampak pada pengembangan usaha.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, para responden berupaya untuk menghasilkan keuntungan dari hasil produksi, karena bagaimanapun juga mendirikan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Begitu pula berdasarkan hasil wawancara, responden menyatakan bahwa tujuan mereka menjadi pengusaha dan menghasilkan produk kemudian menjualnya adalah memperoleh keuntungan, sehingga mereka menjaga stabilitas produksi bahkan berupaya meningkatkannya agar keuntungan yang diperoleh dapat bertampah pula.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 80 yaitu *Kemampuan perusahaan mencapai target keuntungan atau laba*, dengan persentase sebesar 66,04% dan termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, kemampuan perusahaan mencapai target keuntungan atau laba belum optimal, walaupun sudah memperoleh keuntungan atau laba namun sering tidak mencapai target keuntungan.

Berdasarkan hasil observasi, target keuntungan atau laba menjadi permasalahan tersendiri bagi UMKM, di satu sisi harus memperoleh keuntungan namun di sisi lain banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target keuntungan atau laba. Berdasarkan hasil wawancara, para responden lebih menegaskan bahwa walaupun usaha mereka sudah memperoleh keuntungan atau laba namun target keuntungan atau laba tidak selalu tercapai. Beberapa faktor yang mengakibatkannya antara lain harga dan ketersediaan bahan baku yang

belum stabil sehingga membebani biaya produksi yang berdampak pada turunnya target keuntungan atau laba yang ingin dicapai, selain itu persaingan bisnis yang semakin ketat mengakibatkan setiap UMKM harus mengkalkulasi dengan matang kapasitas produksi dan penjualannya agar keuntungan atau laba yang akan diperoleh dapat tercapai mendekati target yang ditetapkan.

4.3.3.3 Dimensi Stabilitas Usaha

Untuk mengetahui kondisi dimensi Stabilitas Usaha, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 6 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-6 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.23
Kriteria Penilaian Dimensi Stabilitas Usaha

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
89	Kemampuan perusahaan menempatkan sumber daya manusia dalam struktur organisasi	375	78.13	Baik
90	Kemampuan perusahaan membina dan memelihara struktur organisasi	386	80.42	Baik
91	Tingkat optimalisasi fungsi manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan	323	67.29	Cukup baik
92	Kemampuan perusahaan melakukan pemeliharaan sumber daya-sumber daya dalam organisasi	319	66.46	Cukup baik
93	Kemampuan perusahaan mengoptimalkan sumber daya yang ada	353	73.54	Baik
94	Kemampuan perusahaan memelihara sumber daya atau fasilitas produksi	390	81.25	Baik
Jumlah			447.08	
Rata-rata			74.51	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Berdasarkan tabel 4.23, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi stabilitas usaha, kriteria penilaiannya adalah baik dengan rata-rata

persentase sebesar 74,51% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi stabilitas usaha di atas, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik oleh responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 94 yaitu *Kemampuan perusahaan memelihara sumber daya atau fasilitas produksi*, sebesar 81,25% dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, kemampuan perusahaan memelihara sumber daya atau fasilitas produksi sudah dilakukan oleh para pemilik UMKM,

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, para pemilik UMKM dengan segala keterbatasan yang dimilikinya berupaya memelihara sumber daya atau fasilitas produksi agar mereka dapat menghasilkan produk untuk dijual. Sehingga, umumnya para pemilik UMKM menggunakan sumber daya atau fasilitas produksi tersebut selama masih bisa digunakan. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa sumber daya atau fasilitas produksi yang dimiliki UMKM yang digunakan merupakan turun temurun dari generasi sebelumnya, artinya sumber daya atau fasilitas produksi tersebut mereka pelihara agar dapat digunakan dalam jangka panjang agar biaya pengadaan sumber daya atau fasilitas produksi bisa ditekan atau diminimalisir.

Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 92 yaitu *Kemampuan perusahaan melakukan pemeliharaan sumber daya-sumber daya dalam organisasi*, dengan persentase sebesar 66,46% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item ini, kemampuan perusahaan melakukan pemeliharaan sumber daya-sumber daya

dalam organisasi masih belum optimal. Sehingga, secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item terendah dan dikategorikan cukup baik.

Berdasarkan hasil observasi, umumnya kemampuan perusahaan memelihara sumber daya-sumber daya dalam usahanya lebih menitik beratkan pada fasilitas produksi, sedangkan sumber daya lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan semisal bangunan produksi yang sangat jarang mendapat perhatian pemilik usaha, dan hal ini umumnya dilakukan oleh para pemilik UMKM.

Adapun berdasarkan hasil wawancara menunjukkan responden membenarkan bahwa kemampuan perusahaan memelihara sumber daya lebih diprioritaskan pada fasilitas produksi, hal ini disebabkan agar perusahaan dapat memproduksi dengan baik dan lancar. Tidak menutup kemungkinan sumber daya lainnya yaitu sumber daya manusia yang memang perlu dipelihara karena sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang baik tidak dapat dihasilkan dalam waktu yang cepat, mereka membutuhkan waktu dan pengalaman.

4.3.3.4 Dimensi Semangat dan Kepuasan Kerja

Untuk mengetahui kondisi dimensi Semangat dan Kepuasan Kerja, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pernyataan yang masing-masing dilengkapi dengan 5 (lima) kemungkinan jawaban yang harus dipilih dan dianggap sesuai oleh responden. Hasil pengolahan data terhadap ke-10 pernyataan tersebut, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.24
Kriteria Penilaian Dimensi Semangat dan Kepuasan Kerja

No Item	Item	Jumlah Kumulatif	Presentase	Kriteria
95	Tingkat keterikatan karyawan dengan perusahaan	363	75.63	Baik
96	Tingkat komitmen kerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan	388	80.83	Baik
97	Rasa kebersamaan dalam mencapai tujuan perusahaan	390	81.25	Baik
98	Semua karyawan memiliki komitmen yang sama untuk memajukan perusahaan	386	80.42	Baik
99	Tingkat perasaan memiliki dari semua karyawan terhadap perusahaan	380	79.17	Baik
100	Solidaritas sesama karyawan memajukan perusahaan untuk kepentingan bersama	392	81.67	Baik
101	Kemampuan perusahaan memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	345	71.88	Baik
102	Tingkat kepuasan karyawan menerima kompensasi	375	78.13	Baik
103	Kemampuan perusahaan memberikan penghargaan (reward) kepada karyawan yang berprestasi	362	75.42	Baik
104	Tingkat kepuasan karyawan menerima penghargaan (reward)	387	80.63	Baik
Jumlah			785.00	
Rata-rata			78.50	

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Dari tabel 4.24, dapat dilihat bahwa jawaban responden pada dimensi semangat dan kepuasan kerja, kriteria penilaiannya adalah baik dengan rata-rata persentase sebesar 78,50% dari seluruh pernyataan pada dimensi ini. Berdasarkan jawaban responden pada dimensi semangat dan kepuasan kerja di atas, secara umum dimensi ini dianggap sudah baik oleh responden.

Penilaian tertinggi dari responden ada pada item butir 100 yaitu *Solidaritas sesama karyawan memajukan perusahaan untuk kepentingan bersama*, sebesar 81,67% dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item tersebut, karyawan memiliki solidaritas untuk

memajukan perusahaan demi kepentingan bersama sudah terlaksana dengan baik, sehingga secara umum responden menganggap butir item ini sebagai item tertinggi dengan kategori baik.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, solidaritas sesama karyawan ini muncul karena adanya kepentingan bersama yaitu bahwa mereka bekerja di tempat yang sama sehingga menganggap bahwa maju mundurnya perusahaan akan berdampak pada penghasilan pegawai. Berdasarkan hasil wawancara, menurut responden bahwa para pegawai memiliki solidaritas cukup tinggi terhadap perusahaan, kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya kepentingan para pegawai agar memiliki penghasilan yang berkelanjutan dan hal ini pun berdampak pada peningkatan penjualan produk.

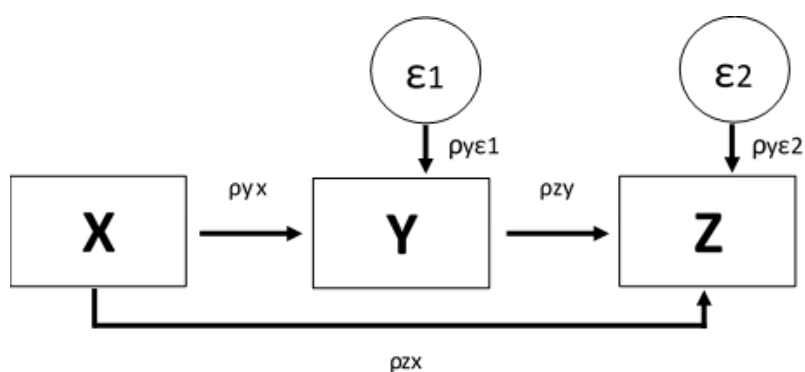
Sedangkan penilaian terendah terdapat pada item butir 101 yaitu *Kemampuan perusahaan memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku*, dengan persentase sebesar 71,88% dan termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan jawaban responden pada butir item ini, kemampuan perusahaan memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku belum berjalan dengan baik, dikarenakan kemampuan keuangan perusahaan yang belum kuat.

Berdasarkan hasil observasi, umumnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan belum memenuhi aturan yang berlaku yaitu Upah Minimal Regional (UMR), disebabkan kemampuan keuangan UMKM yang belum kuat. Adapun berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa kompensasi yang diberikan terdiri dari upah atau gaji serta insentif dan bonus, walaupun belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti diketahui bahwa modal yang dimiliki

UMKM relatif tidak besar sehingga para pemilik harus paham dalam mengelola keuangan, akibatnya perhitungan kompensasi belum menerapkan sesuai aturan yang berlaku seperti UMR..

4.4 Pengujian Dan Pembahasan Hipotesis Penelitian

Untuk menjawab hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan suatu pengujian dengan pendekatan statistik yaitu analisis jalur (*path analysis*) yang disusun dalam diagram berikut:



Gambar 4.1 Diagram Jalur

Dari diagram di atas, maka persamaan strukturalnya dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \rho_{yx} + \rho_{y\epsilon_1}$$

$$Z = \rho_{zx} + \rho_{yx} + \rho_{zy} + \rho_{z\epsilon_2}$$

Untuk menguji kebermaknaan dari paradigma atau jalur diatas, maka dilakukan pengujian terhadap koefisien jalur melalui tahapan:

1. Pengujian secara simultan, yaitu untuk menguji pengaruh dari kedua variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.

2. Pengujian secara parsial, yaitu dimaksudkan untuk menguji variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara masing-masing.

Selanjutnya, diuraikan hasil pengujian Hipotesis Utama dan Sub-sub Hipotesis, sebagai berikut:

4.4.1 Pengujian Hipotesis Utama Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X) Terhadap Kinerja Bisnis (Y) Dalam Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha (Z)

Rumusan hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap kinerja bisnis untuk mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha.

H₁ : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap kinerja bisnis untuk mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha.

Adapun untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian menggunakan pengujian analisis jalur, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mendefinisikan Variabel:

Diketahui:

$$n = 96$$

$$k = 3$$

$$\alpha = 0,05$$

2. Membuat Matriks Korelasi (R), dengan menggunakan persamaan:

$$R = \begin{bmatrix} r_{XX} & r_{YX} & r_{ZX} \\ & r_{YY} & r_{YZ} \\ & & r_{ZZ} \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_{xy} = \frac{\Sigma xy^2 - 1/n (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{[\Sigma x^2 - 1/n (x)^2][\Sigma y^2 - 1/n (y)^2]}}$$

$$\Gamma_{xz} = \frac{\Sigma xz^2 - 1/n (\Sigma x)(\Sigma z)}{\sqrt{[\Sigma x^2 - 1/n (x)^2][\Sigma z^2 - 1/n (z)^2]}}$$

$$\Gamma_{yz} = \frac{\Sigma yz^2 - 1/n (\Sigma y)(\Sigma z)}{\sqrt{[\Sigma y^2 - 1/n (y)^2][\Sigma z^2 - 1/n (z)^2]}}$$

Persamaan diatas dipergunakan untuk menghitung input data *Path Analysis* (terlampir), maka diperoleh:

	X	Y	Z
X	1.0000	0.5066	0.4169
Y	0.5066	1.0000	0.4446
Z	0.4169	0.4446	1.0000

3. Membuat Matrik Invers Korelasi (R^{-1}):

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} C_{xx} & C_{yx} & C_{zx} \\ & C_{yy} & C_{yz} \\ & & C_{zz} \end{bmatrix}$$

	X	Y	Z
X	1.4336	-0.5740	-0.3425
Y	-0.5740	1.4762	-0.4170
Z	-0.3425	-0.4170	1.3282

4. Menghitung Besarnya Pengaruh:

$$\rho_{zx} = \frac{-C_{zx}}{C_{zz}}$$

$$\rho_{ZX} = -\frac{-0.3425}{1.3282} = 0.2579$$

$$\rho_{ZY} = \frac{-C_{ZY}}{C_{ZZ}}$$

$$\rho_{ZY} = -\frac{-0.4170}{1.3282} = 0.3140$$

5. Menghitung Koefisien Determinasi Total:

$$R^2_{ZYX} = (\rho_{ZX} \cdot r_{ZX}) + (\rho_{ZY} \cdot r_{ZY})$$

$$R^2_{ZYX} = (0,2579 \times 0,4169) + (0,3140 \times 0,4446)$$

$$R^2_{ZYX} = 0,2471$$

$$R_{ZYX} = 0,4971$$

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,4971. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap Kinerja Bisnis dalam mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha, maka dilakukan pengujian yaitu dengan melihat perbandingan antara F_{hitung} dan F_{tabel} , dengan tahapan sebagai berikut:

Mencari F_{hitung} :

$$F = \frac{(n-k-1)R^2}{k(1-R^2)}$$

$$F = \frac{(96-3-1) \cdot 0.2471}{3(1-0.2471)}$$

$$F = 10,0647$$

Menghitung $F_{\text{tabel}} (\alpha, k, n - k - 1)$:

$$F_{\text{tabel}} = 2,7036$$

Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu $F_{\text{hitung}} = 10,0647 > F_{\text{tabel}} = 2,7036$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Bisnis dan variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha.

Besarnya pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap Kinerja Bisnis dalam mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha ditunjukkan oleh besaran nilai *Koefisien Determinasi* (R^2_{YZX}) sebesar = 0,2471. Nilai tersebut diartikan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Bisnis dalam Mewujudkan Efisiensi Kelangsungan Usaha sebesar 24,71%, sedangkan sisanya sebesar 75,29% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM yang tidak dimasukkan ke dalam model.

$$\rho^2_{Z\epsilon 2} = 1 - R^2_{ZYX}$$

$$\rho^2_{Z\epsilon 2} = 1 - 0,2471$$

$$\rho^2_{Z\epsilon 2} = 0,7529$$

Hasil pengujian ini menguatkan dugaan bahwa konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipatif dapat menentukan kinerja bisnis yang pada akhirnya dapat mewujudkan efektivitas kelangsungan usaha.

Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa konsistensi kebijakan dalam hal ini adalah Kebijakan Pembinaan UMKM yang sesuai prosedur dan aturan/norma akan mudah dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan, yaitu pemilik UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Garut. Di samping itu,

transparansi juga menentukan kualitas informasi dalam kebijakan tersebut, dimana informasi yang terdapat dalam kebijakan pembinaan UMKM harus terbuka, mudah dimengerti dan dapat diakses oleh umum sehingga informasi kebijakan pembinaan tersebut dapat sampai dengan jelas. Selanjutnya, kebijakan yang memiliki akuntabilitas yang baik, memiliki dasar keadilan dalam pelaksanaannya, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini UMKM untuk berperan serta dalam proses pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM sehingga sasaran dan tujuannya dapat tercapai. Dengan pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM yang baik akan berimbas pada efektivitas kelangsungan usaha menjadi lebih baik. Walaupun demikian, berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat UMKM yang belum berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan tersebut dikarenakan belum terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut. Namun demikian, segenap jajaran Disperindag dan ESDM Kabupaten Garut tetap konsisten dalam melaksanakan kebijakan pemerintah berupa Kebijakan Pembinaan UMKM yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Bisnis dalam Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Efektivitas Kelangsungan Usaha tidak hanya dipengaruhi oleh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM, namun juga dipengaruhi oleh Kinerja Bisnis dari UMKM tersebut. Dimana faktor tata kelola desain produk, tata kelola keuangan, tata kelola keuangan, tata kelola pelanggan, tata kelola teknologi dan proses produksi, tata kelola pertumbuhan dan perkembangan serta tata kelola pemasaran merupakan serangkaian cara

pengelolaan usaha agar kinerja bisnisnya meningkat. Di dalam program Kebijakan Pembinaan UMKM, maka dinas-dinas terkait bekerjasama khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut yang sudah memberikan dukungan melalui program-program pembinaan UMKM dengan tujuan meningkatkan Kinerja Bisnis UMKM, yang mana hal ini akan berimbas pada Efektivitas Kelangsungan Usaha di Kabupaten Garut.

Selain Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM dan Kinerja Bisnis, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi Efektivitas Kelangsungan Usaha. Berdasarkan hasil penelitian, besarnya pengaruh faktor lain di luar Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM dan Kinerja Bisnis sebesar 75,29% (epsilon). Faktor lain yang diduga mempengaruhi Efektivitas Kelangsungan Usaha tersebut salah satunya adalah faktor modal perbankan. Faktor modal perbankan dimungkinkan memiliki peran dalam menggerakkan dan menjalankan operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas Efektivitas Kelangsungan Usaha sebagaimana yang terungkap melalui wawancara kepada responden.

4.4.2 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X) Terhadap Kinerja Bisnis (Y)

Rumusan sub hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap kinerja bisnis.

H_1 : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap kinerja bisnis.

Untuk menjawab sub hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (ρ_{YX}) sebesar 0,5066.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap Kinerja Bisnis, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Lebih lanjut, nilai tersebut diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

Mencari t_{hitung} :

$$t = \frac{\rho_{YX}}{\sqrt{\frac{1 - \rho_{YX}^2}{n - 2}}}$$

$$t = 5,6968$$

Menghitung $t_{\text{tabel}} (\alpha, n - k - 1)$:

$$t = 1,9861$$

Berdasarkan pengujian di atas, diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $t_{\text{hitung}} = 5,6968 > t_{\text{tabel}} = 1,9861$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Bisnis. Adapun besar pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap variabel Kinerja Bisnis adalah sebesar 25,66% sedangkan sisanya sebesar 74,34% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, nilai tersebut diperoleh melalui persamaan sebagai berikut:

Diketahui dari Matriks Korelasi:

$$R_{YX}^2 = 0,5066^2$$

$$R_{YX}^2 = 0,2566$$

Sehingga:

$$\rho_{Y\varepsilon 1}^2 = 1 - R_{YX}^2$$

$$\rho_{Y\varepsilon 1}^2 = 1 - 0,2566$$

$$\rho_{Y\varepsilon 1}^2 = 0,7434$$

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipatif dapat menentukan meningkatnya Kinerja Bisnis.

Dari hasil observasi, diketahui bahwa konsistensi kebijakan yang diterima oleh responden akan memudahkan pemahaman terhadap transparansi informasi yang disampaikan dengan akuntabilitas informasi yang baik, sehingga berdampak terhadap proses peningkatan Kinerja Bisnis. Di samping itu, azas keadilan dan partisipatif yang diterapkan bagi semua UMKM juga menentukan kualitas Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM menjadi lebih baik. Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM dapat berpengaruh terhadap variabel Kinerja Bisnis. Artinya Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan semakin baik, maka akan semakin baik pula Kinerja Bisnis yang dilaksanakan oleh pemilik UMKM.

4.4.3 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Kinerja Bisnis (Y) Terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha (Z)

Rumusan sub hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh kinerja bisnis terhadap efektivitas kelangsungan usaha.

H₁ : Terdapat pengaruh kinerja bisnis terhadap efektivitas kelangsungan usaha

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur dan diperoleh nilai koefisien jalur (ρ_{ZY}) sebesar 0,3140.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Kinerja Bisnis terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , yaitu $t_{\text{hitung}} = 3,1088 > t_{\text{tabel}} = 1,9861$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Kinerja Bisnis berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha. Nilai tersebut di atas, diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$t_{ZY} = \frac{P_{ZY}}{\sqrt{\frac{1 - R_{ZYX}^2}{(n - k - 1)(1 - R_{ZY}^2)}}$$

$$t_{ZY} = 3,1088$$

Besar pengaruh variabel Kinerja Bisnis terhadap variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha secara langsung adalah sebesar 0,1396 atau sebesar 13,96% sedangkan sisanya sebesar 0,8604 atau sebesar 86,04% (epsilon) dipengaruhi oleh

variabel lain di luar variabel Kinerja Bisnis yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, nilai tersebut diperoleh melalui persamaan sebagai berikut:

Diketahui bahwa:

$$r_{zy} = 0,4446 \text{ dan}$$

$$P_{zy} = 0,3140 \text{ maka:}$$

$$r_{zy} \cdot P_{zy} = 0,4446 \times 0,3140$$

$$r_{zy} \cdot P_{zy} = 0,1396 \text{ atau } 13,96\%$$

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi tata kelola desain produk, tata kelola keuangan, tata kelola keuangan, tata kelola pelanggan, tata kelola teknologi dan proses produksi, tata kelola pertumbuhan dan perkembangan serta tata kelola pemasaran menjadi faktor penguat dalam mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha di Kabupaten Garut, sehingga variabel Kinerja Bisnis secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha.

Dari hasil observasi, diketahui bahwa tata kelola desain produk didukung oleh tata kelola keuangan yang dilakukan oleh para pemilik UMKM dapat dikatakan telah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan perencanaan produk yang akan diproduksi disesuaikan dengan selera konsumen atau pasar melalui tata kelola pelanggan. Di samping itu, tata kelola teknologi dan proses produksi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dimana seluruh komponen produksi dapat bekerja dengan lancar untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, dari sisi tata kelola pertumbuhan dan pembelajaran serta tata kelola pemasaran, kedua aspek tersebut dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup optimal sehingga hal

tersebut dapat mendukung meningkatnya kinerja Bisnis UMKM di Kabupaten Garut.

Dengan demikian kondisi ini menunjukkan bahwa Kinerja Bisnis memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha, artinya apabila Kinerja Bisnis berjalan dengan optimal maka akan mendorong Efektivitas Kelangsungan Usaha akan menjadi optimal.

Namun di sisi lain, terdapat temuan masalah dalam variabel Kinerja Bisnis berdasarkan jawaban responden melalui kuisioner, yaitu bahwa perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan produktivitas dengan kondisi perusahaan saat ini belum optimal termasuk kategori cukup baik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada responden, pada umumnya membenarkan bahwa tidak semua pemilik UMKM memiliki kemampuan yang sama dalam meningkatkan produktivitas perusahaannya, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, salah satu diantaranya yaitu pengalaman menjalankan usaha setiap pemilik berbeda. Pemilik UMKM yang sudah berpengalaman memiliki kemampuan yang terbiasa dengan berbagai kondisi sehingga tahu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu dengan adanya pembinaan UMKM jelas sangat membantu mereka dalam hal manajerial perusahaan.

4.4.4 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM (X) Terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha (Z)

Rumusan sub hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap efektivitas kelangsungan usaha.

H₁ : Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM terhadap efektivitas kelangsungan usaha

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur dan diperoleh nilai koefisien jalur (P_{zx}) sebesar 0,2579.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu $t_{\text{hitung}} = 2,4575 > t_{\text{tabel}} = 1,9861$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha. Hal tersebut dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$t_{zx} = \frac{P_{zx}}{\sqrt{\frac{1 - R_{zyx}^2}{(n - k - 1)(1 - R_{yx}^2)}}$$

$$t_{zx} = 2,4575$$

$$t_{\text{tabel}} = 1,9897$$

Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha secara langsung sebesar 0,0665 atau sebesar 6,65%, sedangkan pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha melalui Kinerja Bisnis adalah sebesar 0,0410 atau sebesar 4,10%. Sehingga, jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha sebesar 0,1075 atau sebesar 10,75% sedangkan sisanya sebesar 0,8925 atau sebesar 89,25% (epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, nilai tersebut diperoleh melalui persamaan sebagai berikut:

1. Menghitung pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Z:

Diketahui bahwa:

$$P_{zx} = 0,2579, \text{ maka:}$$

$$P_{zx} \cdot P_{zx} = 0,2579 \times 0,2579$$

$$P_{zx} \cdot P_{zx} = 0,0665 \text{ atau } 6,65\%$$

2. Menghitung pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Z:

$$(P_{zy})(r_{yz})(P_{zx}) = 0,3140 \times 0,5066 \times 0,22579$$

$$(P_{zy})(r_{yz})(P_{zx}) = 0,0410 \text{ atau } 4,10\%$$

3. Menghitung jumlah pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap variabel Z:

$$(P_{zy})^2 + (P_{zy})(r_{yz})(P_{zx}) = 0,0665 + 0,0410$$

$$(P_{zy})^2 + (P_{zy})(r_{yz})(P_{zx}) = 0,1075 \text{ atau } 10,75\%$$

Hasil pengujian di atas menguatkan dugaan bahwa penggunaan dimensi produktivitas dan efisiensi, laba dan pengembangan usaha, stabilitas usaha, serta semangat dan kepuasan kerja dapat menentukan peningkatan Efektivitas Kelangsungan Usaha.

Dari hasil pengamatan di lapangan, diketahui bahwa penggunaan dimensi produktivitas dan efisiensi memiliki kriteria baik berdasarkan tanggapan atau jawaban responden. Temuan permasalahan pada dimensi ini adalah *kemampuan untuk menurunkan biaya produksi sebagai proses efisiensi* belum optimal yang disebabkan belum maksimalnya tata kelola keuangan dan kondisi ekonomi yang belum stabil

Selanjutnya, pada dimensi laba dan pengembangan usaha terdapat temuan masalah yaitu *kemampuan perusahaan mencapai target keuntungan atau laba* yang belum optimal, walaupun sudah memperoleh keuntungan atau laba namun sering tidak mencapai target keuntungan. Berdasarkan hasil wawancara, para responden lebih menegaskan bahwa walaupun usaha mereka sudah memperoleh keuntungan atau laba namun target keuntungan atau laba tidak selalu tercapai. Beberapa faktor yang mengakibatkannya antara lain harga dan ketersediaan bahan baku yang belum stabil sehingga membebani biaya produksi yang berdampak pada turunnya target keuntungan atau laba yang ingin dicapai, selain itu persaingan bisnis yang semakin ketat mengakibatkan setiap UMKM harus mengkalkulasi dengan matang kapasitas produksi dan penjualannya agar keuntungan atau laba yang akan diperoleh dapat tercapai mendekati target yang ditetapkan.

Selanjutnya dimensi stabilitas usaha, terdapat temuan masalah yaitu *kemampuan perusahaan melakukan pemeliharaan sumber daya-sumber daya dalam organisasi* masih belum optimal, umumnya kemampuan perusahaan memelihara sumber daya-sumber daya dalam usahanya lebih menitik beratkan pada fasilitas produksi, sedangkan sumber daya lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan semisal bangunan produksi yang sangat jarang mendapat perhatian pemilik usaha, dan hal ini umumnya dilakukan oleh para pemilik UMKM. Dan diperkuat dengan hasil wawancara yang menunjukkan responden membenarkan bahwa kemampuan perusahaan memelihara sumber daya lebih diprioritaskan pada fasilitas produksi, hal ini disebabkan agar perusahaan dapat berproduksi dengan baik dan lancar. Tidak menutup kemungkinan sumber daya lainnya yaitu sumber daya manusia yang memang perlu dipelihara karena sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang baik tidak dapat dihasilkan dalam waktu yang cepat, mereka membutuhkan waktu dan pengalaman.

Terakhir pada dimensi semangat dan kepuasan kerja terdapat temuan masalah yaitu *kemampuan perusahaan memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku* belum berjalan dengan baik, dikarenakan kemampuan keuangan perusahaan yang belum kuat. Umumnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan belum memenuhi aturan yang berlaku yaitu Upah Minimal Regional (UMR). Adapun berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa kompensasi yang diberikan terdiri dari upah atau gaji serta insentif dan bonus, walaupun belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti diketahui bahwa modal yang dimiliki UMKM relatif tidak besar sehingga para pemilik harus paham

dalam mengelola keuangan, akibatnya perhitungan kompensasi belum menerapkan sesuai aturan yang berlaku seperti UMR

Berdasarkan keempat faktor di atas, maka pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha berdampak cukup signifikan. Oleh karenanya, Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM secara fakta di lapangan telah dapat berpengaruh nyata terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Salah satu faktor tersebut adalah modal perbankan. Faktor modal perbankan dimungkinkan memiliki peran dalam menggerakkan dan menjalankan operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan kualitas Efektivitas Kelangsungan Usaha sebagaimana yang terungkap melalui wawancara kepada responden.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap Kinerja Bisnis dalam Mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM penilaian responden menunjukkan kategori baik. Indikator dengan nilai persentase tertinggi terdapat pada dimensi Konsistensi dengan butir item *pelaksanaan kebijakan pembinaan kepada UMKM sudah sesuai prosedur*. Sedangkan persentase terendah terdapat pada dimensi Transparansi dengan butir item *informasi kebijakan pembinaan UMKM bersifat terbuka bagi semua UMKM*.
2. Pada variabel Kinerja Bisnis penilaian responden menunjukkan kriteria baik. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi Tata Kelola Teknologi dan Proses Produksi pada item *Perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan proses operasional dengan kondisi perusahaan saat ini*. Sedangkan persentase terendah masih terdapat pada dimensi Kelola Teknologi dan Proses Produksi dengan item *Perusahaan memiliki kemampuan meningkatkan produktivitas dengan kondisi perusahaan saat ini*.
3. Pada variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha penilaian responden menunjukkan kriteria yaitu baik. Indikator dengan nilai persentase tertinggi

ada pada dimensi Semangat dan Kepuasan Kerja dengan butir item *Solidaritas sesama karyawan memajukan perusahaan untuk kepentingan bersama*. Sedangkan persentase terendah terdapat pada dimensi Produktivitas dan Efisiensi dengan butir item *Kemampuan untuk menurunkan biaya produksi sebagai proses efisiensi*.

Hasil pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Bisnis dalam mewujudkan Efektivitas Kelangsungan Usaha. Meskipun pengaruh tersebut menunjukkan belum mencapai optimal akan tetapi dapat dikategorikan signifikan dikarenakan penerapan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian telah mencapai kesesuaian yang cukup signifikan pula, secara empiris hasil pengujian hipotesis ini memberikan gambaran bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM telah cukup optimal, sementara Kinerja Bisnis yang baik dapat memberikan pengaruh nyata terwujudnya Efektivitas Kelangsungan Usaha di Kabupaten Garut.

Adapun hasil pengujian pada sub-sub hipotesis menunjukkan Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Bisnis. Dimana faktor-faktor seperti: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipatif memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat Kinerja Bisnis.

Hasil pengujian sub hipotesis selanjutnya adalah pengaruh Kinerja Bisnis terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha, terdapat pengaruh signifikan dari Kinerja Bisnis terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha. Pengaruh signifikan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor:

tata kelola desain produk, tata kelola keuangan, tata kelola keuangan, tata kelola pelanggan, tata kelola teknologi dan proses produksi, tata kelola pertumbuhan dan perkembangan serta tata kelola pemasaran yang dilakukan oleh pemilik UMKM dalam mengelola usahanya.

Hasil pengujian sub hipotesis berikutnya adalah pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha, terdapat pengaruh signifikan dari Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha. Dimana Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM yang didukung oleh faktor produktivitas dan efisiensi, laba dan pengembangan usaha, stabilitas usaha, serta semangat dan kepuasan kerja yang baik memberikan pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Kelangsungan Usaha.

Selanjutnya, terdapat temuan-temuan permasalahan penting yang terdapat dalam penelitian. Temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan UMKM ditemukan permasalahan seperti:
 - a. Informasi kebijakan pembinaan UMKM belum sepenuhnya bersifat terbuka bagi semua UMKM.
 - b. Belum optimalnya penerapan kebijakan pembinaan UMKM yang dilengkapi dengan prosedur.
 - c. Informasi yang terkandung dalam kebijakan pembinaan UMKM perlu penyesuaian dengan kebutuhan UMKM.
 - d. Pelayanan pada pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM dilakukan masih terdapat membedakan SARA.

- e. Pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM diperlukan penyesuaian dengan aspirasi masyarakat.
2. Pada variabel Kinerja Bisnis, ditemukan permasalahan seperti:
 - a. Kemampuan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas belum optimal dengan kondisi perusahaan saat ini.
 - b. Kemampuan perusahaan belum optimal menetapkan kualitas produk sesuai dengan keinginan pasar.
 - c. Kinerja perusahaan saat ini belum maksimal meningkatkan pendapatan.
 - d. Kemampuan perusahaan belum optimal dalam hal efisiensi biaya produksi dan operasional.
 - e. Kemampuan perusahaan belum optimal dalam pengelolaan pelanggan untuk dapat meningkatkan jumlah pelanggan.
 - f. Kemampuan perusahaan belum maksimal untuk menambah atribut produk melalui tampilan kemasan yang lebih bervariasi.
 - g. Kemampuan perusahaan belum maksimal meningkatkan proses perubahan pada bagian produksi.
 - h. Kemampuan perusahaan belum optimal meningkatkan motivasi pegawai.
 - i. Kemampuan perusahaan belum maksimal meningkatkan penjualan hasil produksi.
 3. Pada variabel Efektivitas Kelangsungan Usaha ditemukan permasalahan seperti:
 - a. Kemampuan untuk menurunkan biaya produksi sebagai proses efisiensi belum optimal dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

- b. Kemampuan perusahaan belum optimal untuk mencapai target keuntungan atau laba,
- c. Kemampuan perusahaan belum maksimal melakukan pemeliharaan sumber daya-sumber daya dalam organisasi.
- d. Kemampuan perusahaan belum maksimal memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut maka implikasi hasil penelitian dan temuan permasalahan penting lainnya terhadap objek atau fenomena masalah penelitian, yaitu walaupun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum variabel mengindikasikan hasil yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan pada item jawaban responden sebagaimana temuan-temuan masalah tersebut di atas yang pada gilirannya akan mempengaruhi Efektivitas Kelangsungan Usaha khususnya UMKM di Kabupaten Garut.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan-temuan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan permasalahan pada pelaksanaan kebijakan pembinaan UMKM, maka peneliti menyarankan untuk memberikan dan memudahkan akses informasi yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan UMKM. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam hal sosialisasi kebijakan pembinaan UMKM sehingga terjadi kesamaan persepsi terhadap informasi kebijakan pembinaan UMKM tersebut.

- b. Melakukan pendataan UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Garut sehingga apabila terdapat informasi yang berkaitan dengan UMKM maka dinas terkait dapat menghubungi dan memberikan informasi secepatnya.
 - c. Membuat suatu portal atau website yang khusus mewadahi UMKM dan informasi sehingga semua UMKM dapat mengakses informasi tersebut.
 - d. Bagi UMKM yang belum terdaftar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral maupun dinas lainnya yang terkait UMKM, diperlukan kesadaran para pemilik UMKM tersebut untuk mendaftarkan diri sehingga pendataan dapat lebih cepat dilaksanakan.
2. Berdasarkan temuan permasalahan pada Kinerja Bisnis, maka peneliti menyarankan agar setiap pemilik UMKM membekali diri dengan pengetahuan manajerial atau tata kelola perusahaan sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan produktivitasnya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- a. Mengikuti berbagai program pembinaan UMKM yang dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait, khususnya yang berkaitan dengan manajerial atau tata kelola perusahaan .
 - b. Menunjuk seorang Manajer handal yang menguasai manajerial atau tata kelola perusahaan dengan diberikan tugas /kewajiban dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sebagai upaya pengembangan usaha.
 - c. Untuk jangka panjang, pemilik UMKM dapat menempuh jalur pendidikan formal guna memperoleh ilmu dan pengetahuan manajerial atau tata kelola perusahaan.

3. Berdasarkan temuan permasalahan pada Efektivitas Kelangsungan Usaha, maka peneliti menyarankan agar pemilik UMKM meningkatkan kemampuan tata kelola keuangan dan tata kelola teknologi dan proses produksi sehingga lebih mampu menurunkan biaya produksi sebagai proses efisiensi demi kelangsungan usahanya. Pada umumnya operasional UMKM dijalankan langsung oleh pemilik usaha, sehingga perubahan yang ingin diwujudkan dalam usahanya maka pemilik UMKM harus ikut serta berperan dalam proses perubahan tersebut, bahkan seharusnya yang paling terdepan memimpin proses perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. Pemilik UMKM dapat mengikutsertakan pegawai pilihan dan kepercayaannya untuk terlibat dalam pendidikan dan pelatihan sebagai upaya meningkatkan kemampuan tata kelola perusahaan khususnya yang berkaitan dengan keuangan, teknologi dan proses produksi sehingga dapat membantu proses efisiensi sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
 - b. Melaksanakan forum silaturahmi dan diskusi (*sharing*) dalam Asosiasi atau Himpunan UMKM untuk menjalin kerjasama yang berkaitan dengan keuangan, teknologi dan proses produksi untuk mencari solusi dalam hal menurunkan biaya produksi sebagai proses efisiensi
 - c. Melakukan kerjasama teknis sebagai konsultan perusahaan dalam hal keuangan, teknologi dan proses produksi dengan dinas-dinas terkait dalam upaya memperoleh ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan tata

kelola keuangan, teknologi dan proses produksi sebagai upaya meningkatkan kemampuan menurunkan biaya produksi.

4. Adapun saran untuk penelitian lebih lanjut, berkaitan dengan beberapa temuan permasalahan pada penelitian serta adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada masa yang akan datang dapat melakukan penelitian lebih lanjut selain dari variabel-variabel penelitian ini. Variabel penelitian lanjutan yang disarankan antara lain tentang modal perbankan, koordinasi antar dinas, kualitas SDM, serta pendidikan dan pelatihan melalui penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduddin, Adi. 2006. *Pengkajian Dukungan Finansial dan Nonfinansial dalam Pengembangan Sentra Bisnis UKM*, Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Nomor 1 Tahun I.
- Anggarini, Yunita dan Puranto B. Hendra. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD evara Komprehensif*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN. Yogyakarta.
- Anis, M; Nandiroh, S; & Supriyanto, A. 2007. *Usaha Peningkatan Produktivitas dengan Productivity Evaluation Tree (PET) Models*. Jurnal Ilmiah Teknik Industri, Vol.5. No.3. pp. 106-112.
- Badar, Muhamad Hamid. 2011. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembentukan Sekretariat Daerah terhadap Manajemen Sekretariat Daerah dalam rangka Mewujudkan Efektivitas Dukungan Administrasi bagi Perangkat Daerah dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi Perangkat Daerah diKabupaten Garut*. Tesis Pascasarjana Administrasi Negara. Universitas Garut. Garut.
- Bernardin, H.J. and Russel, J.E.A. 2013. *Human Resource Management: An Experiental Approach. 6th Edition*. McGraw-Hill. Singapore.
- Bititci, U. S., Ackermann, F., Ates, A., Davies, J., Garengo, P., Gibb, S., Bourne, M. 2011. *Managerial Processes: Business Process That Sustain Performance* (Vol. 31).
- Bungin. Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Edisi 1. Cetakan Kedua. Kencana Perdana Media Group. Jakarta.
- Durangga, Ade. 2003. *Pengaruh Pelaksanaan Kabijakan Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kinerja Pegawai dan Peningkatan Pelayanan Publik pada Kantor Setda Kabupaten Tasikmalaya*. Tesis Pascasarjana Administrasi Negara. Universitas Garut. Garut.
- Echols, Jhon dan Shadily Hassan. 2014. *Kamus Indonesia Inggris*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Goyal, Praveen,. Zillur Rahman.,A.A. Kazmi. 2013. *Corporate Sustainability Performance and Firm Performance Research: Literature Review and Future Research Agenda. Management Decision*. Emerald Group Publishing Limited. Vol. 51. Iss. 2. pp. 361-379.

- Hasibuan, Melayu P. 2014. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Irawan, P. 2009. *Analisis Kinerja*. STIA LAN Press. Jakarta.
- Iskandar, Jusman. 2017a. *Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel-Variabel Sosial dan Psikologi*. Edisi Keempat. Puspaga. Bandung.
- _____. 2017b. *Bunga Rampai Administrasi Negara*. Edisi Keempat. Puspaga. Bandung.
- _____. 2017c. *Dinamika Kelompok. Organisasi dan Komunikasi Sosial*. Puspaga. Bandung.
- _____. 2017d. *Kapita Selekta Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik*. Cetakan Keempat. Puspaga. Bandung.
- _____. 2017e. *Manajemen Publik*. Edisi Kelima. Puspaga. Bandung.
- _____. 2017f. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Edisi Keenam. Puspaga. Bandung.
- _____. 2017g. *Teori Administrasi*. Puspaga. Bandung.
- _____. 2017h. *Teori Sosial*. Puspaga. Bandung.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Perubahan Paradigma Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Backgroud Study RPJMN 2010-2014 Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM*. Bappenas. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Kusuma, Fifi Surya Dewi dan Devie. 2013. *Analisa Pengaruh Knowledge Management Terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Perusahaan*. Business Accounting Review. Vol. 1. No. 2. pp. 161-171.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Makmur. 2105. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Refika Aditama. Bandung.
- Meitaningrum, Dhita Ayu, dkk. 2013. *Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.3, pp. 192-199.

- Mulyadi. 2010. *Akuntansi Manajemen*, Edisi 9. Penerbit Salemba. Jakarta.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2012. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Prawirosentono. 2007. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Alfabeta. Bandung.
- Ramdhani, Abdullah, dan Muhammad Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik. Vol. 11. No. 01. ISSN: 1412-7083. pp. 1-12. www.jurnal.uniga.ac.id.
- Rendy dan Devie. 2013. *Analisa Pengaruh Activity Based Costing terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Organisasi*. Business Accounting Review. Vol 1. No.2. pp. 61-71
- Riduwan. 2010. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung. Alfabeta.
- Rue, Leslie W dan Byars, Llyod L. 2003. *Management: Skills and Application*. McGraw-Hill/Irwin.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama. Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Manajemen Strategik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soediyono, Reksoprayitno. 2006. *Ekonomi Makro*. Edisi Pertama. BPFE. UGM. Yogyakarta.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.

- _____. 2014. *Statistika Untuk Penelitian*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Regina dan Devie. 2013. *Analisa Pengaruh Supply Chain Management terhadap Keunggulan Bersaing dan Kinerja Perusahaan*. *Business Accounting Review*. Vol. 1. No, 2. pp. 1-12.
- Supriatna, Tjahya. 2004. *Legitimasi Pemerintahan: Manajemen dan Organisasi Publik serta Manajemen Pemerintahan Daerah*. CV. Maulana. Bandung.
- _____. 2011. *Akuntabilitas Pemerintah dalam Administrasi Publik*. Indra Prahasta. Bandung.
- Suradianata, Ermaya. 2006. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Ramadhan. Bandung.
- Susanto, Azhar. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Ghaila Indonesia. Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 2009. *UMKM di Indonesia*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta
- _____. 2005. *Perilaku Organisasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Veithzal, Rivai, dan Ella Jauvavi Sagala. 2010. *Manajemen SDM untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek*. Edisi 2. Rajawali Pers. Jakarta.
- Wahab, Solihin A. 2007. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- _____. 2010. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. PT. Rajagrafindo. Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. *Center for Academic Publishing Services*. Yogyakarta.
- Witaradya. www.wordpress.com (diunduh pada tanggal 23 Desember 2017)

Dokumen:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

BPS Kabupaten Garut. 2015. *Garut dalam Angka Tahun 2016*. Kabupaten Garut

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut. 2015. *Data Potensi Industri di Kabupaten Garut Tahun 2015-2016*.